



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016



1111 Tahun
Kota Magelang
11 April 2017

**BAGIAN ORGANISASI
SETDA KOTA MAGELANG 2017**



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb;

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah dan kenikmatan kepada kita sekalian. Semoga dalam menjalankan amanah dan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat selalu mendapatkan bimbingan, petunjuk dan pertolongan-Nya. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan masyarakat Kota Magelang kepada kami untuk kembali memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat periode 2016-2021.

Tahun 2016 merupakan Tahun Pertama pelaksanaan RPJMD 2016-2021, adapun Visi pembangunan yang kami rumuskan sebagai berikut: **“MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**. Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya dalam rangka penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Kota Magelang Tahun 2016 ini menyajikan realisasi kinerja atas indikator-indikator sasaran yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016, dimana indikator-indikator sasaran telah mengacu pada dokumen RPJMD 2016-2021.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi atas tersusunnya laporan ini. Semoga Alloh SWT, senantiasa memberikan perlindungan dan meridloi langkah-langkah kita dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Kota Magelang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, Maret 2017
WALIKOTA MAGELANG

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai sarana akuntabilitas kinerja atas amanat yang telah dipercayakan. Laporan kinerja dapat dijadikan sebagai media introspeksi atas pelaksanaan program-program pembangunan dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Sejauhmana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja, sehingga akan memberikan umpan balik guna perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun selanjutnya.

Pengukuran kinerja dalam laporan ini didasarkan pada Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, hal ini berkaitan dengan adanya pergantian Kepemimpinan di Pemerintah Kota Magelang, dan penerapan RPJMD periode 2016-2021 Kota Magelang yang merupakan penerjemahan atas Visi Misi Kepala Daerah terpilih hasil PILKADA 2015. Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang tahun 2016, telah ditetapkan 29 sasaran dengan 70 indikator sasaran. Pengukuran terhadap indikator kinerja terbagi menjadi 5 kategori dalam skala ordinal merujuk pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 yaitu capaian $\geq 91\%$ kriteria sangat tinggi, 76% sampai dengan $< 90\%$ kriteria tinggi, 66% sampai dengan $< 75\%$ kriteria sedang, 51% sampai dengan $< 65\%$ kriteria rendah dan capaian $< 50\%$ kriteria sangat rendah. Pengukuran kinerja atas 29 sasaran dapat disarikan sebagai berikut:

- a. Pada Misi Pertama : dari 9 Sasaran yang diukur diperoleh hasil 8 sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sangat tinggi dan 1 sasaran dengan rata-rata capaian kinerja tinggi.
- b. Pada Misi Kedua : dari 6 Sasaran yang diukur diperoleh hasil 4 sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sangat tinggi dan 2 sasaran dengan rata-rata capaian kinerja tinggi.
- c. Pada Misi Ketiga : dari 10 Sasaran yang diukur 6 sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sangat tinggi, 3 sasaran dengan rata-rata capaian kinerja tinggi dan 1 sasaran dengan rata-rata capaian kinerja rendah.
- d. Pada Misi Keempat: dari 2 Sasaran yang diukur 2 sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sangat tinggi.
- e. Pada Misi Kelima : dari 3 Sasaran yang diukur 2 sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sangat tinggi dan 1 sasaran dengan rata-rata capaian kinerja tinggi.

Adapun pengukuran atas 70 indikator kinerja sasaran dapat disarikan sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sangat tinggi sejumlah 54 indikator atau 77,14%.
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria tinggi sejumlah 7 indikator atau 10,00%.
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sedang sejumlah 2 indikator atau 2,86%.



- d. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria rendah sejumlah 2 indikator atau 2,86%.
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sangat rendah sejumlah 4 indikator atau 5,71%.
- f. Data belum dapat tersaji untuk 1 indikator atau 1,43% yaitu nilai opini BPK atas LKPD 2016.

Selanjutnya apabila data dipilah berdasarkan tingkat ketercapaian realisasi indikator kinerja terhadap target kinerja maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja di atas 100% (melampaui target) sejumlah 37 indikator atau 52,86%.
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja 100% (sesuai target) sejumlah 13 indikator atau 18,57 %.
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja di bawah target dengan rentang antara 75% s/d 99,99% sejumlah 11 indikator atau 15,71 %.
- d. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja di bawah target dengan rentang antara 0% s/d 74,99% sejumlah 8 indikator atau 11,43 %.
- e. Data belum dapat tersaji sejumlah 1 indikator atau 1,43% , yaitu nilai opini BPK atas LKPD 2016.

Untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran, dan dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran sebagian besar menggunakan sumber daya dengan efisien.

Kemudian untuk mengantisipasi kendala dan permasalahan pada pencapaian sasaran sebagai wujud upaya meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang, diperlukan adanya sinergi antar pemangku kepentingan dan kesinambungan dalam perencanaan program dan kegiatan, pengalokasian anggaran yang selaras, terarah dan tepat sasaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang konsisten agar target kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD 2016-2021 dapat terwujud dan tercapai sesuai rencana.



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-1
1.3 Gambaran Umum Kota Magelang	I-1
a. Kondisi Geografis dan Demografi	I-1
b. Kondisi Pemerintahan	I-5
c. Isu Strategis	I-9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis Pemerintah Kota Magelang	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang	II-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG	III-1
3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran	III-1
3.2 Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran	III-8
3.3 Capaian Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kota Magelang	III-106
3.4 Realisasi Anggaran per Sasaran	III-122
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	
Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Kota Magelang	
Daftar Prestasi Kota Magelang Tahun 2016	



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel. 1.1	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Magelang Tahun 2015	I-3
Tabel. 1.2	Jumlah Aparatur Kota Magelang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2016	I-8
Tabel. 1.3	Komposisi PNS Pemerintah Kota Magelang Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016	I-8
Tabel. 1.4	Komposisi Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016	
Tabel. 2.1	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016	II-8
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	III-2
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Yang Profesional dan Organisasi Perangkat Daerah Yang Efektif Dilengkapi dengan Norma Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur	III-8
Tabel 3.3	Pencapaian Indikator 15 Bidang SPM Semester I 2016	III-10
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan serta Penegakan Hukum dan HAM Tanpa Diskriminasi	III-12
Tabel 3.5	Tren Perolehan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Magelang	III-15
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Mendukung Layanan Smart City dalam Pemerintahan dan Pelayanan Publik	III-17
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel	III-19
Tabel 3.8	Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel	III-20
Tabel 3.9	Inovasi Proses Perencanaan	III-21
Tabel 3.10	Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	III-27
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	III-27
Tabel 3.12	Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Kota Magelang Tahun 2013-2016	III-28
Tabel 3.13	Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Derajat Otomoni Fskal Kota Magelang Tahun 2016	III-29
Tabel 3.14	Perkembangan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat Kota Magelang Tahun 2013-2016	III-31
Tabel 3.15	Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat Kota Magelang Tahun 2016	III-32



		Halaman
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan	III-34
Tabel 3.17	Mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	III-35
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	III-37
Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Partisipasi Pemuda dalam Ajang Prestasi Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	III-38
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Layanan Pendidikan Menuju Masyarakat Cerdas dan Berdaya Saing	III-42
Tabel 3.21	Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tahun 2016	III-44
Tabel 3.22	Daftar Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016	III-45
Tabel 3.23	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Layanan Kesehatan Masyarakat	III-46
Tabel 3.24	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	III-55
Tabel 3.25	Menghitung Indeks Pencemaran Udara	III-60
Tabel 3.26	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	III-64
Tabel 3.27	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Sistem Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	III-66
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemanfaatan Lahan Berkelanjutan Sesuai Regulasi Tata Ruang	III-68
Tabel 3.29	Data Jumlah Bangunan Ber IMB	III-69
Tabel 3.30	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana dan Sarana Dasar Yang Berkeadilan dan Sesuai Rasio Kebutuhan Masyarakat	III-70
Tabel 3.31	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Kesenjangan Wilayah dan Kesenjangan Antar Kelompok Pendapatan	III-71
Tabel 3.32	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Sistem Transportasi dan Lalu Lintas Yang Baik, Ramah Lingkungan dan Berkeadilan	III-73
Tabel 3.33	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kondusifitas Iklim Investasi, Daya Saing dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	III-77
Tabel 3.34	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas Daerah dan Ekonomi Kreatif	III-80
Tabel 3.35	Data Krenova Kota Magelang Yang Berprestasi	III-81
Tabel 3.36	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan	III-84
Tabel 3.37	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Lapangan Kerja	III-89
Tabel 3.38	Program /Kegiatan Pendukung dan Jumlah Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Lapangan Kerja	III-89



		Halaman
Tabel 3.39	Capaian Indikator kinerja Program Ketenagakerjaan Tahun 2016	III-90
Tabel 3.40	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kesejahteraan Sosial, Penurunannya Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	III-91
Tabel 3.41	Program /Kegiatan Pendukung dan Jumlah Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penurunan PMKS	III-92
Tabel 3.42	Capaian Indikator kinerja Program Bidang Sosial Tahun 2016	III-92
Tabel 3.43	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Daya Dukung Lingkungan	III-93
Tabel 3.44	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Kesenjangan Gender	III-94
Tabel 3.45	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertumbuhan Jenis Kesenian dan Adat Budaya yang Dikembangkan dan Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	III-96
Tabel 3.46	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertumbuhan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Potensial	III-98
Tabel 3.47	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terbentuknya Karakter Religius Masyarakat Sebagai Landasan Moral dan Etika Pembangunan	III-99
Tabel 3.48	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Lingkungan Kondusif yang Mendukung Stabilitas Daerah serta Memberikan Rasa Aman Bagi Masyarakat	III-101
Tabel 3.49	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat dalam Peribadatan	III-105
Tabel 3.50	Prediksi NTB dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2016	III-106
Tabel 3.51	Matrik Tipologi Sektor Pembentuk PDRB berdasar Indikator Indeks Dominasi Sektor (IDS) dan Indeks Potensi Pengembangan Sektor (IPPS) di Kota Magelang*	III-107
Tabel 3.52	Prediksi Struktur Ekonomi Kota Magelang (adhb) Tahun 2016	III-109
Tabel 3.53	PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2015 dan Prediksi Tahun 2016	III-110
Tabel 3.54	PDRB menurut Komponen Pengeluaran di Kota Magelang Tahun 2011-2015	III-111
Tabel 3.55	Pilar Daya Saing tertinggi di Kota Magelang di antara Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2015	III-112
Tabel 3.56	Perbandingan IPM Kota Magelang menurut Metode Lama dan Metode Baru	III-114
Tabel 3.57	Perbandingan IPM Jawa Tengah dan Nasional menurut Metode Lama dan Metode Baru	III-114
Tabel 3.58	Perkembangan Usia Harapan Hidup (tahun) Penduduk Kota Magelang Tahun 2010-2015	III-115
Tabel 3.59	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Magelang Tahun 2010-2015, antara Metode Lama dan Metode Baru (tahun)	III-115
Tabel 3.60	Harapan Lama Sekolah (tahun) Penduduk Kota Magelang Tahun 2010-2015	III-116



		<i>Halaman</i>
Tabel 3.61	Beberapa Indikator Pendidikan Penduduk Kota Magelang Tahun 2014-2015	III-116
Tabel 3.62	Beberapa Lulusan Peserta Didik di Kota Magelang Tahun 2012-2014	III-117
Tabel 3.63	Perkembangan Pengeluaran Riil Penduduk Kota Magelang Tahun 2009-2012 beserta prediksi 2013-2015	III-117
Tabel 3.64	Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kota Magelang Tahun 2010-2015	III-118
Tabel 3.65	Nilai IPG, IDG, dan IPM Kota Magelang, Tahun 2010-2015	III-119
Tabel 3.66	Jumlah Penduduk Miskin Kota Magelang (jiwa) Tahun 2011-2015	III-120
Tabel 3.67	Indeks Gini Kota Magelang tahun 2010-2015	III-120
Tabel 3.68	Kondisi Penduduk Usia Kerja di Kota Magelang Tahun 2008-2015 (ribu jiwa / orang)	III-121
Tabel 3.69	Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Magelang Tahun 2010-2016	III-122
Tabel 3.70	Realisasi Anggaran per Sasaran	III-122

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Peta Kedudukan Kota Magelang Terhadap Jawa Tengah	I-2
Gambar 1.1	Luas Daerah Kota Magelang Menurut Kecamatan	I-3
Gambar 3.1	Grafik Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2016	III-7
Gambar 3.2	Grafik Realisasi Indikator kinerja terhadap Target	III-7
Gambar 3.3	Screenshot Sistem Informasi Perencanaan	III-22
Gambar 3.4	Screenshot Sistem Informasi Tata Ruang	III-23
Gambar 3.5	Peran Penting Data dalam Siklus Perencanaan	III-24
Gambar 3.6	DATA GO sebagai Data Centre Kota Magelang	III-26
Gambar 3.7	Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Kota Magelang Tahun 2013-2016	III-29
Gambar 3.8	Perkembangan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat Kota Magelang Tahun 2013-2016	III-32
Gambar 3.9	Pelatihan dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana	III-67
Gambar 3.10	Traffic Light Pedestrian Aloon-Aloon Magelang	III-75
Gambar 3.11	Walikota Magelang didampingi Kapolresta Menerima Anugerah WTN Tahun 2016	III-76
Gambar 3.12	TABELA Cerdas, Pemenang Favorit KRENOVA Jawa Tengah Tahun 2016	III-82
Gambar 3.13	Penyerahan Anugerah Budhipraja Tahun 2016	III-83
Gambar 3.14	Penyerahan Anugerah Widigdapura Tahun 2016	III-83
Gambar 3.15	Kegiatan Pemantaun/Survey Ketersediaan Pangan (Beras)	III-85
Gambar 3.16	Kegiatan Pemantauan Distribusi Beras Kota Magelang 2016	III-88
Gambar 3.17	Peresmian Toko Tani Indonesia (TTI) Oleh Gubernur Jawa Tengah dan Pemantauan TTI oleh Petugas	III-88
Gambar 3.18	Pelaksanaan Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat	III-100
Gambar 3.19	Upaya P4GN	III-103
Gambar 3.20	Dialog Peningkatan Wawasan Kebangsaan	III-104
Gambar 3.21	Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Tahun 2011-2015 dan Prediksi Tahun 2016	III-108
Gambar 3.22	Grafik Perkembangan Laju Inflasi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional, Tahun 2012-2016	III-110
Gambar 3.23	Grafik Indeks Gini Kota Magelang dan Wilayah Sekitar, Tahun 2015	III-113



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan kinerja sebagai salah satu bagian dari SAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya, sejauh mana keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran melalui pengukuran indikator kinerja, seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Gambaran Umum Kota Magelang

- a. Kondisi Geografis dan Demografi.
Luas wilayah Kota Magelang 1.812 Ha (18,12 km²), secara administratif terbagi atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan luas wilayah rata-rata tidak lebih dari 2 km². Kota Magelang secara administratif terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang serta berada di persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung. Kota Magelang juga berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass dan dataran tinggi Dieng, disamping obyek wisata yang berada di dalam Kota Magelang sendiri yaitu Kawasan wisata Taman Kyai Langgeng. Letak strategis Kota Magelang ini juga ditunjang dengan penetapan Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana

Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Kawasan ini merupakan andalan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi unggulan utama meliputi industri besar, menengah dan kecil yang menghasilkan berbagai produk; pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, termasuk perguruan tinggi dan simpul pariwisata. Posisi tersebut menjadikan Kota Magelang sebagai kota kecil dengan nilai strategis dalam katagori sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW).

Gambar 1.1
Peta Kedudukan Kota Magelang Terhadap Jawa Tengah



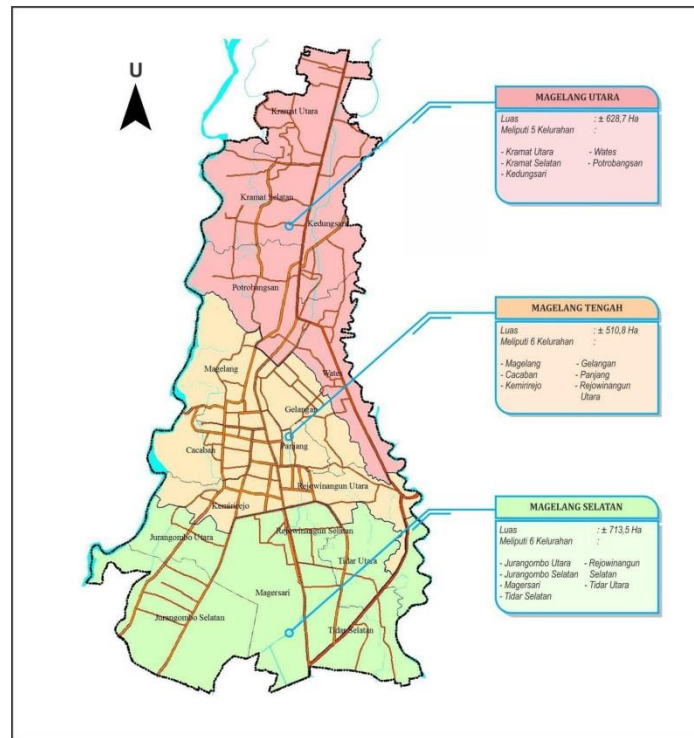
Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Sebagai kota yang menggantungkan harapan besar di sektor jasa, Kota Magelang mempunyai keunggulan komparatif geografis apabila dibandingkan dengan daerah di sekitarnya (*comparative advantage*). Banyak layanan jasa yang dapat disediakan oleh Kota Magelang, baik yang berhubungan dengan transportasi maupun layanan jasa pariwisata, yang didukung dengan kondisi sarana prasarana yang memadai sehingga diharapkan mampu memberikan pengaruh dan melayani beberapa kabupaten dan kota.

Kota Magelang merupakan kota kecil yang berada di tengah-tengah Kabupaten Magelang dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Elo/Kecamatan Tegalorejo Kabupaten Magelang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Progo/ Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

Gambar 1.2
Luas Daerah Kota Magelang Menurut Kecamatan



Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Berdasarkan gambaran tersebut di atas dapat dilihat bahwa peluang pengembangan wilayah tetap diupayakan di seluruh wilayah agar keramaian kota bisa tersebar merata ke hampir seluruh sudut kota. Beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Magelang memberi perhatian lebih terhadap pengembangan wilayah utamanya pada pada wilayah perbatasan, daerah pinggiran Kota dan beberapa area strategis yang di anggap mampu untuk berkembang dan memacu pertumbuhan beberapa daerah di sekitarnya.

Sedangkan secara demografi, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2015 sebanyak 132.261 jiwa pada wilayah Kota Magelang seluas 18,12km². Tingkat kepadatan penduduk di Kota Magelang pada beberapa tahun terakhir menunjukkan tren meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan tingkat kerapatan penggunaan lahan kawasan terbangun, sehingga bisa dikatakan semakin tinggi beban lingkungan hidup.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Magelang Tahun 2015

KECAMATAN/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			RASIO JENIS KELAMIN
	L	P	L+P	
Magelang Selatan	21,588	21,913	43,501	98.52%
Rejowinangun Selatan	4,482	4,483	8,965	99.98%

KECAMATAN/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			RASIO JENIS KELAMIN
	L	P	L+P	
Magersari	4,381	4,435	8,816	98.78%
Jurangombo Utara	2,135	2,202	4,337	96.96%
Jurangombo Selatan	3,470	3,586	7,056	96.77%
Tidar Utara	4,240	4,300	8,540	98.60%
Tidar Selatan	2,880	2,907	5,787	99.07%
Magelang Utara	19,017	19,788	38,805	96.10%
Wates	4,519	4,683	9,202	96.50%
Potrobangsari	4,356	4,610	8,966	94.49%
Kedungsari	3,712	3,821	7,533	97.15%
Kramat Utara	2,454	2,502	4,956	98.08%
Kramat Selatan	3,976	4,172	8,148	95.30%
Magelang Tengah	24,580	25,375	49,955	96.87%
Kemirirejo	3,049	3,141	6,190	97.07%
Cacaban	4,022	4,209	8,231	95.56%
Rejowinangun Utara	6,258	6,256	12,514	100.03%
Magelang	3,837	4,076	7,913	94.14%
Panjang	3,291	3,518	6,809	93.55%
Gelangan	4,123	4,175	8,298	98.75%
JUMLAH	65,185	67,076	132,261	97.18%

Sumber : DDA Tahun 2016

Data kepadatan penduduk Kota Magelang berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebanyak 132.261 jiwa, kepadatan penduduk Kota Magelang sebesar 7.299 jiwa/km². Jumlah ini sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan dengan data tahun 2014 dan tahun 2013, yang mana pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Magelang sebanyak 131.703 jiwa dengan tingkat kepadatan 7.268 jiwa/km². Sementara pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk 130.836 jiwa, tingkat kepadatan penduduknya sebesar 7.221 jiwa/km². Kepadatan penduduk pada tahun 2011 dan 2012 berturut-turut sebesar 7.150 jiwa/km² dan 7.227 jiwa/km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 129.556 jiwa dan 130.955 jiwa pada tahun 2012.

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang menunjukkan kepadatan penduduk tertinggi tahun 2015 di Kelurahan Rejowinangun selatan (20.849 jiwa/km²), disusul Kelurahan Panjang (19.454 jiwa/km²) dan Rejowinangun Utara (12.640 jiwa/km²). Sementara Kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif kecil ada di Jurangombo Selatan (3.122 jiwa/km²) dan Kelurahan Tidar Selatan (4.567 jiwa/km²). Kepadatan penduduk yang relatif tinggi ini merupakan salah satu permasalahan bagi pemerintah terkait dengan penataan ruang dan kota serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Keterbatasan lahan untuk permukiman merupakan masalah yang khas bagi



wilayah perkotaan terutama bagi Kota Magelang yang merupakan kota terkecil dengan wilayah yang terbatas.

b. Kondisi Pemerintahan

b.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan kepada Walikota mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya masing-masing. Lembaga Teknis Daerah pada umumnya adalah sebagai unsur pendukung tugas Walikota yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sedangkan Lurah sebagai pimpinan wilayah

Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, penataan kelembagaan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan-Peraturan Daerah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang terdiri dari :

- 1) Sekretariat Daerah (3 Asisten; 9 Bagian).
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Staf Ahli (3 Staf Ahli).
- 4) Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 4.1) Dinas Pendidikan,;
 - 4.2) Dinas Kesehatan;
 - 4.3) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
 - 4.4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 4.5) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4.6) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota;
 - 4.7) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 4.8) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - 4.9) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 4.10) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 4.11) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4.12) Dinas Pengelolaan Pasar.
- 5) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 - 5.1) Inspektorat;
 - 5.2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 5.3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 5.4) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 5.5) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 5.6) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 5.7) Kantor Lingkungan Hidup;



- 5.8) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- 5.9) Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- 5.10) Kantor Penanaman Modal;
- 5.11) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 5.12) Satuan Polisi Pamong Praja.
- 6) Kecamatan (3 Kecamatan).
- 7) Kelurahan (17 Kelurahan).

Pada tanggal 19 Juni 2016 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kemudian dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dengan Peraturan Daerah tersebut dibentuk Perangkat Daerah Kota Magelang dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah (3 Staf Ahli Walikota, 3 Asisten, 9 Bagian)
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 5. Dinas Sosial
 6. Dinas Tenaga Kerja
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 8. Dinas Pertanian dan Pangan
 9. Dinas Lingkungan Hidup
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 11. Dinas Perhubungan
 12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 14. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 17. Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 6. Rumah Sakit Umum Daerah
- f. Kecamatan (3 Kecamatan) dan 17 Kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

b.2. Gambaran Umum Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Magelang

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya aparatur yang memadai, pada Tahun 2016 jumlah aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebanyak **3.932** personel. Kondisi jumlah aparatur tersebut selama lima tahun terakhir disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Kota Magelang Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2016

TINGKAT PENDIDIKAN	2012	2013	2014	2015	2016
S-3	0	0	0	0	0
S-2	256	264	275	332	356
S-1	2074	2051	2.081	2.028	1954
D-4	37	38	40	39	41
D-3	513	483	459	493	479
D-2	295	242	209	146	120
D-1	35	32	27	24	20
SLTA	825	759	715	711	653
SLTP	192	185	207	180	173

Sumber : BKD Kota Magelang per Desember 2016

Komposisi aparatur Pemerintah Kota Magelang berdasarkan pada tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Komposisi PNS Pemerintah Kota Magelang
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
S3	0
S2	356
S1	1,954
D4	41
D3	479
D2	120
D1	20
SLTA	653
SLTP	173

Sumber : BKD Kota Magelang per Desember 2016

Sedangkan komposisi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Magelang menurut jenis kelamin pada Tahun 2016 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Komposisi Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin
Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016

TINGKAT ESELON	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
ESELON I	---	---
ESELON II	22	3
ESELON III	60	41
ESELON IV	201	183
ESELON V	7	10
JUMLAH	290	237

Sumber : BKD Kota Magelang per Desember 2016

c. Isu Strategis

Dari hasil kajian terhadap kondisi Kota Magelang dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, provinsi maupun global, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Magelang.

Dari proses analisis lingkungan strategis dengan menyandingkan:

- 1) Sasaran pokok pembangunan daerah dalam UU no 23 tahun 2014 pasal 258, yaitu: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing Daerah;
- 2) RPJPD Kota Magelang 2005-2025, yaitu terwujudnya Kota Magelang: (i) sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai; (ii) masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; (iii) daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi daerah secara kreatif, inovatif didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas; (iv) perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (v) good governance dan clean government dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (civil society), dan media massa sehingga kehidupan masyarakat Kota Magelang agamis, damai, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran;
- 3) RTRW Kota Magelang 2011-2031: arah kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang kota;

- 4) Dimensi pokok pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 yaitu (i) Keamanan dan Ketertiban; (ii) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi; (iii) Pemerataan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah; (iv) Kepastian dan penegakan hukum, (v) Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan; (vi) Pembangunan sektor unggulan: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (vii) Revolusi Mental; (viii) Politik dan Demokrasi;
- 5) RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, dengan isu: Pengurangan Kemiskinan, Pengurangan Pengangguran, Pembangunan Infrastruktur, Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi, Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah;
- 6) Hasil evaluasi RPJMD Kota Magelang 2010-2015, ditemukan hal-hal yang masih harus dikejar dari penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 7) Visi misi Kepala Daerah Terpilih Kota Magelang Tahun 2016-2021, yang mengusung isu: peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial, pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja, dan perlunya peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama.

Kriteria yang digunakan untuk penentuan isu strategis yaitu: (i) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah; (iii) dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat; (iv) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; (v) Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani; dan (vi) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Setelah melakukan analisis isu, dilakukan proses pembobotan isu, dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat isu strategis sebagai berikut:

- 1) Penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja;
- 2) Peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 3) Penguatan reformasi birokrasi;
- 4) Peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat serta kondusivitas daerah;
- 5) Pengelolaan persampahan;
- 6) Peningkatan koperasi, usaha mikro dan perdagangan;
- 7) Penguatan daya saing dan kemandirian daerah;
- 8) Peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama;
- 9) Penerapan prinsip-prinsip kota cerdas;
- 10) Penguatan kemitraan dalam pembangunan daerah;
- 11) Peningkatan daya saing dan daya jual pariwisata;
- 12) Penguatan implementasi Branding Magelang Kota Sejuta Bunga;
- 13) Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah;



- 14) Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 15) Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
- 16) Peningkatan ketahanan pangan;
- 17) Keadilan gender dan perlindungan anak;
- 18) Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 19) Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.

Dari isu-isu strategis tersebut, dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) kelompok payung besar isu strategis Kota Magelang yaitu:

- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;
- 2) Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
- 3) Penguatan reformasi birokrasi;
- 4) Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;
- 5) Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 6) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;
- 7) Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
- 8) Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.



BAB II

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2016 merupakan tahun transisi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang, hal ini berkaitan dengan berakhirnya periode RPJMD 2010-2015 dan pergantian kepemimpinan daerah dengan dilantiknya Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2015 pada tanggal 17 Februari 2016. Momentum pelantikan Kepala Daerah selanjutnya diikuti dengan penerjemahan Visi Misi Kepala Daerah terpilih, ke dalam dokumen perencanaan daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa selambat-lambatnya 6 bulan sejak dilantiknya Kepala Daerah, Pemerintah Daerah harus dapat menyajikan RPJMD Kepala Daerah terpilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2016 Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 ditetapkan dan mulai diacu dalam penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran dan pembangunan.

2.1. Rencana Strategis Pemerintah Kota Magelang

2.1.1. Visi

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan rumusan sebagai berikut:

“MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS”.

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

2.1.2. Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

a. Misi 1:

Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka

efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan Misi 1 tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur profesional dan berintegritas;
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi;
- 3) Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan;
- 4) Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran:

- 1) Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif;
- 3) Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik;
- 5) Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
- 6) Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 7) Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan;
- 8) Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 9) Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional.

b. Misi 2:

Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan Misi 2 tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia;
- 2) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environment;

Sasaran:

- 1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing;
- 2) Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah;
- 4) Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern;
- 5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- 6) Meningkatnya ruang terbuka hijau;
- 7) Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
- 8) Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang.

c. Misi 3:

Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan Misi 3 tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas;
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
- 3) Menurunkan pengangguran dan kemiskinan;
- 4) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat;
- 5) Meningkatkan kesetaraan gender.

Sasaran:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat;
- 2) Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
- 3) Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan;
- 4) Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- 5) Meningkatnya produktivitas daerah dan ekonomi kreatif;
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan;
- 7) Meningkatnya lapangan kerja;

- 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS;
- 9) Terkendalinya Laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan;
- 10) Menurunnya kesenjangan gender.

d. Misi 4:

Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Untuk mewujudkan Misi 4 tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah;
- 2) Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata.

Sasaran:

- 1) Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan;
- 2) Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial.

e. Misi 5:

Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Untuk mewujudkan Misi 5 tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religious;
- 2) Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman.

Sasaran:

- 1) Terbentuknya karakter religius dalam kehidupan bermasyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan;
- 2) Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat;
- 3) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan.

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran

RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dikerjakan terus menerus setiap tahun. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan layanan publik terus menerus ada dan dialokasikan anggaran. Hal ini didasari prinsip perencanaan strategik tehnokratis. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; (2) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kota Magelang pada akhir tahun perencanaan RPJMD 2016-2021 agar dapat memberikan arahan maka ditetapkan pentahapan melalui 6 tahapan. Keenam tahapan tersebut meliputi: Tema Tahun I: Konektif dan Kolaboratif bersama Mitra; Tema Tahun II: Kreatif dan Inovatif Bersama Mitra; Tema Tahun III: Produktif bersama Mitra; Tema tahun IV: Promotif dan Ekspansif bersama Mitra, Tema Tahun V: Kompetitif bersama Mitra, dan Tema Tahun VI adalah Akomodatif dan Transitif menuju lanjutan. Pada akhir tahun perencanaan, monumen tercapainya Visi Misi ditandai dengan Kota Magelang diharapkan akan menjadi kota yang “Ngrejekeni, Ngayomi, Ngayemi, Handarbeni, Marisi, dan Ngangeni”. Dari keseluruhan rangkaian program dan kegiatan diharapkan pada akhir RPJMD tahun 2021 Kota Magelang maju, modern, cerdas, masyarakat sejahtera, dan religius. Dengan demikian Kota Magelang menjadi yang ngrejekeni (nyaman untuk mencari nafkah hidup), ngayomi (masyarakat terlindungi), ngayemi (masyarakat merasa nyaman tenteram), handarbeni (masyarakat merasa memiliki dan mencintai Kota Magelang), marisi (masyarakat terbiasa hidup cinta lingkungan sehingga mewariskan bumi yang sehat selamat untuk anak cucunya), ngangeni (masyarakat yang diperantauan dan masyarakat luar daerah rindu untuk datang ke Kota Magelang). Indikator keberhasilannya secara tehnokratik sebagaimana dipaparkan dalam indikator sasaran daerah.

Arah kebijakan menjadi penghubung pengelompokkan arah pencapaian sasaran melalui prioritas pembangunan pada setiap tahapan tahun. Program unggulan Walikota terpilih sebagai janji politik tertuang dalam penjabaran visi dan misinya, direpresentasikan melalui rumusan program berikut: (i) Program pengembangan daya saing daerah berbasis potensi lokal; (ii) Program kota cerdas; (iii) Program peningkatan Kualitas sumber daya aparatur pemerintah; (iv) Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat,

berkelanjutan; (v) Program pemerintahan responsif dan partisipatif; (vi) Program kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (vii) Program perluasan peluang kerjasama dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (viii) Program penguatan pertumbuhan ekonomi; (ix) Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan; (x) Program pengembangan wilayah terpadu berkeadilan (inklusif) dan mengurangi kesenjangan wilayah; (xi) Program masyarakat religius menuju masyarakat madani.

Tema Pembangunan Tahun 2016 : Membangun Kolaborasi dan Konektivitas. Tema tahun 2016 adalah tema yang disusun sebagai dasar perencanaan yang dilakukan pada tahun 2016 untuk RKPD tahun 2017, karena Walikota terpilih dilantik pada bulan Pebruari 2016. Perencanaan tahap pertama mengambil tema: "Membangun Kolaborasi dan Konektivitas: antarpelaku pembangunan, antarsektor dan antar wilayah."

Tahap pertama diprioritaskan pada upaya penyiapan kerangka landasan untuk pencapaian visi misi RPJMD tahun 2016-2021:

- 1) membangun kerangka kerja kelembagaan (SOTK) Prioritas ini termasuk upaya menata organisasi perangkat daerah sesuai regulasi dan penempatan aparatur sesuai kompetensinya. Penyusunan tata kerja yang tepat tidak tumpang tindih dan memperhatikan alur sinergitas pada penanganan isu lintas bidang urusan pemerintahan.
- 2) kerangka regulasi Prioritas ini memuat upaya penyusunan roadmap kebutuhan regulasi selama 5 tahun ke depan sesuai dengan kebijakan yang harus disusun dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
- 3) kerangka kajian kemitraan Program ini untuk menyediakan roadmap rencana kerjasama kemitraan dengan pihak dunia usaha, media, dan masyarakat menuju kota Magelang maju, modern dan cerdas. Misi walikota terpilih hendak mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga pada tahap ini menjadi masa persiapan mendidik masyarakat punya kepedulian membentuk forum warga sebagai mitra pembangunan pemerintah. Kerangka kerja kemitraan dioptimalkan dengan peluang pemanfaatan teknologi informasi.
- 4) Kerangka kajian kebutuhan infrastruktur menyiapkan Magelang kota cerdas (smart city) dan modern. Prioritas ini untuk menyiapkan perangkat dasar pengembangan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Infrastruktur yang mendukung perwujudan Magelang kota jasa modern dan maju juga mulai disiapkan kajian kebutuhannya.
- 5) Penyiapan basis data terpadu untuk sistem pengukuran kinerja Prioritas ini untuk menyiapkan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah supaya pemanfaatan sumber daya daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan benar kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan

6) Penyelenggaraan layanan wajib dasar sesuai standar pelayanan minimal

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

- 1) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya
- 2) Penataan organisai perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur
- 3) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat
- 4) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi
- 5) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi
- 6) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
- 7) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, pertisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota
- 8) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat
- 9) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan
- 10) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan
- 11) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
- 12) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS

Prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan perencanaan tahun 2016 adalah:

- 1) Fungsi penunjang urusan pemerintahan;
- 2) Urusan pendidikan;
- 3) Urusan kesehatan;
- 4) Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 5) Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 6) Urusan sosial;
- 7) Urusan komunikasi dan informatika;
- 8) Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;

Program unggulan sebagai prioritas pada perencanaan tahun 2016 adalah:

- 1) Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
- 2) Program peningkatan daya saing daerah;
- 3) Program kota cerdas;
- 4) Program pemerintahan responsif dan partisipasif;

- 5) Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
- 6) Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan.

2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan komitmen pimpinan untuk mewujudkan kinerja yang disepakati dan terukur dalam kurun waktu tertentu, tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, diantaranya adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016 mengalami revisi karena adanya perubahan dokumen RPJMD 2016-2021, dengan ikhtisar sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja 2016
MISI 1				
1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1	Persentase pegawai berkinerja baik	98%
		2	Capaian SPM Kota Magelang	50%
		3	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	45%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	1	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP
		2	Indeks EKPPD	2,95
		3	Hasil implementasi SAKIP	CC (53,00)
		4	Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%
3	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	1	Persentase PD menerapkan e-Gov	60%



	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja 2016		
4	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	1	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPd, Renstra, Renja	88%		
		2	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%		
5	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1	Derajat Otonomi Fiskal	21,40%		
		2	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	80,27%		
6	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	55%		
		2	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	51,72		
7	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%		
8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	1	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	6		
			a. Regional	4		
			b. Nasional	2		
		2	Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	17		
			a. Regional	10		
			b. Nasional	5		
			c. International	2		
MISI 2 1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1	Rata-rata lama sekolah	10,36		
		2	Persentase sekolah berstandar nasional			
			a. SD	35,66%		
		b. SMP	65%			
		3	Angka Melek Huruf	97,35%		
		4	Persentase kunjungan perpustakaan	70,95%		
			Jumlah kunjungan perpustakaan	94.110		
		2	Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	5 bh (15%)
				2	Angka Harapan Hidup	76,67
				3	AKI/ 1.000 KH	135
4	AKB/ 1.000 KH			15		
5	AKABA			0,16		
6	Prevalensi Balita Gizi Buruk			0,31		
7	Angka Kesakitan DBD			<50		
8	Angka Prevalensi Kasus TB			<106		
9	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun			<0,05%		
10	Rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat			96%		



	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja 2016
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Pencemaran Air	75,6
		2	Indeks Pencemaran Udara	50,11
		3	Indeks Tutupan Vegetasi	48,29
		4	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	160,58
4	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	
			a. Privat	10%
			b. Publik	18,37%
5	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	1	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	3,98%
6	Pemanfaatan lahanber kelanjutan sesuai regulasi tata ruang	1	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	23%
MISI 3				
1	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat		Presentasi penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,50%
2	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	1	Tercapainya 100 - 0 -100	
			a. Persentase jumlah KK yang terlayani air minum	87,30%
			b. Rasio Luas kawasan kumuh	69,50 Ha
			c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	6%
		2	Prosentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	3,70%
3	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	1	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	8%
4	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1	Pertumbuhan investasi	
			a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	5%
			b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%
5	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	1	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	75%
		2	Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	27%
6	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	12.780
7	Meningkatnya lapangan kerja	1	Persentase penyerapan tenaga kerja	60%
8	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	1	Persentase Penurunan PMKS	14%
9	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2
10	Menurunnya kesenjangan gender	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	15%
		2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	17%



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja 2016
		3 Rasio KDRT	0,65%
MISI 4			
1	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	1 Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13,50%
2	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	1 Jumlah Wisatawan	
		a. Nusantara	1.134.846
		b. Mancanegara	5.178
MISI 5			
1	Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	1 Prosentase penurunan penyakit masyarakat	3%
2	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1 Angka kriminalitas	13,64
		2 Prosentase penurunan kasus narkoba	3%
		3 Angka kriminalitas yang tertangani	11,5
		4 Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100%
3	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	3



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pemerintah Kota Magelang selaku pengemban amanah masyarakat Kota Magelang melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang, yang disusun berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui pelaporan kinerja diharapkan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat dijadikan sebagai alat monitoring, evaluasi dan pengendalian untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan gambaran dalam penilaian kinerja pemerintah, digunakan skala penilaian berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016, tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Capaian 2015	TAHUN 2016			Target Akhir RPJMD 2021	Kriteria
					Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	1	Persentase pegawai berkinerja baik	96%	98%	98,06%	100,06%	98%	Sangat Tinggi
		2	Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	50%	65%	130,00%	100%	Sangat Tinggi
		3	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	45%	45%	100,00%	72%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	4	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP*	---	WTP	NA
		5	Indeks EKPPD	2,92	2,95	3,056	103,59%	3,14	Sangat Tinggi
		6	Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (53,00)	CC (55,78)	100,00%	B (60,00)	Sangat Tinggi
		7	Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100,00%	100%	Sangat Tinggi
3	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	8	Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	60%	100%	166,67%	100%	Sangat Tinggi
4	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	9	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	85%	88%	89%	101,14%	100%	Sangat Tinggi
		10	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	100%	166,67%	100%	Sangat Tinggi
5	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	11	Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	26,75%	125,00%	35,62%	Sangat Tinggi
		12	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	83,60%	80,27%	65,60%	118,28%	63,65%	Sangat Tinggi



No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Capaian 2015	TAHUN 2016			Target Akhir RPJMD 2021	Kriteria
					Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
6	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	13	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	55%	56%	101,82%	70%	Sangat Tinggi
		14	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83%	51,72%	55,17%	106,67%	89,96%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	15	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	45%	45,04%	100,09%	50%	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	16	a. Jml Prestasi Pemuda/Organisasi Pemuda di kancah Regional	4	4	6	150,00%	6	Sangat Tinggi
		17	b. Jml Prestasi Pemuda/Organisasi Pemuda di kancah Nasional	1	2	0	0,00%	2	Sangat Rendah
		18	a. Jumlah prestasi Olahraga di tingkat Regional	8	10	10	100,00%	11	Sangat Tinggi
		19	b. Jumlah prestasi Olahraga di tingkat Nasional	4	5	5	100,00%	6	Sangat Tinggi
		20	c. Jumlah prestasi Olahraga di tingkat International	2	2	2	100,00%	3	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	21	Rata-rata lama sekolah	10,32	10,36	10,28	99,23%	10,59	Sangat Tinggi
		22	a. % SBN SD	30,66%	35,66%	98,66%	276,67%	60,66%	Sangat Tinggi
		23	b. %SBN SMP	60%	65%	90,00%	138,46%	90%	Sangat Tinggi
		24	Angka Melek Huruf	97,00%	97,35%	97,67%	100,33%	98,95%	Sangat Tinggi
		25	Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	70,95%	80,65%	113,67%	78,63%	Sangat Tinggi
		26	Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	94.110	106.674	113,35%	104.305	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	27	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	3 bh (23%)	5 bh (15%)	15,38%	102,53%	13 bh (100%)	Sangat Tinggi
		28	Angka Harapan Hidup	76,58	76,67	76,58	99,88%	76,94	Sangat Tinggi



No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Capaian 2015	TAHUN 2016			Target Akhir RPJMD 2021	Kriteria
					Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
		29	AKI/ 1.000 KH	187,5	135	0	200,00%	70	Sangat Tinggi
		30	AKB/ 1.000 KH	15,63	15	10,66	128,93%	12,5	Sangat Tinggi
		31	AKABA	0,63	0,16	0,1266	120,88%	0,135	Sangat Tinggi
		32	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,22	129,03%	0,31	Sangat Tinggi
		33	Angka Kesakitan DBD	130,93	<50	65,58	68,84%	<50	Sedang
		34	Angka Prevalensi Kasus TB	128,33	<106	119,85	86,93%	<101	Tinggi
		35	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,05%	0,02%	196,00%	<0,05%	Sangat Tinggi
		36	Rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	96%	96%	97,25%	101,30%	98%	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	37	Indeks Pencemaran Air	68,9	75,6	36,25	47,95%	76,84	Sangat Rendah
		38	Indeks Pencemaran Udara	45,3	50,11	58,24	116,22%	79,1	Sangat Tinggi
		39	Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,29	54,03	111,89%	49,56	Sangat Tinggi
		40	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	160,58	160,58	240,4	50,29%	136,17	Rendah
12	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	41	a. % RTH Privat	10%	10%	19,11%	191,10%	10%	Sangat Tinggi
		42	b. % RTH Publik	18,37%	18,37%	19,61%	106,75%	18,50%	Sangat Tinggi
13	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	43	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	3,98%	3,09%	77,64%	17,48%	Tinggi
14	Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	44	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	23%	23,84%	103,65%	33%	Sangat Tinggi
15	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	45	Presentase penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12,50%	12,80%	102,40%	10%	Sangat Tinggi
16	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok	46	a. Persentase jumlah KK yang terlayani air minum	82,30%	87,30%	85,24%	97,64%	100,00%	Sangat Tinggi
		47	b. Rasio Luas kawasan kumuh	121,27 Ha	69,5	96,87	60,62%	0 Ha	Rendah



No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Capaian 2015	TAHUN 2016			Target Akhir RPJMD 2021	Kriteria
					Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
	pendapatan	48	c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	7%	6%	7%	83,33%	0,00%	Tinggi
		49	Prosentase RTLH	4,40%	3,70%	4,20%	86,49%	0,00%	Tinggi
17	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	50	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8	8	100,00%	9,25	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	51	a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	0%	0,00%	15%	Sangat Rendah
		52	b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	20,42%	136,13%	15%	Sangat Tinggi
19	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	53	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	100,00%	80%	Sangat Tinggi
		54	Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	27%	31%	114,81%	32%	Sangat Tinggi
20	Meningkatnya ketahanan pangan	55	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	12.729	12.780	13.501	105,64%	13.037	Sangat Tinggi
21	Meningkatnya lapangan kerja	56	Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	60%	90,84%	151,40%	70%	Sangat Tinggi
22	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	57	Persentase Penurunan PMKS	14%	14%	2%	14,29%	19%	Sangat Rendah
23	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	58	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	100,00%	2 anak	Sangat Tinggi
24	Menurunnya kesenjangan gender	59	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	15%	11,05%	73,67%	30%	Sedang
		60	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	17%	13,94%	82,00%	35%	Tinggi
		61	Rasio KDRT	0,07%	0,07%	0,07%	100,00%	0,04%	Sangat Tinggi
25	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	62	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13,00%	13,50%	15,00%	111,11%	16,00%	Sangat Tinggi

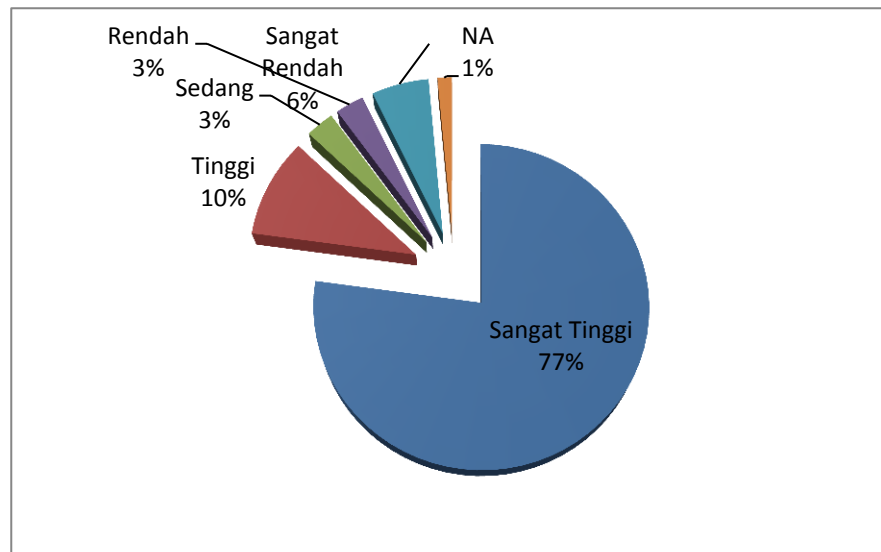
No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Capaian 2015	TAHUN 2016			Target Akhir RPJMD 2021	Kriteria
					Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
26	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	63	a. Jumlah Wisatawan Nusantara	1.133.373	1.134.846	1.139.585	100,42%	1.143.954	Sangat Tinggi
		64	b. Jumlah Wisatawan Mancanegara	5.171	5.178	6.793	131,19%	5.219	Sangat Tinggi
27	Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	65	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	100,00%	3%	Sangat Tinggi
28	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	66	Angka kriminalitas	14,14%	13,64%	14,02%	97,21%	11,14%	Sangat Tinggi
		67	Prosentase penurunan kasus narkoba	-13,04%	3%	3%	100,00%	3%	Sangat Tinggi
		68	Angka kriminalitas yang tertangani	11,08%	11,50%	9,89%	86,00%	12,50%	Tinggi
		79	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100,00%	100%	Sangat Tinggi
29	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	70	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56	3	2,54	84,67%	3	Tinggi

Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan data sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 tersebut di atas, Indikator Kinerja Sasaran yang diukur pada tahun 2016 sejumlah 61 indikator (di dalamnya terdapat 7 Indikator Sasaran, yang dijabarkan dalam 16 Sub Indikator sehingga total menjadi 70 indikator), dengan hasil sebagai berikut:

- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sangat tinggi sejumlah 54 indikator atau 77,14%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria tinggi sejumlah 7 indikator atau 10,00%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sedang sejumlah 2 indikator atau 2,86%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria rendah sejumlah 2 indikator atau 2,86%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sangat rendah sejumlah 4 indikator atau 5,71%.
- Data belum dapat tersaji untuk 1 indikator atau 1,43% yaitu nilai opini BPK atas LKPD 2016.

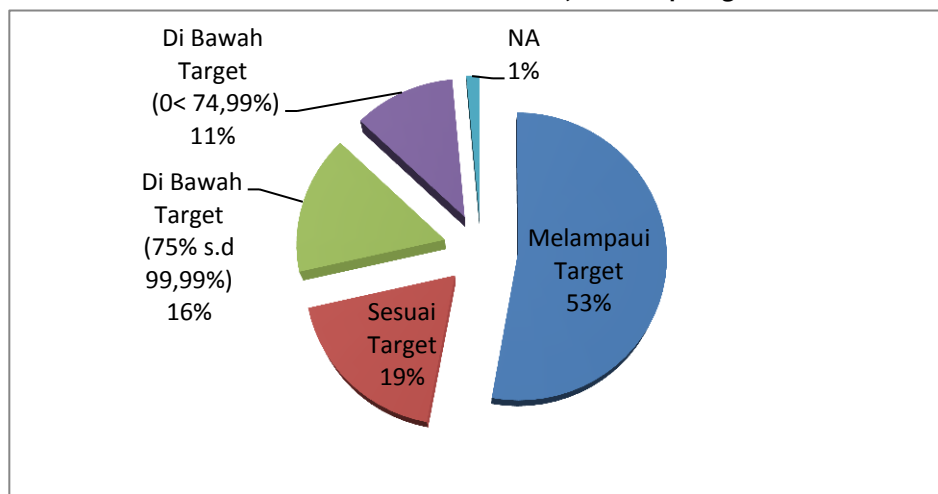
Gambar 3.1
Grafik Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2016



Selanjutnya apabila data dipilah berdasarkan tingkat ketercapaian realisasi indikator kinerja terhadap target kinerja maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja di atas 100% (**melampaui target**) sejumlah 37 indikator atau 52,86%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja 100% (**sesuai target**) sejumlah 13 indikator atau 18,57 %.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja **di bawah target** dengan rentang antara **75% s/d 99,99%** sejumlah 11 indikator atau 15,71 %.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja **di bawah target** dengan rentang antara **0% s/d 74,99%** sejumlah 8 indikator atau 11,43 %.
- Data belum dapat tersaji sejumlah 1 indikator atau 1,43% , yaitu nilai opini BPK atas LKPD 2016.

Gambar 3.2
Grafik Realisasi Indikator kinerja terhadap Target



3.2. Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Pada Sub Bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis, sebagai berikut:

MISI 1

1. Sasaran Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Yang Profesional dan Organisasi Perangkat Daerah Yang Efektif Dilengkapi dengan Norma Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Yang Profesional dan Organisasi Perangkat Daerah Yang Efektif Dilengkapi dengan Norma Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentase pegawai berkinerja baik	96%	98%	98,06%	100,06%	98%
2	Capaian SPM Kota Magelang	89,09%	50%	66,67%	133,34%	100%
3	Persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar	43%	45%	45%	100%	72%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					111,34%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 3 indikator sasaran, 2 indikator melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2016, yaitu persentase pegawai berkinerja baik dan capaian SPM Kota Magelang dan 1 indikator sesuai target. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2016 sebesar 110,02%.

Capaian Indikator Persentase Pegawai Berkinerja Baik

Hasil realisasi indikator sasaran persentase pegawai berkinerja baik tahun 2016 sebesar 98,06 % lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 98%, sehingga menunjukkan capaian kinerja 100,06%. Kemudian apabila realisasi kinerja 2016 dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 96% maka kinerja tahun 2016 meningkat 2,06 point.

Pencapaian indikator sasaran tersebut didukung oleh berbagai capaian indikator program pada tahun 2016 yaitu antara lain:

a. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kualifikasi S1/S2.

Capaian kinerja persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 adalah 49% melebihi target yang ditetapkan 45% dan ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 mencapai kinerja 9,5% melebihi target yang telah ditetapkan yakni 8%.



- b. Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat yang diselenggarakan BKD.
Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat yang diselenggarakan BKD telah mencapai kinerja sangat baik yakni 101% melebihi dari target 100%.
- c. Persentase kehadiran ASN.
Capaian kinerja untuk persentase kehadiran ASN sebesar 96,8% melebihi target 96%. Hal ini menunjukkan kehadiran ASN berkategori sangat baik. Data kehadiran PNS didapatkan dari laporan setiap bulan oleh masing-masing OPD kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berupa hasil mesin absensi *fingerprnt* dan dikombinasikan dengan absensi manual, sehingga diharapkan pendataan absensi lebih akurat, karena ASN tidak dapat menipis absen.
- d. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan mencapai kinerja 85,9% yang terdiri dari :
- Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dengan capaian kinerja 100%.
 - Pendidikan dan pelatihan pengembangan karakter dengan capaian kinerja 96,61% melebihi target 95%.
 - Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dengan capaian kinerja 69% belum mencapai target kinerja 75% karena adanya pertimbangan waktu pelaksanaan diklat sehingga terdapat 7 orang yang sedianya dikirim pada tahun 2016 disesuaikan melalui Anggaran Perubahan untuk dilaksanakan Tahun 2017.
 - Pendidikan dan pelatihan teknis dengan capaian kinerja 84,26% tidak mencapai target kinerja 93% dikarenakan terdapat beberapa pelatihan yang ditunda.
 - Pendidikan dan pelatihan fungsional mencapai kinerja 78,94% tidak mencapai target kinerja 80% dikarenakan terbatasnya kuota diklat instansi pembina dan menurunnya penawaran diklat dari penyelenggara.
- e. Persentase pelanggaran disiplin.
Capaian kinerja sebesar 0,33% sehingga dapat dikatakan bahwa persentase yang tidak melanggar disiplin PNS sebesar 99,67%. Diharapkan aparatur yang melanggar disiplin semakin lama semakin berkurang setiap tahunnya.
- f. Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi.
Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi mencapai kinerja 90% dimana kompetensi aparatur saat ini diukur dari kesesuaian latar belakang pendidikan dengan syarat jabatan yang ada dalam analisis jabatan.

Tercapainya target kinerja bukan berarti tanpa ada hambatan/kendala diantaranya adalah keterbatasan penyelenggaraan Diklat Fungsional oleh Instansi Pembina, serta belum tersedianya sarana gedung yang memenuhi standar untuk menyelenggarakan assesment dan diklat. Adapun upaya untuk mengatasinya / solusi berupa:

1. Koordinasi dengan instansi pembina dan lembaga diklat lainnya.
2. Penyelenggaraan assesment center bekerjasama dengan provinsi maupun lembaga/instansi yang telah memiliki assesment center.

3. Penyelenggaraan diklat dengan memanfaatkan gedung milik Pemda, maupun bekerjasama dengan pihak swasta penyedia jasa gedung pertemuan maupun hotel di Kota Magelang.

Capaian Indikator Capaian SPM Kota Magelang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal serta diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam penyelenggaraan urusan wajib yang diberlakukan untuk semua pemerintah daerah.

Dengan telah ditetapkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) dan (3) bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dikarenakan petunjuk pelaksanaan SPM belum terbit, untuk capaian indikator SPM masih mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ayat (4) Pasal 11 dan Pasal 14 mengamanatkan bahwa pelaksanaan urusan wajib yang menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat harus mengacu pada SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non- Kementerian (LPNK). Terdapat 15 (lima belas) bidang SPM yang diterbitkan oleh Kementerian/LPNK. Dalam SPM memuat mengenai jenis pelayanan dasar, indikator, target dan realisasi pencapaian SPM. Namun demikian tidak semua bidang SPM dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengingat kondisi wilayah setiap daerah berbeda-beda. Untuk Pemerintah Kota Magelang karena wilayahnya hanya berupa daratan maka ada 4 (empat) jenis pelayanan dasar SPM bidang Perhubungan yang tidak dilaksanakan, yaitu: angkutan sungai, danau angkutan penyeberangan dan angkutan laut.

Sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan dan pencapaian SPM, masing-masing SKPD pengampu SPM menyusun laporan per semester dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kota Magelang untuk kemudian disampaikan pada Provinsi Jawa Tengah. Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal s/d semester II tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.3
Pencapaian Indikator 15 Bidang SPM
s/d Semester II 2016

No.	Bidang SPM	Jumlah Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Terukur
1.	Perumahan Rakyat	3	3	0	---
2.	Pemerintahan Dalam Negeri	11	6	5	---
3.	Bidang Sosial	7	---	---	7
4.	Bidang Kesehatan	22	20	2	---

No.	Bidang SPM	Jumlah Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Terukur
5.	Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	8	8	---	---
6.	Bidang Lingkungan Hidup	5	4	1	---
7.	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	9	---	---	9
8.	Bidang Ketengakerjaan	7	4	2	1
9.	Bidang Pendidikan Dasar	30	26	3	1
10.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	9	2	8
11.	Bidang Ketahanan Pangan	6	6	---	---
12.	Bidang Kesenian	7	6	1	---
13.	Bidang Komunikasi dan Informatika	6	2	2	2
14.	Bidang Perhubungan (26 urusan-15 urusan tidak ada potensi di Kota Magelang)	11	7	---	4
15.	Bidang Penanaman Modal	11	7	---	4
TOTAL		162	108	18	36
% Realisasi Kinerja Terhadap Jumlah Indikator			66,67%	11,11%	22,22%

Sumber data : Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Semester II Tahun 2016

Realisasi kinerja untuk indikator capaian SPM Kota Magelang sebesar 66,67% dari target yang ditetapkan sebesar 50,00% dengan capaian kinerja sebesar 133,34%.

Capaian Indikator Persentase Pengelolaan Kearsipan dan Persandian Sesuai Standar

Pada Tahun 2016 nilai capaian indikator kinerja sasaran persentase pengelolaan kearsipan dan persandian sesuai standar sebesar 45%, tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah meliputi kegiatan pendataan dan penataan dokumen pada depo arsip sebanyak 150 dos serta pelaksanaan akuisisi arsip dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sejumlah 150 dos dan 36 foto dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2015 yang sebesar 43%, maka tahun ini ada peningkatan sebesar 2%.

Permasalahan yang ada berkaitan dengan bidang kearsipan diantaranya:

1. Pengadaan sarana prasarana berupa pembangunan gedung depo arsip yang representative belum terwujud dikarenakan pada tahun 2016 proses pengadaan gedung depo arsip mengalami gagal lelang dan rencana pembangunannya akan dilaksanakan kembali pada Tahun 2017.
2. Masih terbatasnya tenaga fungsional arsiparis.
3. Belum adanya SDM di bidang teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kearsipan secara digital.

Solusi untuk mengatasi permasalahan:

1. Dengan belum tersedianya gedung depo arsip yang memadai, maka untuk sementara arsip masih berada pada masing-masing SKPD sedangkan untuk pembinaan kearsipan dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke SKPD-SKPD berkaitan dengan pengelolaan arsip.

2. Untuk mengatasi permasalahan belum adanya tenaga fungsional arsiparis dengan cara mengikutsertakan atau mengirim pegawai guna mengikuti bintek pengelolaan kearsipan baik di tingkat provinsi maupun pusat.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di bidang teknologi informasi dalam pelaksanaan system kearsipan secara digital.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 5.449.440.000,00 dari anggaran sebesar Rp 4.498.146.449,00 atau 82,54% dari target. Realisasi keuangan sebesar 82,54% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 111,34 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan serta Penegakan Hukum dan HAM Tanpa Diskriminasi

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3-4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan serta Penegakan Hukum dan HAM Tanpa Diskriminasi

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP*	---	WTP
2	Indeks EKPPD	2,92	2,95	3,056	103,59%	3,14
3	Hasil implementasi SAKIP	CC	CC (53,00)	CC (55,78)	100%	B (60,00)
4	Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					101,20%	

Ket. WDP* hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2016 belum diketahui karena masih dalam pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 4 indikator sasaran, realisasi 2 indikator sesuai target, 1 indikator melampaui target, yaitu indeks EKPPD dan 1 indikator data belum rilis, yaitu Nilai Opini BPK atas LKPD. Adapun rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2016 sebesar 101,20%.

Capaian Indikator Nilai Opini BPK atas LKPD

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan guna menilai akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan oleh BPK dilakukan secara periodik setiap tahunnya, yang mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 adalah opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Beberapa hal yang masih menjadi masalah terkait pengelolaan asset daerah, antara lain :

1. Aset tetap tanah yakni masih terjadi pencatatan ganda antara dua SKPD, terdapat tanah yang tercatat di neraca namun belum didukung dengan dokumen pembelian tanah.
2. Aset tetap peralatan dan mesin yakni pada Dinas Pendidikan diragukan kewajaran penyajiannya karena perbedaan nilai antara lembar muka Neraca dengan penjumlahan rincian aset tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing sekolah.
3. Aset tetap bangunan dan gedung masih tercatat secara gabungan dengan jenis aset tetap yang lain dan penyajiannya belum dicatat secara terinci, terdapat kapitalisasi aset tetap bangunan dan gedung berupa pekerjaan rehabilitasi bangunan namun dicatat sebagai aset tetap tersendiri dan belum diketahui aset tetap utama yang direhabilitasi.

Adapun untuk hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2016 belum diketahui hasilnya karena masih dalam pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Aspek pengendalian internal juga menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang bersih. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Salah satu faktor untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi oleh kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu dan melakukan tugas pengawasan serta pembinaan agar melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Dalam hal ini maka APIP telah melaksanakan pembinaan terhadap obyek pemeriksaan melalui pengawasan internal sampai dengan tahun 2016 yang telah terealisasi pembinaan sebanyak 86 obyek pemeriksaan dari target sebanyak 95 obyek pemeriksaan, dikarenakan adanya pemeriksaan penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah dan penambahan pemeriksaan khusus sebanyak 23 kasus/khusus sehingga melebihi dari target 18 kasus/khusus. Pelaksanaan kegiatan *quality assurance* telah dilaksanakan oleh APIP dalam bentuk laporan setiap bulan dan dirangkum dalam laporan semesteran.

Data temuan hasil rekomendasi pemeriksaan APIP dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2016 yakni :

1. Inspektorat Kota Magelang dengan jumlah rekomendasi 618 dan telah ditindaklanjuti semua.
2. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah rekomendasi 57 dan telah ditindaklanjuti semua.



3. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah rekomendasi 58 dan telah ditindaklanjuti sejumlah 26.

Adapun untuk data temuan hasil rekomendasi pemeriksaan APIP dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun sebelumnya/pending sampai tahun 2016 yakni jumlah hasil rekomendasi 646 dan telah ditindaklanjuti sejumlah 545.

Permasalahan :

1. Aset yang belum tertib;
2. Tindak lanjut rekomendasi yang belum mencapai target 100%.

Solusi:

1. Telah dilaksanakan rekonsiliasi antara Inspektorat, BPKAD dan SKPD terkait terhadap aset yang bermasalah agar dapat diindaklanjuti dan dilengkapi dengan bukti memadai yang akan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2016
2. Meningkatkan intensitas koordinasi percepatan TLHP

Capaian Indikator Indeks EKPPD

Realisasi kinerja pada tahun 2016 sebesar 3,056 dari target yang ditetapkan sebesar 2,95 artinya melampaui target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 103,59%. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dilihat berdasarkan evaluasi penyelenggaraan kinerja pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah daerah atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada **tahun 2016** Pemerintah Kota Magelang memperoleh nilai **3,056** kategori **kinerja Sangat Tinggi, meningkat** apabila dibandingkan capaian kinerja pada **tahun 2015** yang sebesar **2,92** dengan **kategori Tinggi** dengan peningkatan sebesar **0,136 point**.

Peningkatan capaian kinerja indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah ini diperoleh atas peningkatan capaian kinerja atas pelaksanaan urusan pemerintahan, namun demikian masih terdapat pula beberapa indikator pada urusan pemerintahan yang capaian kinerja masih perlu untuk terus ditingkatkan mengingat capaian yang rendah akan berpengaruh terhadap hasil evaluasi secara keseluruhan.

Capaian Indikator Hasil Implementasi SAKIP

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas dengan berpedoman Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan;

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang mendapatkan nilai **55,78** atau dengan predikat penilaian “**CC**” atau **cukup**, berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor: B/368/AA.05/2017 tanggal 31 Januari 2017. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 hasil penilaian sebesar **52,42** dengan predikat penilaian “**CC**” atau **cukup** maka perolehan tahun 2016 meningkat sebesar **3,36 poin**. Tren perolehan nilai hasil evaluasi akuntabilitas selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tren Perolehan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Magelang

Tahun	Nilai Hasil Evaluasi		Perkembangan Nilai	
	Huruf	Angka	Desimal	%
2013	C	45,97	---	---
2014	CC	50,13	4,16	0,09
2015	CC	52,42	2,29	0,05
2016	CC	55,78	3,36	0,06

Perkembangan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Magelang sesungguhnya sudah pada arah yang baik, hal ini nampak dari tren hasil penilaian dari tahun 2013 s/d 2016 selalu menunjukkan peningkatan. Namun demikian peningkatannya belum signifikan dan masih memerlukan upaya yang lebih keras dan berkesinambungan guna mewujudkan target di akhir RPJMD nilai hasil evaluasi SAKIP dengan kriteria **Baik**.

Beberapa permasalahan dalam implementasi SAKIP di lingkup Kota Magelang antara lain:

1. Pada periode RPJMD 2010-2015 jumlah sasaran dan indikator sasaran sangat banyak yaitu 105 sasaran dan 371 indikator sasaran, sehingga kurang fokus serta berpotensi menyulitkan dalam pemantauan dan pengendalian, disamping itu korelasi antara sasaran dan indikatornya cenderung bias.
2. Sumber Daya Manusia pengelola SAKIP di lingkup OPD pada umumnya adalah pengelola program dan keuangan, pada saat siklus SAKIP pada awal tahun sering kali berbarengan dengan siklus pekerjaan rutin lainnya dalam pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan lainnya diluar SAKIP. Substansi pertanggungjawaban dan pelaporan hampir sama tetapi format berbeda-beda sehingga menyebabkan beban tugasnya menjadi berlebihan sehingga seringkali berdampak pada penyusunan dokumen-dokumen akuntabilitas menjadi kurang optimal.
5. Pemerintah Kota Magelang belum memiliki sistim informasi guna menunjang penerapan SAKIP (e-SAKIP). Pada umumnya Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah mengimplementasikan SAKIP dengan baik selaku *best practise* SAKIP telah menerapkan sistim informasi SAKIP (e-SAKIP) yang terintegrasi dengan sistim informasi perencanaan dan keuangan (*e-performance based budgetting*) sehingga pengelolaan menjadi semakin efisien dan efektif.

Adapun upaya-upaya solusi yang telah dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Telah dilaksanakan penetapan RPJMD Tahun 2016-2021 yang secara substansi telah berupaya mengakomodir hasil evaluasi SAKIP pada tahun-tahun sebelumnya, diantaranya adalah sudah termuat indikator tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD yang berorientasi outcome.
2. Indikator kinerja sasaran telah dilengkapi dengan definisi operasional untuk memberikan kejelasan dalam pengukuran kinerja.
3. Jumlah sasaran dan indikator kinerja sasaran yang termuat dalam dokumen RPJMD 2016-2021 (5 Misi, 33 Sasaran dan 70 Indikator Kinerja) mengalami rasionalisasi dari periode RPJMD 2010-2015 (6 Misi, 105 Sasaran dan 371 Indikator Kinerja).
4. Telah dilakukan monitoring secara berkala terkait pencapaian indikator kinerja RPJMD, sehingga sasaran RPJMD akan dapat terpantau realisasinya, sekaligus menjadi umpan balik dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
5. Untuk meningkatkan kompetensi SDM dan pemahaman di tingkat organisasi perangkat daerah telah dilaksanakan bimbingan teknis dan asisitensi dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB, BPKP Perwakilan Provinsi DIY, maupun akademisi dari Universitas Sebelas Maret.
6. Upaya untuk penerapan SAKIP yang baik di Pemerintah Kota harus dikerjakan secara kolektif dan sinergis oleh seluruh komponen birokrasi Pemerintah Kota Magelang. Sekretariat Daerah selaku koordinator implementasi SAKIP, Bappeda dari sisi perencanaan, BPKAD dari sisi pengelolaan keuangan, dan Inspektorat sebagai evaluator atas implementasi SAKIP yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Disamping itu sangat diperlukan dukungan dari organisasi perangkat daerah selaku entitas akuntabilitas agar senantiasa konsisten dalam penerapan SAKIP di lingkup masing-masing, agar budaya kinerja dapat terwujud.

Capaian Indikator Persentase Penyusunan Produk Hukum yang Difasilitasi

Capaian indikator kinerja prosentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi pada tahun 2016 yang diampu oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi tersusunnya produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum terdiri dari Peraturan Daerah Kota Magelang sebanyak 14 Perda, Peraturan Walikota Magelang sebanyak 69 Perwal dan Surat Keputusan Walikota Magelang sebanyak 856 SK. Apabila realisasi kinerja 2016 dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 100%, dapat dikatakan bahwa kinerja dapat dipertahankan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.747.797.052,00 dari anggaran sebesar Rp 3.280.519.000,00 atau 83,76% dari target. Realisasi keuangan sebesar 83,76% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 101,2 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

3. Sasaran Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Mendukung Layanan Smart City dalam Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Teknologi Informasi secara sederhana adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Melalui optimalisasi teknologi informasi diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Mendukung Layanan Smart City dalam Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentase PD menerapkan e-Gov	NA	60%	100%	166,67%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					166,67%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja sebesar 100% telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sasaran pada tahun 2016 sebesar 166,67%.

Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah Menerapkan e-Gov

Secara umum, E-Government didefinisikan sebagai Pemerintah elektronik, yaitu penggunaan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warga negaranya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administratif publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.

Ada beberapa model pelayanan E-Government yaitu model penyampaian yang utama adalah government to citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B), serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari E-Government adalah Peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Pemanfaatan e-gov oleh Pemerintah Kota Magelang termasuk yang diukur dalam indikator ini antara lain dalam hal G2G, yaitu pemanfaatan sistem informasi yang dilakukan oleh SKPD terhadap pemerintah Kota Magelang. Terdapat beberapa sistem informasi yang telah dimanfaatkan oleh semua SKPD di Kota Magelang yaitu Sistem Informasi Manajemen

Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), serta pemanfaatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bagi setiap SKPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa sehingga capaian indikator ini pada 2016 tercapai sebesar 100%.

Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah $100\% / 60\% \times 100\% = 166,67\%$, dan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian pengukuran capaian indikator ini dapat dipertajam lagi mengingat dengan perhitungan di atas, target capaian e-gov pada tahun pertama menjadi sangat tinggi, sehingga kriteria pengukuran dapat dinaikkan standarnya dan dapat diketahui proses perkembangan dalam pencapaiannya.

Mengingat perkembangan sistem informasi sangat dinamis **upaya** yang senantiasa terus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi jenis layanan merunut pada layanan *e-government*, model penyampaian dapat berupa *government to citizen* atau *Government-to-Customer (G2C)*, *Government-to-Business (G2B)*, serta *Government-to-Government (G2G)*. Sehingga perkembangannya sistem informasi akan dapat dikendalikan dan terintegrasi.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.067.292.655,00 dari anggaran sebesar Rp 2.362.644.000,00 atau 87,50% dari target. Realisasi keuangan sebesar 87,50% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 166,67%, maka belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

4. Sasaran Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel

Salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah dimulai dari aspek perencanaan. Secara teoritis, perencanaan yang baik telah memberikan kontribusi mendekati kisaran 50%. Dapat dikatakan bahwa apabila daerah gagal merencanakan dengan baik pembangunan daerahnya maka hampir kita sedang merencanakan kegagalan pembangunan itu sendiri.

Dalam pendekatan perencanaan pembangunan daerah, dikenal beberapa pendekatan proses perencanaan antara lain pendekatan partisipatif mendampingi beberapa pendekatan yang lain yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan top down/bottom up serta pendekatan politis.

Pendekatan partisipatif memiliki proporsi strategis mengingat bahwa peran partisipasi masyarakat sangat menentukan. Semakin kritis dan partisipatif masyarakat kota terlibat dalam perencanaan mengindikasikan semakin baik pembangunan. Hal ini juga harus dibarengi dengan ketersediaan data yang akurat dan akuntabel agar pengambilan keputusan perencanaan dan kebijakan daerah akan berjalan dengan baik dan berkualitas.

Beberapa indikator target dan realisasi sasaran strategis Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel tampak sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPd, Renstra, Renja	85%	88%	89%	101,14%	100%
2	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	93,50%	155,83%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					128,48%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2016. Adapun rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2016 sebesar 128,48%.

Capaian Indikator Persentasi Capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPd, Renstra, Renja

Dilihat dari indikator kinerja sasaran Persentase capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPd, Renstra dan Renja menunjukkan capaian yang cukup baik. Pada tahun 2015 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah mencapai 85%, kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 89% dari target 88 % yang ditetapkan pada tahun 2016. Semakin baik pencapaian sasaran ini maka akan memberikan daya ungkit yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran di atas adalah melalui Peningkatan kualitas pelayanan berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi. Sedangkan kebijakan umum yang diusung adalah Perluasan inovasi proses perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu di tingkat program dilakukan melalui beberapa program antara lain :

1. Program perencanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator Tingkat konsistensi Penjabaran program RPJMD ke RKPd; Persentase Pokok Pikiran DPRD yang diakomodir; Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui Musrenbang, Konsultasi Publik , Focus Group Discussion, serta melalui E-Aspiration dan E-Musrenbang sebagai inovasi proses perencanaan.

2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan. Upaya yang dilakukan antara lain Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menghadirkan Tenaga Ahli dan Nara Sumber dengan sasaran para Kasubbag Program, Pejabat Eselon III dan II maupun Personil Bappeda sendiri.

3. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
Keberhasilan program ini dapat dilihat dari Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Ekonomi.
4. Perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya.
Keberhasilan program ini dapat dilihat dari Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang pemerintahan, sosial dan budaya. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Sosial Budaya.
5. Perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana.
Keberhasilan program ini dapat dilihat dari cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana wilayah. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Fisik Prasarana.

Detil penyumbang capaian indikator sasaran nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap
Capaian Sasaran Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2016	Capaian 2016	Kinerja RKPD Th.2016	Status Capaian
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100%	●
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90	65	65	100%	●
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85	70	70	100%	●
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55	30	35	116%	●
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	74%	75%	101%	●
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100	100	100	100%	●
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang esosial budayai	100	100	100	100%	●
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100	100	100	100%	●
5	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti	4	1	2	200%	●
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	95	60	60	100%	●

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2016	Capaian 2016	Kinerja RKPD Th.2016	Status Capaian
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	100	100	100	100%	●

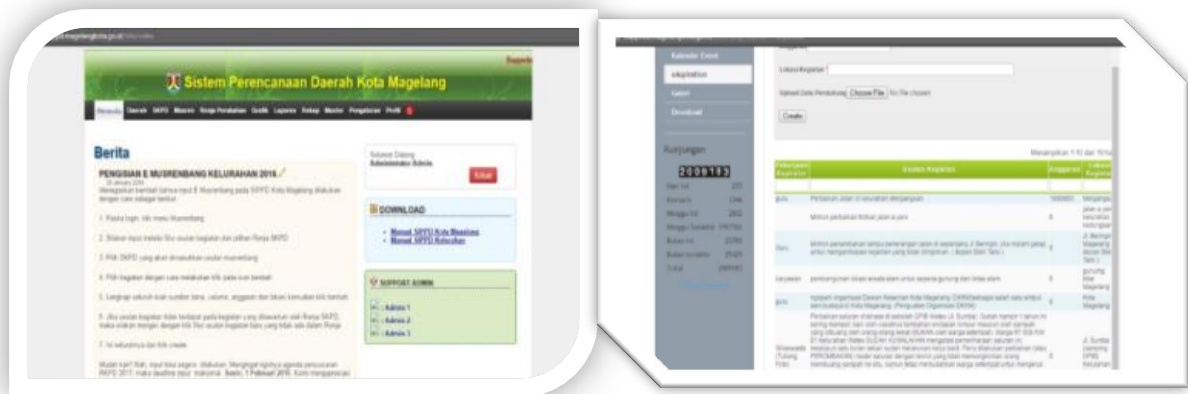
Keberhasilan capaian baik sasaran dan program, selain intensitas core business yang dilakukan juga merupakan hasil dari berbagai inovasi proses perencanaan sebagaimana tampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9
Inovasi Proses Perencanaan

No.	Inovasi	Latar Belakang Inovasi	Nilai Tambah / Dampak Positif
1.	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Carut Marut penyusunan Renja dan Renstra	Mampu meningkatkan kinerja penyusun dokumen perencanaan dari aspek waktu, ketertelusuran dan kehandalan prosesnya
2.	E-Musrenbang	Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data usulan Musrenbang	Meningkatkan transparansi dan alur ketertelusuran (track back) sehingga tetap mampu menjaga makna Musrenbang di mata masyarakat
3.	Optimalisasi E_Aspiration pada website Bappeda	Perlunya meningkatkan akses usulan bagi masyarakat secara online via website	Mampu meningkatkan rentang cakup usulan secara dunia maya,
4.	Sistem Informasi Geografis (Tata Ruang, Perumahan, Jalan dan Jembatan)	Perlunya aksesibilitas terhadap kondisi geospasial dan infrastruktur di Kota Magelang	Memberikan aspek kontrol dan evaluasi atas kondisi secara geospasial
5.	Pemanfaatan Media Sosial (WhatsApps) dalam Koordinasi Penyusunan RKPD		Akselerasi proses penyusunan dan keterbukaan diskusi atas penyusunan RKPD
6.	Peningkatan kapasitas Kasubbag program di OPD terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui workshop dan sosialisasi	Perlunya pemahaman yang lebih baik terhadap aspek perencanaan pembangunan pada level Kasubbag Program di seluruh OPD	Peningkatan skill pada core business perencanaan di setiap OPD
7.	Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Penyusunan Rancangan Renja OPD	Harus ada upaya agar terdapat standar belanja pada anggaran berbasis kinerja secara lebih ilmiah	Peningkatan kualitas pada substansi matriks rancangan Renja OPD
8.	Sarasehan perencanaan pembangunan di setiap kecamatan pada bulan Desember Tahun n-1 perencanaan tentang Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017	Secara lebih dini masyarakat diberikan pemahaman atas arah kebijakan pembangunan Tahun Rencana	Peningkatan kesadaran masyarakat peran masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dengan indikator peningkatan partisipasi masyarakat dan akomodasi usulan musrenbang
9.	Formulir Batasan dan Kriteria Usulan Musrenbang	Tidak terkendalinya usulan Musrenbang yang diluar jalur tema pembangunan tahun rencana, sehingga menghasilkan <i>planning scrap</i> pada saat Musrenbang	Filter atas usulan yang semakin berkualitas mengarah pada tema tahun rencana dan makin meningkatnya akomodasi atas usulan Musrenbang
10.	Integrasi Sistem Perencanaan dengan Penganggaran (SIPPD-SIMDA)	Inefisiensi atas implementasi sistem dalam hal waktu input atas fungsi perencanaan dan penganggaran	Tidak terjadi duplikasi atas input yang sama dalam penyusunan Renja OPD pada sistem SIPPD (Program, kegiatan, indikator) dan SIMDA

No.	Inovasi	Latar Belakang Inovasi	Nilai Tambah / Dampak Positif
11.	Integrasi dan pemanfaatan Dokumen Pemetaan Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis Kelurahan dalam Pengusulan Musrenbang (secara lebih lanjut dikembangkan sebagai dokumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman/RPLP)	Masih tumpang tindihnya pengusulan Musrenbang sehingga tidak tepat sasaran	Peningkatan ketepatan sasaran usulan dengan mendasarkan pada dokumen yang disusun secara ilmiah dan melibatkan partisipasi Masyarakat.
12.	Focus Group Discussion	Perlunya penajaman atas isu strategis dan tema pembangunan	Makin efektifnya program kegiatan yang memiliki daya ungkit /leverage atas solusi isu strategis dan permasalahan pembangunan
13.	Segmentasi Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD (Umum, Anak sekolah dan Lansia, difabel)	Upaya meningkatkan masukan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjangkau hingga segmen spesifik	Makin berkualitasnya perencanaan pembangunan dengan akomodasi usulan dan suara masyarakat yang lebih luas

Gambar 3.3
Screenshot Sistem Informasi Perencanaan



Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

e-aspiration

Beberapa **kendala** yang perlu untuk diantisipasi ke depan antara lain:

1. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik. Sebagai contoh untuk Pokok pokok pikiran DPRD sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010, diamanatkan untuk disampaikan kepada Eksekutif dalam hal ini Bappeda sejak Rancangan Awal RKPD Tahun rencana (Januari), namun demikian selama ini hal tersebut belum bisa terwujud.
2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus terus dioptimalkan untuk meminimalisasi deviasi.
3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD.
4. Meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.

Gambar 3.4
Screenshot Sistem Informasi Tata Ruang



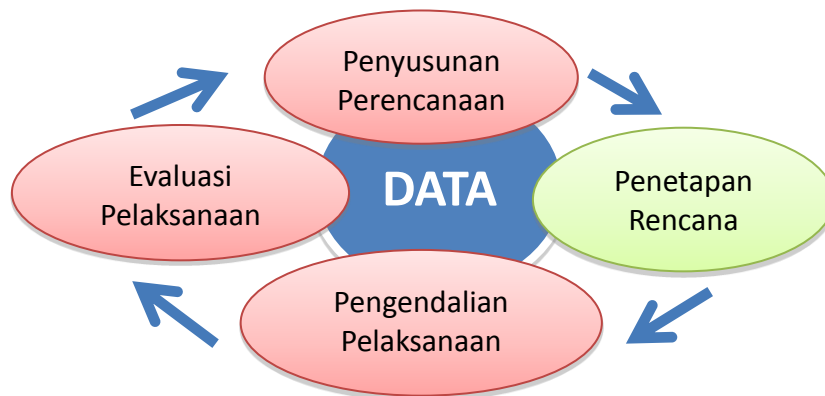
Solusi atas kendala dilakukan melalui:

1. Peningkatan pemahaman yang sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok pikiran DPRD dapat diwujudkan pada saat penyusunan Rancangan Awal sehingga dapat diintegrasikan lebih dini dalam perencanaan pembangunan daerah. Komunikasi lebih intensif antara Bappeda, Setwan dan DPRD menjadi kunci untuk mewujudkan hal tersebut.
2. Evaluasi bersama pihak-pihak terkait hal ini, di level eksekutif integrasi sistem perencanaan dan penganggaran perlu didorong secara penuh untuk pengintegrasian. Komunikasi intensif dengan DPRD juga layak diupayakan.
3. Peningkatan pemahaman di seluruh SKPD secara internal maupun koordinasi antar SKPD dan Bappeda serta melalui sosialisasi dan workshop. TAPD saat mengawal dan verifikasi RKA harus mengacu pada RKPD.
4. Peningkatan dan intensitas forum dialog perencanaan, Focus Group Discussion serta forum OPD membahas isu-isu strategis pembangunan.
5. Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah. Jika diperlukan ada medium paparan oleh Kepala OPD atas dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan seperti Renja dan Renstra serta Perjanjian Kinerja.
6. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel.
7. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada.

Capaian Indikator Persentase Publikasi Data dan Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan

Data/Informasi dan statistik sektoral merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan masukan dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas sangat membutuhkan data yang valid, akurat dan terkini.

Gambar 3.5
Peran Penting Data dalam Siklus Perencanaan



Berkaitan dengan kebutuhan data statistik dalam penyusunan dokumen perencanaan, maka hal ini telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 13 ayat 1 bahwa: "Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta rencana tata ruang". Pernyataan tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pengambil kebijakan/keputusan karena kebijakan/keputusan yang berkualitas tergantung dari data/informasi akurat, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Data dasar yang diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan yaitu data dasar indikator makro, diantaranya : PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), dan sebagainya. Selain itu berupa data dasar Indikator sosial, yaitu : IPM, data kependudukan, data kemiskinan, data ketenagakerjaan, data kesehatan, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan akan data/Informasi dan statistik sektoral dalam mendukung perencanaan pembangunan, maka pada Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kota Magelang

melalui SKPD teknis yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik melaksanakan sejumlah program dan kegiatan terkait dengan data dan statistik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai leading sector perencanaan pembangunan pada tahun 2016 melalui Program Pengembangan data/informasi telah merilis Buku Profil Daerah. Buku Profil Daerah menyajikan data/informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab X pasal 274. Data/informasi dan indikator makro yang tersaji dalam Buku Profil Daerah tersebut seluruhnya (100 %) dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Dari sisi statistik sektoral, Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik sebagai leading sector dalam urusan statistik pada tahun 2016 melalui Program Pengembangan data/informasi/Statistik Daerah telah merilis beberapa produk data diantaranya : Buku Daerah Dalam Angka, Buku PDRB, Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia dan Buku Analisis Perkembangan Laju Inflasi. Selain dalam bentuk buku, data-data sektoral juga terpublish secara on line melalui DATA GO yang merupakan Data Centre Kota Magelang dan dapat diakses melalui laman: datago.magelangkota.go.id. Data dan statistik sektoral yang tersaji berasal dari data teknis seluruh sektor yang telah tervalidasi dan terkini. Tercatat tidak kurang dari 85% dari jumlah dan jenis data yang terpublikasi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Realisasi indikator kinerja Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2016 bila dihitung secara rata-rata dari kedua komponen diatas adalah sebesar 93,5 % dari target sebesar 60% dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar 155,83%. Hal ini tentu saja menjadi awal yang sangat baik bagi pencapaian indikator ini sampai dengan akhir periode RPJMD, mengingat tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD namun indikator ini langsung menunjukkan kinerja yang sangat positif. Tantangan beratnya adalah menjaga tren positif pencapaian indikator ini setiap tahunnya.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia. Seluruh SDM yang terlibat dalam penyediaan data mampu bekerja secara efektif dalam menyediakan dan mempublikasikan data yang akurat dan terkini agar dapat diakses secara luas. Adapun anggaran dari kedua program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 451.731.000, 00 telah digunakan secara efektif dan efisien dengan realisasi sebesar Rp. 419.278.570, 00 atau sebesar 92,81 %.

Beberapa kendala yang perlu untuk diantisipasi ke depan antara lain:

1. Masih kurangnya pengelola data yang berkompeten pada setiap Perangkat Daerah sumber data, sehingga data kurang terpelihara dengan baik yang berdampak pada terhambatnya kelancaran manajemen data daerah;
2. Belum terintegrasinya basis data sektoral skala kota;
3. Belum kuatnya payung hukum pengelolaan data;

4. Kurangnya pemahaman akan pentingnya data pada skala kota.

Solusi yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Pembinaan secara komprehensif bagi pengelola data pada setiap Perangkat Daerah;
2. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen DATA GO yang mengintegrasikan seluruh data sektoral;
3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Satu Data Kota Magelang;
4. Sosialisasi tentang pentingnya data kepada stakeholder.

Gambar 3.6
DATA GO sebagai Data Centre Kota Magelang



Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 3.514.047.301,00 dari anggaran sebesar Rp 3.918.211.000,00 atau 89,68% dari target. Realisasi keuangan sebesar 89,68% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 128,48 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

5. Sasaran Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan sasaran untuk mendukung tujuan tiga pada Misi 1 dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 yaitu Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan, dengan indikator tujuan “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah”.

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang menggambarkan keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah ini adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Arti membiayai sendiri memunculkan seberapa peranan pemerintah dan peran

daerah itu sendiri dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan. Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat empat pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, menurut teori yang dikenalkan oleh *Paul Hersey dan Kenneth Blanchard*, yaitu :

- Pola Hubungan Instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.
- Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola Hubungan Partisipatif, dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola Hubungan Delegatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai gambaran secara kualitatif pola hubungan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemandirian (%)	Pola Hubungan
0 – 25	Instruktif
25 – 50	Konsultatif
50 – 75	Partisipatif
75 – 100	Delegatif

Sejalan dengan konsep kemandirian keuangan daerah tersebut, Pemerintah Kota Magelang menetapkan dua indikator utama dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan daerah, yaitu derajat otonomi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat.

Adapun hasil pengukuran terhadap kedua indikator tersebut tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Derajat Otonomi Fiskal	23,89%	21,40%	26,75%	125,00%	35,62%
2	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	83,60%	80,27%	65,60%	118,28%	63,65%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					121,64%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2016. Adapun rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2016 sebesar 121,64%.

Capaian Indikator Derajat Otonomi Fiskal

Derajat otonomi fiskal merupakan kemampuan suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat Otonomi Fiskal dapat diketahui dengan menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah.

Pada tahun 2016 derajat otonomi fiskal mencapai 26,75%, berdasarkan realisasi PAD Kota Magelang pada tahun 2016 sebesar Rp. 220.217.864.604,00 dan total pendapatan sebesar Rp. 840.042.727.476,00. Dengan besaran derajat otonomi fiskal tersebut, apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2016, maka capaian indikator kinerja mencapai 122,52%.

Apabila dihadapkan dengan target pada akhir RPJMD (2021), capaian ini menyumbang sebanyak 73,61%, artinya pada tahun pertama atau tahun 2016 ini pencapaian target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 73,61% dan dengan pencapaian ini harapan Pemerintah Kota Magelang akan derajat otonomi fiskal sebesar 35,62% diharapkan dapat tercapai.

Untuk mengetahui perkembangan derajat otonomi fiskal Kota Magelang kurun waktu 4 tahun terakhir, tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.12
Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Kota Magelang
Tahun 2013-2016

Tahun	Realisasi PAD	Total Pendapatan	Derajat Otonomi Fiskal	Perkembangan
2013	107.739.838.961	634.759.985.140	16,97%	--
2014	164.927.631.230	735.116.114.407	22,44%	5,47%
2015	186.677.410.081	781.335.799.509	23,89%	1,45%
2016	220.217.864.604	823.177.275.000	26,75%	2,86%

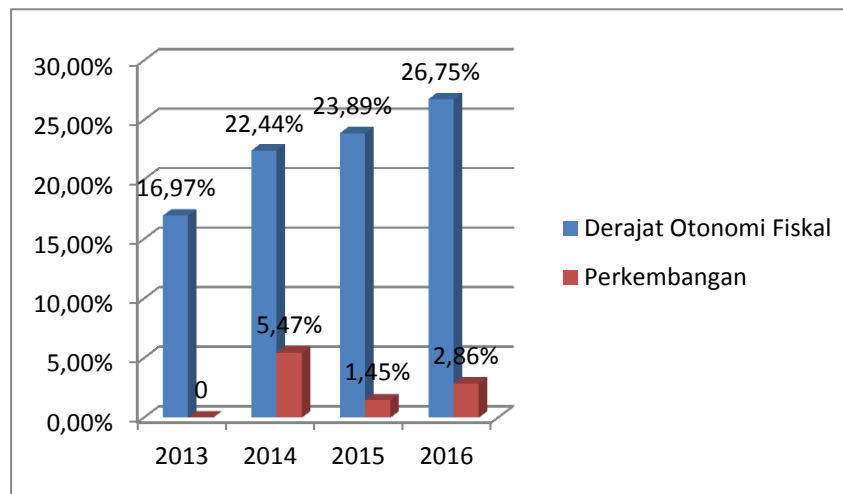
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 perkembangan derajat otonomi fiskal Kota Magelang mengalami peningkatan. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2013 ke tahun 2014 yang mencapai 5,47%. Selanjutnya derajat otonomi fiskal mengalami kenaikan antara 1 % – 2 % pada tahun 2014 ke tahun 2015 dan tahun 2015 ke tahun 2016. Hal ini berarti PAD Kota Magelang dari tahun ke tahun semakin meningkat, begitu pula dengan perbandingannya terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan Pemerintah Kota Magelang semakin optimal dalam menggali potensi PAD dan semakin efektif dalam mencapai target-target PAD. Apabila dikaitkan dengan ulasan tentang konsep pembiayaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka semakin tinggi derajat otonomi fiskal daerah, semakin daerah mampu untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data

perkembangan derajat otonomi fiskal diatas Pemerintah Kota Magelang berada pada perkembangan yang positif dalam pembiayaan daerah yang bersumber dari PAD.

Untuk lebih jelasnya perkembangan derajat otonomi fiskal Kota Magelang dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.7
Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Kota Magelang
Tahun 2013-2016



Dalam rangka untuk mencapai indikator derajat otonomi fiskal pada sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut, dilaksanakan program dan kegiatan yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016. Adapun alokasi anggaran program dan kegiatan beserta realisasinya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.13
Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator
Derajat Otomoni Fskal Kota Magelang Tahun 2016

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.				
1	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	499.600.000	436.140.149	87,30
2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek Dan Obyek Pajak	33.295.000	33.045.000	99,25
3	Penataan Administrasi Pemungutan Bphtb Dan Pajak Air Tanah	51.700.000	51.395.844	99,41
4	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	57.399.000	57.016.750	99,33
5	Penatausahaan Sistem Pajak Online	24.245.000	16.815.600	69,35
6	Sosialisasi Peraturan Daerah	62.382.000	57.637.500	92,39
7	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	50.094.000	50.071.500	99,95

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
8	Penyusunan Laporan Realisasi & Penatausahaan Adm. Pend. Daerah	150.800.000	148.795.000	98,67
9	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	117.538.000	112.241.345	95,49
10	Penyelesaian Keberatan Dan Pengurangan Pajak Daerah	63.516.000	60.807.500	95,74
11	Intensifikasi Pemungutan PBB	229.445.000	201.007.815	87,61
12	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	144.925.000	128.331.270	88,55
13	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	416.331.000	369.805.380	88,82
14	Penyusunan Raperda Tentang Pajak Bumi dan Bangunan	110.750.000	104.857.750	94,68
15	Verifikasi dan Validasi Data Piutang PBB P2	191.329.000	169.394.100	88,54
16	Penilaian Objek Pajak Pedesaan Dan Perkotaan	471.700.000	428.518.180	90,85
TOTAL		2.675.049.000	2.425.880.683	90,69

Sumber: Laporan Keuangan DPKKD 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa alokasi anggaran yang telah ditetapkan terealisasi sebesar Rp. 2.425.880.683,00 dari target sebesar Rp. 2.675.049.000,00 atau sebesar 90,69%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

Meskipun secara umum derajat otonomi fiskal Kota Magelang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang menggembirakan, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain :

1. Masih dijumpainya penentuan target Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi oleh unit penghasil, masih menggunakan pendekatan *incremental based budgeting*, yang mestinya dalam penentuan target berdasar pada perhitungan potensi riil untuk mengurangi potensial lost.
2. Dalam rangka meningkatkan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan, diperlukan upaya penilaian kembali/penilaian secara rutin terhadap obyek PBB.
3. Belum sepenuhnya *Law Enforcement* dijalankan, yaitu berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perlunya dilaksanakan *study* potensi retribusi yang secara teknis dapat bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan.
2. Dilaksanakan pemantauan dan pendataan terhadap obyek pajak khususnya pajak bumi dan bangunan secara periodik serta dilanjutkan dengan dilaksanakannya penilaian kembali terhadap obyek pajak tersebut.
3. *Law Enforcement* sudah dilaksanakan dalam sistem pajak online, dimana denda pajak otomatis tercantum apabila wajib pajak terlambat membayar pajak terutangnya.

Capaian Indikator Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat

Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat dapat diketahui dengan menghitung besarnya dana transfer dari pusat yang diterima pemerintah daerah dibandingkan total penerimaan daerah. Dana transfer sesuai dengan struktur Pendapatan Transfer adalah Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan yang terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumer Daya Alam), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pada tahun 2016 rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat sebesar 65,60%, berdasarkan dana transfer dari pemerintah yang diterima Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2016 sebesar Rp. 551.097.728.545,00 dan total pendapatan sebesar Rp. 840.042.727.476,00. Dengan rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat tersebut, apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2016, maka capaian indikator kinerja mencapai 122,52%. Untuk perhitungan capaian indikator kinerja ini, digunakan rumus panjang (bahwa capaian indikator kinerja dengan konotasi negatif menggunakan rumus panjang) artinya semakin rendah realisasinya, semakin tinggi capaian kerjanya.

Apabila dihadapkan dengan target pada akhir RPJMD (2021), capaian ini menyumbang sebanyak 97,03%, artinya pada tahun pertama atau tahun 2016 ini pencapaian target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 97,03% dan dengan pencapaian ini harapan Pemerintah Kota Magelang dengan angka ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat sebesar 63,65% optimis dapat tercapai. Untuk mengetahui perkembangan rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat Kota Magelang untuk kurun waktu 4 tahun terakhir, tersaji dalam tabel berikut :

Tabel. 3.14
Perkembangan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat Kota Magelang Tahun 2013-2016

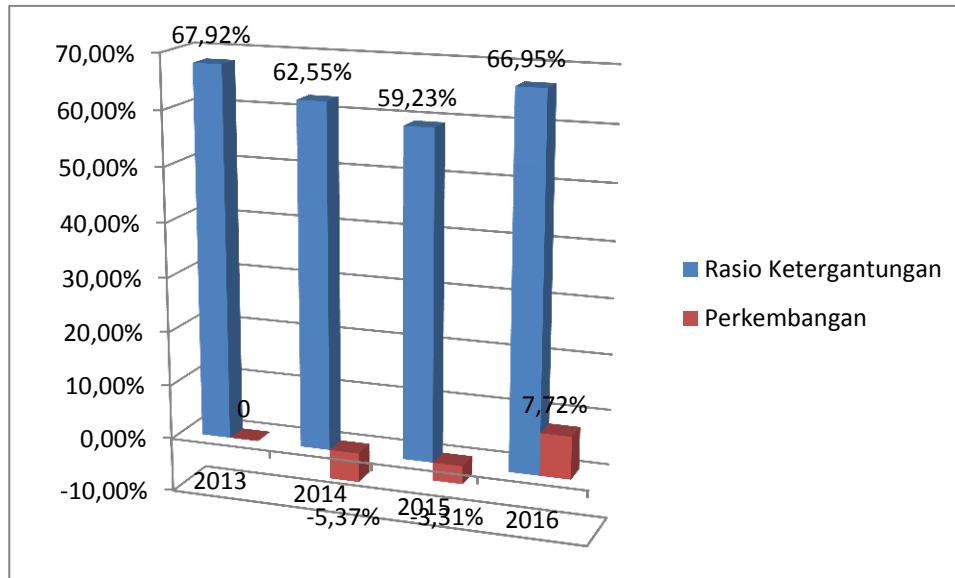
Tahun	Dana Transfer dari Pusat	Total Pendapatan	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat	Perkembangan (%)
2013	431.113.288.290	634.759.985.140	67,92%	--
2014	459.785.205.171	735.116.114.407	62,55%	-5,37
2015	462.804.716.465	781.335.799.509	59,23%	-3,31
2016	551.097.728.545	823.177.275.000	66,95%	7,72

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat Kota Magelang dari tahun 2013 ke tahun 2014 turun sebesar 5,37 dan tahun 2014 ke tahun 2015 juga turun sebesar 3,31. Hal ini menunjukkan adanya penurunan ketergantungan keuangan Kota Magelang terhadap dana transfer dari pusat. Meskipun pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan sebesar 7,72, namun secara umum telah diimbangi dengan perkembangan PAD pada tahun ini yang berkembang sebesar 2,86%.

Untuk lebih jelasnya perkembangan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat Kota Magelang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.8
Perkembangan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat Kota Magelang Tahun 2013-2016



Dalam rangka untuk mencapai indikator rasio ketergantungan daerah terhadap dana pusat pada sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut, dilaksanakan program dan kegiatan yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016. Adapun alokasi anggaran program dan kegiatan beserta realisasinya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.15
Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat Kota Magelang Tahun 2016

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.				
1	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Data-data dan Sumber Daya Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	123.431.000	118.983.000	96,39%
2	Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain-Lain	142.232.000	140.761.250	98,96%
TOTAL		265.663.000	259.744.250	97,77%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa alokasi anggaran yang telah ditetapkan terealisasi sebesar Rp. 259.744.250,00 dari target sebesar Rp. 265.663.000,00 atau sebesar 97,77%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya efisiensi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan dana transfer di Kota Maelang antara lain :

1. Belum sinkronnya antara peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya yang menyangkut dana transfer daerah dengan penyusunan APBD sehingga terjadi ketidakselarasan dalam proses pengalokasian penganggarnya.
2. Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana pusat, sangat tergantung pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh pemerintah.

Solusi:

- Optimalisasi komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka pelaksanaan proses penganggaran yang bersumber dari dana pusat.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.685.624.933,00 dari anggaran sebesar Rp 2.940.712.000,00 atau 91,33% dari target. Realisasi keuangan sebesar 91,33% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 121,64%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan sasaran untuk mendukung tujuan tiga pada Misi 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 yaitu Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan, dengan indikator tujuan “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah”.

Dengan capaian terhadap dua indikator yang mendukung tercapainya indikator tujuan tersebut diatas, maka dapat diketahui capaian indikator tujuan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Daerah merupakan perbandingan antara PAD dengan dana transfer (pemerintah) ditambah dengan dana yang berasal dari pemerintah propinsi.
2. Pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar Rp. 220.217.864.604, dana transfer sebesar 551.097.728.545 dan dana dari pemerintah provinsi berupa pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp. 37.179.177.579.

Berdasar data tersebut maka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Magelang sebesar 37,43%

3. Berdasarkan pola hubungan yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Magelang berada pada range angka 25 – 50 %, atau pola hubungan konsultatif. Hal ini berarti bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Capaian di tahun 2016 ini menjadi pemacu bagi Pemerintah Kota Magelang untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam hal kemandirian keuangan daerah. Harapannya pada akhir tahun pencapaian RPJMD 2016 - 2021 Pemerintah Kota Magelang sudah mendekati pola hubungan partisipatif.

6. Sasaran Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan

Sasaran ini dimaksudkan untuk upaya Kota Magelang dalam mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, beberapa indikator target dan realisasi sasaran strategis tampak sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	52%	55%	56%	101,82%	70%
2	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44,83%	51,72%	55,17%	106,67%	89,96%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					104,25%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja 2 indikator sasaran telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2016. Adapun rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2016 sebesar 104,25%.

Capaian Indikator Persentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam APBD

Dari indikator Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD capaian tahun 2015 adalah 52% sedangkan pada tahun 2016 realisasinya mencapai 56% dengan tingkat capaiannya sebesar 101,82% dari target 55% yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin akomodatifnya pemerintah Kota Magelang atas usulan program kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat. Realisasi kinerja tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 4%.

Capaian Indikator Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga

Sementara itu Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga pada tahun 2015 tercapai 44,83% kemudian naik menjadi 55,17% dari target 2016 sebesar 51,72%. Adapun persentase capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 106,67% artinya realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan.

Para mitra OPD berupa forum warga ataupun forum-forum terkait, akan memberikan dukungan yang positif dimulai ketika penyusunan perencanaan program kegiatan itu sendiri. Lebih dari separuh OPD telah memiliki mitra kerja, sedangkan sebagian lainnya optimis akan mampu tercapai pada tahun-tahun mendatang hingga tahun 2021.

Tabel 3.17
Mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

NO	OPD	MITRA KERJA
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Dewan Kesenian Kota
2	Dinas Kesehatan	Kader Posyandu
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	---
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	---
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	---
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Kader Trantip
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	FKUB, FPBI, FKDM
8	Dinas Sosial	Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat
9	Dinas Tenaga Kerja	SPSI
10	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat penggerak kampung organik dan bank sampah
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	---
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Forum LPM
13	Dinas Perhubungan	Organda dan PO
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	Kelompok Informasi Masyarakat
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	---
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	Dewan Kesenian Kota
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Masyarakat Pecinta Buku, Ulat Buku
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	Cat lover, Gapoktan
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Forum Mega Tidar
20	Sekretariat Daerah	---
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	---
22	Kecamatan Magelang Selatan	---
23	Kecamatan Magelang Tengah	---
24	Kecamatan Magelang Utara	---
25	Inspektorat	---
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Magelang Kota Toea
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	---
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	---
29	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Forum Jarlitbangrap iptek

Capaian sasaran tersebut dapat terealisasi dengan keberhasilan strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi yang melibatkan dua arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan media dan saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, dimana program yang dominan adalah Program perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan beberapa program.

Permasalahan yang perlu diantisipasi ke depan antara lain :

1. Meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
2. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.
3. Masih minimnya jumlah MoU antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kementerian/LNDP/pembina terkait penelitian & pengembangan.
4. Belum optimalnya pembinaan dan hilirisasi produk hasil kreativitas dan inovasi masyarakat.
5. Rendahnya proporsi SDM pengelola Kelitbangan.
6. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi di Kota Magelang.
7. Belum terimplementasikannya online jurnal system di Kota Magelang.
8. Belum adanya payung hukum yang mengatur Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
9. Belum optimalnya fungsi Forum Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (Jarlitbangrap IPTEK).
10. Belum optimalnya pemberdayaan forum warga dan mitra OPD.

Soulsi atas permasalahan yang dihadapi:

1. Peningkatan dan intensitas forum dialog perencanaan, Focus Group Discussion serta forum OPD membahas isu isu strategis pembangunan.
2. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel.
3. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada.
4. Peningkatan akses terhadap aspirasi masyarakat lewat berbagai media.
5. Pemberdayaan Forum Mitra OPD melalui berbagai skenario program kegiatan.
6. Optimalisasi fungsi kelitbangan melalui berbagai kerjasama, pemberdayaan forum serta terobosan inovasi.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.298.508.850,00 dari anggaran sebesar Rp 2.611.846.000,00 atau 88,00% dari target. Realisasi keuangan sebesar 88,00% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 104,25%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Sasaran Meningkatnya Kemampuan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.18
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	45%	45%	45,04%	100,09%	50%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja 1 indikator sasaran telah melampaui dari target yang ditetapkan. Adapun rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2016 sebesar 45,04%. Dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,09%.

Capaian Indikator Persentase Swadaya Masyarakat dalam Program Pembangunan yang Diselenggarakan Bersama Pemerintah

Realisasi untuk indikator sasaran ini sebesar 45,04 % dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 45 % dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Total Dana Pembangunan Swadaya masyarakat sebesar Rp. 2.657.760.000,00 dibagi Jumlah Dana Pembangunan Pemerintah (17 Kelurahan) sebesar Rp.5.901.402.000,00 x 100% = 45,04 %.

Data Swadaya masyarakat ini diperoleh dari laporan yang disampaikan dari 17 kelurahan melalui kegiatan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat). Adapun Data Dana Pembangunan Pemerintah dari 17 Kelurahan diperoleh dari Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2016.

Apabila dibandingkan dengan posisi Tahun 2015 yaitu target kinerja sebesar 45% dan realisasi sebesar 45%, maka pada tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 0,04%. Apabila dilihat dari beberapa tahun yang lalu pada RPJM 2010-2015 pada tahun 2011 realisasi sebesar 45 % dan tahun 2012 realisasi 49 % serta tahun 2013, 2014 stagnan sebesar 45 %.

Untuk mendorong dan memotivasi pemerintah daerah dalam peningkatan semangat gotong royong, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri secara berkala mengadakan penilaian dan kompetisi BBGRM, penilaian berdasarkan data kinerja BBGRM 2 (dua) tahun sebelumnya. Prestasi tertinggi yang pernah diraih Kota Magelang adalah Juara II Lomba BBGRM Tingkat

Nasional yang pada saat itu diwakili Kelurahan Kedungsari pada tahun 2013. Data Prestasi terakhir tahun 2015 mendapat Juara I Tingkat Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Kelurahan Kemirejo, adapun untuk tingkat nasional ditiadakan.

Permasalahan yang perlu diantisipasi ke depan :

- Kecenderungan karakteristik warga perkotaan yang individualis berdampak pada menurunnya nilai-nilai kegotongroyongan dalam masyarakat, sehingga akan berpotensi menurunnya partisipasi masyarakat.

Solusi atas permasalahan yang dihadapi:

1. Membudayakan kembali semangat gotong-royong melalui program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Hal terpenting yang menjadi filosofi dari BBGRM ini adalah bagaimana agar masyarakat tetap dapat mempertahankan budaya gotong royong, saling membantu, kerjasama, saling peduli, peka terhadap lingkungannya, saling asah, asih dan asuh.
2. Merumuskan strategi penggarapan di lapangan yang lebih intens dan tepat sasaran, melalui inovasi disesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat Kota Magelang agar bisa semakin berdaya dan mandiri.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.909.603.134,00 dari anggaran sebesar Rp 2.088.605.000,00 atau 91,43% dari target. Realisasi keuangan sebesar 91,43% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,09%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

8. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Partisipasi Pemuda dalam Ajang Prestasi Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.19
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Partisipasi Pemuda dalam Ajang Prestasi Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Jumlah prestasi pemuda/ organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional	5	6	6	100%	5
	a. Regional	4	4	6	150%	4
	b. Nasional	1	2	0	0%	1
2	Jumlah prestasi Olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	14	17	15	88,25%	14
	a. Regional	8	10	10	100%	8
	b. Nasional	4	5	5	100%	4
	c. International	2	2	2	100%	2
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					89,29%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan sasaran ini diukur melalui 2 indikator sasaran, masing-masing indikator sasaran dijabarkan dalam 3 sub indikator regional, nasional dan internasional. Dengan realisasi kinerja 2 indikator sesuai target yang ditetapkan, namun apabila diturunkan ke dalam sub indikator maka untuk indikator prestasi pemuda di tingkat nasional belum dapat tercapai, dari 2 prestasi tingkat nasional yang ditargetkan realisasinya masih nihil. Adapun untuk sub indikator prestasi di bidang olah raga realisasi kinerja tercapai sesuai target baik untuk prestasi di tingkat regional, nasional dan internasional. Adapun rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2016 sebesar 89,29%.

Capaian Indikator Jumlah Prestasi Pemuda/Organisasi Pemuda yang Berprestasi di Kancah Regional, Nasional dan Internasional

Pengukuran atas Indikator kinerja jumlah prestasi pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional secara akumulasi tercapai 100%, namun apabila dirinci maka capaian kinerja untuk prestasi tingkat regional melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 150% karena dari target 4 prestasi diperoleh hasil 6 prestasi, sedangkan untuk tingkat nasional target tidak terpenuhi dari target yang ditetapkan sejumlah 2 prestasi.

Prestasi di bidang kepemudaan di tingkat regional sebagai berikut:

1. Juara 2 Tata Upacara Bendera & Baris Berbaris tingkat Provinsi;
2. Juara 1 Kategori Pembaca UUD 1945 Lomba Tata Upacara Bendera & Baris Berbaris tingkat Provinsi;
3. Juara 2 Lomba Paduan Suara Gita Bahana Nusantara tingkat Provinsi;
4. Terpilihnya satu orang Pelajar untuk PASKIBRA tingkat Provinsi;
5. Juara 1 kegiatan Lomba Pemuda Pelopor Bidang Seni dan Budaya Kategori Seni dan Budaya;
6. Juara 1 kegiatan Lomba Pemuda Pelopor Bidang Seni dan Budaya Kategori Costplay (Pakaian).

Beberapa permasalahan yang dihadapi, di dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan diantaranya:

1. Aktivitas Organisasi Kepemudaan belum terinventarisir dengan baik, disinyalir ada beberapa kelompok yang sudah tidak beraktivitas lagi, karena terjadinya pasang surut minat masyarakat terhadap suatu kegiatan kepemudaan yang diikutinya. Jumlah organisasi kepemudaan (OKP) teridentifikasi 35 OKP namun yang masih aktif sejumlah 30 OKP. Peran KNPI sebagai induk organisasi pemuda perlu dioptimalkan sebagaimana mestinya untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan.
2. Kegiatan Kepemudaan membutuhkan sarana prasarana yang beraneka macam. Masyarakat seringkali terkendala dengan ketersediaannya, sehingga potensi yang ada juga sulit dikembangkan. Hal ini juga menyebabkan terkendalanya pembentukan suatu organisasi kepemudaan. Bantuan hibah tidak dapat diberikan kepada organisasi kepemudaan yang tidak berbadan hukum, dan pada kenyataannya organisasi kepemudaan hampir semuanya tidak berbadan hukum.
3. Masih rendahnya eksistensi pemuda dalam kegiatan tingkat kota.

4. Belum ada satupun pemuda yang lolos dalam seleksi di tingkat provinsi pada 3 tahun terakhir dalam seleksi Pemuda Pelopor Pembangunan, hal ini terkendala kurangnya motivasi pemuda yang berprestasi di tingkat Kota apabila akan diajukan ke tingkat lebih tinggi memerlukan persiapan yang lebih matang, mengurus waktu dan tenaga dan tidak menutup kemungkinan akan mengganggu rutinitas pekerjaan/mata pencaharian.
5. Pembinaan Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP) dirasakan masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Dari 27 KWP yang dibentuk, tinggal 14 KWP yang masih operasional, itupun dalam kondisi yang belum berkembang. KWP yang hingga saat ini eksis berkembang antara lain Cahaya Tidar, Permadi, Sekar Batik, Giga Computer dan Indigo Art.

Adapun **solusinya** antara lain melalui:

1. Inventarisasi organisasi kepemudaan sebaiknya dilakukan secara periodik setiap tahun, serta upaya mendorong dan mengoptimalkan peran KNPI selaku induk organisasi kepemudaan.
2. Penerapan mekanisme pelaporan organisasi kepemudaan harus diupayakan secara tertib dilakukan oleh semua organisasi kepemudaan kepada pemerintah, sehingga akan terpantau aktivitasnya.
3. Penyelenggaraan program-program yang bersifat insentif seperti lomba dengan hadiah berupa stimulan pembinaan kemungkinan besar akan menggairahkan terbentuknya kelompok organisasi kepemudaan yang baru.
4. Pendampingan secara intensif untuk organisasi kepemudaan maupun duta Kota Magelang yang maju untuk seleksi/berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, sehingga akan terjalin kebersamaan yang solid.

Capaian Indikator Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

Jumlah prestasi olahraga pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 17 dengan target regional 10, nasional 5 dan internasional 2. Realisasi jumlah prestasi olahraga untuk tingkat regional, nasional dan internasional dapat tercapai 100%.

Cabang olahraga yang meraih prestasi tingkat nasional dan regional antara lain: taekwondo, wushu, bulu tangkis, karate, renang, sepakbola, atletik, basket, sepatu roda dan tenis lapangan. Sedangkan untuk tingkat internasional dapat diperoleh 2 prestasi masing-masing di Kejuaraan International Skates Marathon (ISM) 2016 di kota Xinchang Tiongkok memperoleh Medali Emas atas Nama Stefanus Gita Surya Nugraha yang turun di nomor half maraton 21 km usia junior dan Medali Perak atas nama Yosua Samolala di nomor pertandingan yang sama.

Untuk meningkatkan prestasi olahraga diperlukan pembinaan olahraga yang diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberi kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif dan berkesinambungan. Pembinaan atlet usia pelajar sering kali tidak terjadi kesinambungan dengan pembinaan cabang olahraga prioritas. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan program pembibitan atlet dari usia dini dengan cabang olahraga yang menjadi prioritas. Selain identifikasi pemanduan bakat, pembinaan harus dilakukan secara terus menerus dan berjenjang dengan

memperhatikan input atlet yang akan masuk ke dalam pembinaan. Diperlukan metode tertentu untuk mendapatkan atlet potensial dengan tidak meninggalkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menetapkan prioritas cabang olahraga yang akan dibina. Dengan adanya prioritas tentu saja pembinaan yang dilakukan harus difokuskan tanpa mengabaikan cabang olahraga yang lain.

Beberapa permasalahan yang dihadapi, di dalam penyelenggaraan urusan olahraga diantaranya:

1. Cabang olahraga unggulan yang ada saat ini di Kota Magelang adalah renang, taekwondo, sepakbola, atletik dan panahan. Masih terdapat beberapa cabang yang berpotensi untuk menjadi unggulan apabila dilakukan pembinaan yang lebih intensif seperti sepatu roda, tenis lapangan, bulutangkis dan basket.
2. Peningkatan peringkat dalam kompetisi olahraga seyogyanya terus dipertahankan/ditingkatkan agar tidak terpuruk sebagaimana pernah dialami pada periode 2013-2014.
3. Pembinaan atlet melalui 183 klub olahraga dari 34 cabang olahraga perlu diimbangi manajemen organisasi olahraga yang baik.

Solusi atas permasalahan yang dihadapi:

1. Menggali potensi cabang olahraga unggulan, untuk dikembangkan dan dibina lebih intensif agar prestasi olah raga dapat ditingkatkan;
2. Pembinaan dan pemusatan latihan kepada atlet yang akan berkompetisi agar terasah dan terjaga *performance* terbaiknya.
3. Pembinaan manajemen organisasi olahraga agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik;

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 2.785.235.500,00 dari anggaran sebesar Rp 2.925.219.000,00 atau 95,21% dari target. Realisasi keuangan sebesar 95,21% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 89,29%, maka belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 2

1. Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Layanan Pendidikan Menuju Masyarakat Cerdas dan Berdaya Saing

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun hasil pengukuran atas sasaran ini tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 3.20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan
Kualitas Layanan Pendidikan Menuju Masyarakat Cerdas dan Berdaya Saing

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Rata-rata lama sekolah	10,32	10,36	10,28	99,23%	10,59
2	Persentase sekolah berstandar nasional:					
	a. SD	30,66%	35,66%	98,66%	276,67%	60,66%
	b. SMP	60%	65%	90,00%	138,46%	90%
3	Angka Melek Huruf	97,00%	97,35%	97,67%	100,33%	98,95%
4	Persentase kunjungan perpustakaan	69,37%	70,95%	80,65%	113,67%	78,63%
5	Jumlah kunjungan perpustakaan	92.021	94.110	106.674	113,35%	104.305
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					140,28%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 6 indikator, adapun realisasi 4 indikator melampaui target, dan 1 indikator di bawah target yaitu indikator rata-rata lama sekolah. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 140,28 %.

Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years school*) merupakan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Realisasi kinerja untuk indikator ini sebesar 10,28 lebih rendah 0,08 poin dari yang ditargetkan sebesar 10,36 dengan capaian kinerja sebesar 99,23% artinya target belum dapat tercapai. Adapun realisasi kinerja rata-rata lama sekolah tahun 2015 sebesar 10,32 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 ini jauh lebih tinggi 0,04 point.

Dengan capaian tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Kota Magelang adalah setara dengan Kelas X SMA Semester II.

Capaian Indikator Persentase Sekolah Berstandar Nasional

- a. SD
- b. SMP

Sekolah Standar Nasional disingkat SSN adalah sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Adapun Kriteria Sekolah Standar Nasional terdiri dari kriteria umum dan kriteria khusus.



Capaian atas indikator sekolah berstandar nasional untuk jenjang SD dari target sebesar 35,66% dapat direalisasi sebesar 98,66% dengan capaian kinerja sebesar 277% artinya realisasi kinerja telah melebihi target. Perhitungan didasarkan pada data Jumlah SD yang ada di Kota Magelang berjumlah 75 buah, dengan perincian SD Negeri 61 buah dan SD swasta 14 buah. Dari 75 SD terdapat 2 SD yang belum memenuhi SSN yaitu SD Bhakti Tunas Harapan dan SD Muhammadiyah 2. Realisasi kinerja 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 30,66% juga jauh lebih tinggi.

Capaian atas indikator sekolah berstandar nasional untuk jenjang SMP dari target sebesar 65% dapat direalisasi sebesar 90% dengan capaian kinerja sebesar 138,46% artinya realisasi kinerja telah melebihi target. Perhitungan didasarkan pada data Jumlah SMP yang ada di Kota Magelang berjumlah 21 buah, dengan perincian SMP Negeri 13 buah dan SMP swasta 8 buah. Dari 21 SMP yang belum memenuhi SSN adalah SMP Bhakti Tunas Harapan dan SMP Taman Dewasa.

Realisasi kinerja 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 60% juga jauh lebih tinggi 30 poin.

Capaian Indikator Angka Melek Huruf

Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis. Lawan katanya adalah buta huruf atau tuna aksara ketidakmampuan membaca. Adapun Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) mendefinisikannya sebagai berikut: kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi.

Dalam perkembangannya melek aksara diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Angka melek aksara merupakan salah satu tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah, pada umumnya orang dengan kemampuan baca tulis yang baik akan memiliki peluang yang baik dan luas untuk akses pekerjaan dan pendidikan, yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi dan kesehatan.

Capaian atas indikator angka melek huruf dari target sebesar 97,35% dapat direalisasi sebesar 97,67% dengan capaian kinerja sebesar 100,33% artinya realisasi kinerja telah melampaui target. Perhitungan didasarkan pada data Jumlah penduduk Kota Magelang usia di atas 15 tahun yang bisa membaca berjumlah 89.986 Sedangkan Jumlah penduduk Kota Magelang usia diatas 15 tahun berjumlah 92.072. Realisasi kinerja 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 97,00% juga jauh lebih tinggi 0,67 poin.

Capaian Indikator Persentase Kunjungan Perpustakaan

Persentase kunjungan perpustakaan pada tahun 2016 tercapai sebesar 80,65% melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70,95%. Capaian kinerja tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 69,37%. Untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja ini dilaksanakan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan beberapa kegiatan, meliputi:

1. Pengembangan minat dan budaya baca.
2. Pameran dan bursa buku.
3. Layanan perpustakaan keliling.
4. Peningkatan pelayanan perpustakaan.
5. Promosi minat baca.
6. Pengembangan ketrampilan masyarakat.
7. Seminar lingkaran pena.

Untuk mendukung tumbuhnya minat baca bagi pengunjung perpustakaan disediakan berbagai macam jenis koleksi buku bacaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.21
Jumlah Koleksi Buku
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Tahun 2016

No.	Jenis Koleksi	Jml. Judul	Jml. Eksemplar
1	Karya Umum	1.529	2.017
2	Filsafat	2.305	3.128
3	Agama	3.708	5.027
4	Sosial	5.370	7.148
5	Bahasa	1.438	2.131
6	Ilmu Murni	1.903	2.658
7	Ilmu Teknik	5.537	7.896
8	Seni Budaya	1.957	2.956
9	Sastra	1.833	2.693
10	Geografi	2.004	2.865
11	Fiksi/Novel	6.114	8.633
	Jumlah	33.698	47.152

Sumber Data : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dok

Capaian Indikator Jumlah Kunjungan Perpustakaan

Pada Tahun 2016 jumlah kunjungan ke perpustakaan dalam satu tahun mencapai 106.674 orang, jumlah ini melebihi dari target kinerja yang direncanakan sebesar 94.110 Orang. Pada Tahun 2015 jumlah kunjungan perpustakaan sebanyak 92.021 orang, apabila diperbandingkan dengan tahun 2016 terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi perpustakaan, hal ini dimungkinkan karena pada saat ini gedung perpustakaan lebih representative dengan fasilitas yang memadai sehingga menarik minat masyarakat untuk berkunjung.

Berikut ini disajikan segmen pengunjung perpustakaan selama Tahun 2016:

Tabel. 3.22
Daftar Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016

No.	Kategori Pengunjung	Kantor Perpustakaan	Perpustakaan Keliling
1	Mahasiswa	13.020	---
2	Pelajar SMA	13.146	---
3	Pelajar SMP	11.310	22.334
4	Pelajar SD/TK	17.411	---
5	Pegawai	914	133
6	Guru/Dosen	1.414	441
7	Lain-Lain	20.842	5.709
JUMLAH		78.057	28.617

Sumber Data : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dok

Beberapa kendala dalam penyelenggaraan di bidang perpustakaan, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah tenaga fungsional pustakawan yang ada di Kota Magelang, saat ini baru ada 2 (dua) orang pustakawan yang ditempatkan di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi serta ditempatkan di SMP Negeri 7 Magelang.
2. Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang perpustakaan perlu adanya pengelolaan perpustakaan secara digital, namun untuk mendukung hal tersebut belum ada SDM di bidang teknologi informasi perpustakaan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan:

1. Memberikan motivasi kepada pegawai untuk menjadi tenaga fungsional pustakawan, saat ini baru dilaksanakan proses pengajuan beberapa pegawai sebagai tenaga fungsional pustakawan. Selain itu dengan mengikutsertakan pegawai pada seminar, workshop maupun bintek di bidang perpustakaan tingkat provinsi maupun nasional.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pengelolaan perpustakaan secara digital.

Guna meningkatkan pelayanan dan memudahkan pemustaka, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Magelang merencanakan penerapan RFID (Radio Frequency Identification) dalam bidang perpustakaan. RFID adalah teknologi identifikasi berbasis gelombang radio, keunggulan utama adalah pada meningkatnya kualitas pelayanan serta penghematan biaya operasional tenaga petugas perpustakaan.

Suatu sistem RFID secara utuh terdiri atas 3 komponen:

1. Tag RFID, dapat berupa stiker, kertas atau plastik dengan beragam ukuran. Didalam setiap tag ini terdapat chip yang mampu menyimpan sejumlah informasi tertentu.
2. Terminal Reader RFID, terdiri atas RFID-reader dan antenna yang akan mempengaruhi jarak optimal identifikasi. Terminal RFID akan membaca atau mengubah informasi yang tersimpan didalam tag melalui frekuensi radio. Terminal RFID terhubung langsung dengan sistem Host Komputer.
3. Host Komputer, sistem komputer yang mengatur alur informasi dari item-item yang terdeteksi dalam lingkup sistem RFID dan mengatur komunikasi antara tag dan reader. Host

bisa berupa komputer stand-alone maupun terhubung ke jaringan LAN / Internet untuk komunikasi dengan server.

RFID dapat digunakan untuk menjalankan 2 fungsi yaitu identifikasi dan sekuriti. Layanan self-service diwujudkan dengan sebuah perangkat Smart Self-Service Kiosk. Perangkat ini merupakan perpaduan dari: komputer, smartcard reader, terminal RFID, dan Self-Check-In Box. Dengan kartu anggota berbasis smartcard, keabsahan status anggota dapat diverifikasi dengan memasukkan kartu anggota ke smartcard-reader dan memasukkan PIN. Verifikasi dapat diperkuat dengan menggunakan sidik jari. Seluruh koleksi yang akan dipinjam akan diidentifikasi, tag di setiap koleksi akan diperbaharui dengan informasi peminjam, sehingga koleksi dapat melewati gerbang deteksi tanpa memicu alarm pencurian. Untuk mengembalikan koleksi tidak perlu menggunakan layanan loket, cukup memasukkan seluruh koleksi ke Self-Check In Box. Boks khusus ini akan otomatis mendeteksi koleksi dan identitas peminjam, serta memperbaharui database perpustakaan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 27.038.405.136,00 dari anggaran sebesar Rp 28.992.975.000,00 atau 93,26% dari target. Realisasi keuangan sebesar 93,26% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 140,29 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Layanan Kesehatan Masyarakat

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.23
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana
dan Layanan Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 RS, 5 Puskesmas, 1 Lab Kesda)	3 bh (23%)	5 bh (15%)	15,38%	102,53%	13 bh (100%)
2	Angka Harapan Hidup	76,58	76,67	76,58	99,88%	76,94
3	AKI/ 1.000 KH	187,5	135	0	200,00%	70
4	AKB/ 1.000 KH	15,63	15	10,66	128,93%	12,5
5	AKABA	0,63	0,16	0,1266	120,88%	0,135
6	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,31	0,22	129,03%	0,31
7	Angka Kesakitan DBD	130,93	<50	65,58	68,84%	<50
8	Angka Prevalensi Kasus TB	128,33	<106	119,85	86,93%	<101
9	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	<0,05%	0,02%	196%	<0,05%
10	Rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat	96%	96%	97,25%	101,30%	98%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					123,43%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 10 indikator, adapun 7 indikator melampaui target, dan 3 indikator masih berada dibawah target yaitu indikator angka harapan hidup, angka kesakitan DBD, dan angka prevalensi kasus TB. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 123,43%.

Capaian Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi (7 Rumah Sakit, 5 Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan Daerah)

Indikator sasaran yang pertama adalah Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi (7 Rumah sakit, 5 Puskesmas, dan 1 Laboratorium Kesehatan Daerah). Di tahun 2016, fasilitas pelayanan di Kota Magelang yang sudah terakreditasi ada 2 (dua), yaitu RSUD Tidar dan Laboratorium Kesehatan Daerah. Adapun 4 Puskesmas di Kota Magelang telah mengikuti penilaian akreditasi namun hasil penilaian baru diterima pada tahun 2017. Dua dari tiga belas fasilitas kesehatan telah terakreditasi sehingga diperoleh persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi di tahun 2016 sebesar 15,38%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2016 yaitu 15%, diperoleh capaian kinerja tahun 2016 sebesar 102,53%.

Dalam mencapai target indikator ini terdapat beberapa program pendukung, diantaranya:

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan alokasi anggaran Rp 3.779.147.000,00 dan realisasi anggaran Rp 2.142.133.893,00. Dengan program ini, kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas, laboratorium kesehatan dan rumah bersalin Paten dapat terpenuhi.
2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran Rp 720.030.000,00 dan realisasi anggaran Rp 490.529.854,00. Program ini mencakup pembinaan akreditasi bagi puskesmas dan laboratorium kesehatan daerah.
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD dengan alokasi anggaran Rp 11.635.359.000,00 dan realisasi anggaran Rp 7.581.008.505,00. Dengan status puskesmas di Kota Magelang yang sudah menjadi BLUD, puskesmas dapat mengelola keuangan sendiri sehingga puskesmas mampu memenuhi alat kesehatan, obat, serta sarana prasarana kesehatan sesuai kebutuhannya.

Berbagai kendala dalam memenuhi target adalah jumlah tenaga kesehatan yang belum merata di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Magelang, di mana jumlah dokter di puskesmas mengalami kekurangan karena beberapa dokter melanjutkan sekolah melalui tugas belajar sementara setelah dokter tersebut lulus harus dipindahkan ke fasilitas pelayanan yang lebih tinggi yaitu rumah sakit. Selain itu belum adanya tenaga apoteker di puskesmas yang berperan penting dalam analisa resep obat. Sesungguhnya kendala ini bisa tertangani bila puskesmas sudah bisa mengangkat pegawai BLUD sendiri, namun hal ini belum bisa terealisasi karena belum ada peraturan pemerintah yang mengaturnya.

Capaian Indikator Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok orang. Angka harapan hidup Kota Magelang di tahun 2016 adalah 76,58 sedikit

meningkat dari tahun 2015 yang sebesar 76,57. Bila dibandingkan dengan target tahun 2016 yang sebesar 76,67, capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 99,88%.

Dalam mencapai indikator Angka Harapan Hidup, terdapat beberapa program pendukung, diantaranya:

1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan alokasi anggaran Rp 10.350.000,00 dan realisasi anggaran Rp 10.350.000,00. Dengan dilaksanakannya program ini, pelayanan kesehatan khusus bagi penduduk miskin dapat termonitor dan terevaluasi.
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan alokasi anggaran Rp 836.831.000,00 dan realisasi anggaran Rp 685.309.320,00. Program ini penting dilaksanakan mengingat Kota Magelang terletak di lokasi yang strategis sehingga mudah sekali mendapatkan pengaruh dari luar termasuk penularan penyakit menular.
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp 17.462.868.000,00 dan realisasi anggaran Rp 14.024.200.530,00.
4. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dengan alokasi anggaran Rp 44.683.000,00 dan realisasi anggaran Rp 44.483.000,00. Program ini mencakup pemeriksaan makanan di restoran dan industri rumah tangga sehingga makanan hasil produksi yang beredar tidak membahayakan bagi kesehatan.
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dengan alokasi anggaran Rp 28.745.000,00 dan realisasi anggaran Rp 28.698.000,00. Program ini mencakup penyuluhan kesehatan bagi lansia dan kader kesehatan lansia guna meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan lansia, termasuk penyakit tidak menular dan degeneratif (jantung, stroke, kanker, diabetes melitus, dan lain-lain) yang sekarang menjadi penyebab utama kematian di dunia.
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan alokasi anggaran Rp 82.729.000,00 dan realisasi anggaran Rp 78.775.140,00. Program ini mencakup pemeriksaan sampel makanan jajanan anak sekolah dan jajanan menjelang hari raya serta pembinaan apotek dan industri rumah tangga.
7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran Rp 49.594.000,00 dan realisasi anggaran Rp 42.860.000,00. Program ini mencakup pertemuan koordinasi tingkat kelurahan dan tingkat kota guna membahas program pencegahan penyakit menular yang berkembang di masyarakat.

Kendala dalam pencapaian indikator Angka Harapan Hidup ini adalah :

1. Keadaan dunia global pada saat ini di mana makanan cepat saji telah menjamur di masyarakat sehingga masyarakat cenderung mengkonsumsi makanan yang berpengawet dan tidak sehat.
2. Selain itu volume kendaraan yang semakin meningkat menyebabkan meningkatnya polusi udara yang mengganggu kesehatan.

Solusi yang bisa dilakukan antaralain melalui:

- Promosi kesehatan terkait bahaya makanan dengan zat pengawet makanan yang berbahaya dan penerapan pola hidup bersih dan sehat;

Capaian Indikator AKI/ 1.000 KH

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, bukan karena sebab – sebab lain seperti kecelakaan atau kasus insidental. Angka Kematian Ibu (AKI)/*Maternal Mortality Rate (MMR)* yaitu jumlah kematian ibu maternal/wanita yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu per 100.000 Kelahiran Hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKI. AKI mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri.

Di tahun 2016 jumlah kelahiran hidup di Kota Magelang sebanyak 1.501 jiwa. Di tahun 2016 tidak ada kasus kematian ibu sehingga didapat Angka Kematian Ibu 0 (nol). Angka Kematian Ibu ini jauh mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang mencapai 187,5 per 100.000 kelahiran hidup dimana pada tahun 2015 terdapat 3 kasus kematian ibu.

Mengacu target SDG's 2016-2030 **AKI < 70 per 100.000 KH** adapun di Kota Magelang **0 per 100.000KH** artinya target SDG's telah dapat dicapai.

Program pendukung indikator ini adalah program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan alokasi anggaran Rp 492.307.000,00 dan realisasi anggaran Rp 363.189.200,00. Program ini mencakup penyuluhan pada ibu hamil, rapat pembahasan kematian ibu dengan tokoh masyarakat setempat serta kader kesehatan, penyuluhan pada dukun bayi agar tidak menolong persalinan dan audit maternal perinatal bagi tenaga kesehatan agar meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam menangani komplikasi kebidanan. Tingginya upaya seluruh sektor di masyarakat menyebabkan menurunnya angka kematian ibu yang cukup signifikan.

Kendala yang selama ini dihadapi dalam pencapaian target indikator AKI adalah masih ditemuinya ibu hamil di bawah umur dan dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu belum semua bidan di Kota Magelang memiliki sertifikat pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) yang sangat dianjurkan agar bidan mampu menolong persalinan secara tepat dan terampil.

Solusi koordinasi lintas sektor berkaitan dengan konseling dan edukasi kesehatan reproduksi remaja, penyelenggaraan pelatihan bagi bidan yang belum memiliki sertifikasi asuhan pelatihan normal.

Capaian Indikator AKB/ 1.000 KH

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0 – 11 bulan (termasuk neonatal). Angka Kematian Bayi (AKB)/*Infant Mortality Rate (IMR)* adalah jumlah kematian bayi (anak usia 0 - 11 bulan) di wilayah pada kurun waktu tertentu per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) di wilayah dan pada kurun waktu yang sama. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2016 terdapat kematian bayi sebanyak 16 kasus, 8 laki-laki dan 8 perempuan. Jumlah kelahiran hidup tahun 2016 sebanyak 1.501 jiwa sehingga diperoleh Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 10,66 per 1.000 kelahiran hidup. AKB tahun ini menurun dibanding tahun 2015 sebesar 15,63 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian bayi 25 orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 yang sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup, capaian kinerja indikator Angka Kematian Bayi cukup tinggi melebihi target yaitu 128,93%.

Mengacu target SDG's 2016-2030 **AKB < 12 per 1.000 KH** adapun di Kota Magelang **10,66 per 1.000 KH** artinya target SDG's telah dapat dicapai.

Kematian bayi sebagian besar disebabkan oleh BBLR dan kelahiran prematur. Kematian ini bisa dicegah bila ibu hamil mempersiapkan kehamilannya dengan baik serta senantiasa menjaga kehamilannya dengan baik. Tenaga kesehatan, kader, keluarga dan masyarakat harus berperan aktif dalam mengawal setiap ibu hamil di lingkungannya. Kematian ini juga bisa ditekan dengan mudahnya akses ibu hamil dengan tenaga kesehatan, meningkatnya fasilitas kesehatan yang modern, serta digiatkannya pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawat darurat dan komplikasi kebidanan.

Program utama yang mendukung tercapainya indikator Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp 492.307.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 363.189.200,00. Meskipun begitu program-program kesehatan yang lain juga secara tidak langsung mendukung penurunan AKB ini.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator AKB adalah partisipasi semua sektor dalam penurunan Angka Kematian Bayi perlu dioptimalkan. Upaya **solusi** yang bisa diambil melalui peningkatan koordinasi dan menggerakkan partisipasi dari semua sektor.

Capaian Indikator AKABA

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak balita (usia 12-59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan.

Di tahun 2016 terdapat kematian balita sebanyak 19 kasus, 10 laki-laki dan 9 perempuan. Jumlah kelahiran hidup tahun 2016 sebanyak 1.501 jiwa sehingga diperoleh Angka Kematian Balita



(AKABA) sebesar 12,66 per 1.000 kelahiran hidup. AKABA tahun ini menurun dibanding tahun 2015 yang sebesar 16,25 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian anak balita sebanyak 26 kasus. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 yang sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup, capaian kinerja indikator Angka Kematian Balita sangat baik yaitu 120,88%. Realisasi AKABA 2016 juga lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Mengacu target SDG's 2016-2030 **AKABA < 25 per 1.000 KH** adapun di Kota Magelang **12,66 per 1.000 KH** artinya target SDG's telah dapat dicapai.

Program utama yang mendukung tercapainya indikator Angka Kematian Balita (AKABA) adalah Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 89.903.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 80.415.400,00. Program ini mencakup pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita serta pengadaan sarana prasarana ruang laktasi yang sangat mendukung ibu menyusui dalam memberikan ASI secara eksklusif pada bayinya. Meskipun begitu program-program kesehatan yang lain juga secara tidak langsung mendukung penurunan AKABA ini.

Kendala dalam penurunan AKABA antara lain kurangnya kesadaran orang tua dalam membawa balitanya ke fasilitas pelayanan kesehatan secara rutin guna penimbangan dan deteksi dini tumbuh kembang. Masih rendahnya kesadaran ibu dan dukungan keluarga dalam memberikan ASI eksklusif pada bayinya juga berpengaruh terhadap kekebalan para balita terhadap berbagai penyakit. Selain itu belum semua fasilitas publik memiliki ruang laktasi yang bisa dimanfaatkan para ibu menyusui.

Solusi yang bisa diambil berupa penyelenggaraan promosi kesehatan terkait kesehatan balita dan tumbuh kembang balita, kampanye asi eksklusif, penyediaan pojok laktasi pada fasilitas publik.

Capaian Indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor).

Prevalensi Gizi Buruk adalah persentase balita penderita gizi buruk pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah balita yang ditimbang. Jumlah balita gizi buruk di Kota Magelang pada tahun 2016 sebanyak 15 anak dan jumlah balita ditimbang sebesar 6.781 anak sehingga diperoleh angka prevalensi gizi buruk sebesar 0,22%. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2015 dengan jumlah penderita gizi buruk sebanyak 17 anak dengan prevalensi gizi buruk sebesar 0,31%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2016 yang sebesar 0,31%, diperoleh angka capaian kinerja untuk indikator Prevalensi Gizi Buruk sebesar 129,03% karena semakin rendah prevalensi gizi buruk maka semakin baik kinerjanya.

Penyebab gizi buruk bukan semata-mata karena kurangnya asupan makanan balita. Penyakit penyerta juga menjadi penyebab gizi buruk, yaitu TB anak yang mengakibatkan penurunan kemampuan balita dalam menyerap gizi yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsinya.

Program utama pendukung indikator prevalensi gizi buruk adalah Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 174,547.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 151.489.456,00 serta Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 89.903.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 80.415.400,00. Melalui program tersebut, setiap balita gizi buruk dan gizi kurang memperoleh makanan tambahan dan vitamin secara rutin.

Kendala dalam pencapaian indikator ini adalah kurangnya kesadaran ibu dalam menimbangkan balitanya secara rutin. Penduduk miskin masih mengalami kendala dalam pemenuhan gizi seimbang bagi balitanya.

Solusi yang bisa diupayakan melalui pemberian PMTAS dan pemberian konseling gizi dan kesehatan balita.

Capaian Indikator Angka Kesakitan DBD

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti*. Seseorang disebut penderita DBD jika memenuhi sekurang-kurangnya 2 kriteria klinis dan 2 kriteria laboratorium. Kriteria klinis yaitu panas mendadak 2 – 7 hari tanpa sebab yang jelas, tanda-tanda perdarahan (sekurang – kurangnya uji Torniquet positif), pembesaran hati, serta syok. Kriteria laboratorium yaitu trombositopenia (trombosit \leq 100.000/ μ l) dan hematokrit naik $>$ 20%.

Angka Kesakitan DBD adalah jumlah penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) per 100.000 penduduk dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah penderita DBD di tahun 2016 sebanyak 87 penderita dengan jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil sebesar 132.662 jiwa sehingga diperoleh Angka Kesakitan DBD sebesar 65,58. Angka Kesakitan DBD tahun 2016 jauh menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 130,93. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 yang sebesar $<$ 50, capaian kinerja untuk indikator Angka Kesakitan DBD tahun 2016 sebesar 68,84% artinya target belum tercapai.

Program utama pendukung tercapainya indikator Angka Kesakitan DBD adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan alokasi anggaran sebesar Rp 836.831.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 685.309.320,00.

Permasalahan:

- Kota Magelang merupakan kota endemik demam berdarah mengingat Kota Magelang berada di kawasan perkotaan cukup padat penduduk, beriklim sejuk sehingga mudah dalam penularan DBD dan perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti*.

Solusi:

- Tingginya penderita DBD bisa dicegah dengan upaya menggerakkan masyarakat agar giat dalam melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk.
- Pemantauan jentik berkala secara rutin dilaksanakan oleh petugas pemantau jentik, dan memberdayakan kader kesehatan masyarakat.
- Promosi Kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat.



- Penyemprotan/fogging sarang nyamuk yang dilakukan pada daerah yang terdapat kasus DBD.

Capaian Indikator Angka Prevalensi Kasus TB

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Bakteri penyebab penyakit tuberkulosis paru mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam, oleh karena itu disebut juga sebagai Basil Tahan Asam (BTA).

Angka prevalensi kasus TB (Tuberculosis) adalah jumlah pasien TB yang ditemukan dan diobati per 100.000 penduduk dalam satu tahun. Jumlah penderita TB di Kota Magelang tahun 2016 adalah sebanyak 159 penderita dengan jumlah penduduk menurut Disdukcapil sebesar 132.662 sehingga diperoleh Angka Prevalensi Kasus TB sebesar 119,85. Angka prevalensi kasus TB di tahun 2016 menurun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 128,33. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 yang sebesar <106, capaian kinerja untuk indikator Angka Prevalensi Kasus TB adalah sebesar 86,93% artinya target belum tercapai.

Program utama pendukung pencapaian indikator Angka Prevalensi Kasus TB adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan alokasi anggaran sebesar Rp 836.831.000,00 dan realisasi anggaran Rp 685.309.320,00.

Kendala dalam penanggulangan kasus TB ini adalah cepatnya penularan TB sedangkan proses penyembuhannya membutuhkan waktu yang relatif lama dan harus dilakukan dengan pengawasan. Solusi untuk mengatasinya melalui memberikan motivasi dan edukasi tentang pentingnya peran keluarga dalam melakukan pengawasan meminum obat untuk penderita TB.

Capaian Indikator Angka Prevalensi HIV AIDS pada Penduduk Usia 15-49 Tahun

HIV/AIDS disebabkan oleh infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. *Human Immunodeficiency Virus* seseorang yang hasil pemeriksaannya HIV positif dengan pemeriksaan 3 test. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* dewasa bila terdapat 2 gejala mayor dan 1 gejala minor dan tidak ada sebab-sebab immunosupresi yang diketahui seperti kanker, malnutrisi berat atau etiologi lainnya. Kasus pada anak bila terdapat paling sedikit 2 gejala mayor dan minor dan tidak ada sebab-sebab immunosupresi yang diketahui seperti kanker, malnutrisi berat atau etiologi lainnya.

Angka Prevalensi HIV AIDS adalah persentase jumlah penderita baru HIV AIDS usia 15-49 tahun yang ditemukan selama satu tahun dibandingkan jumlah populasi kunci dalam wilayah dan kurun waktu yang sama. Jumlah penderita baru HIV AIDS di Kota Magelang di tahun 2016 adalah sebanyak 16 penderita dengan jumlah penduduk usia 15-49 tahun menurut data Disdukcapil sebesar 70.716 jiwa sehingga diperoleh Angka Prevalensi HIV AIDS sebesar 0,02%. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 0.04%. Jika dibandingkan dengan target tahun



2016 yang sebesar <0,05% diperoleh capaian kinerja untuk indikator Angka Prevalensi HIV AIDS sebesar 196%.

Program utama pendukung pencapaian indikator Angka Prevalensi HIV AIDS adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dengan alokasi anggaran Rp 836.831.000,00 dan realisasi anggaran Rp 685.309.320,00. Kegiatan pemeriksaan VCT rutin dilakukan guna menemukan kasus HIV AIDS agar cepat tertangani. WPA (Warga Peduli AIDS) juga telah terbentuk sehingga peran serta masyarakat dalam penanggulangan HIV AIDS semakin terlihat.

Kendala dalam penurunan Angka Prevalensi HIV AIDS ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya seks bebas dan narkoba. Apalagi di era digital saat ini makin mudah informasi berbau pornografi dan pergaulan bebas merebak di masyarakat.

Upaya solusi yang dapat diambil dengan penyuluhan secara rutin bagi masyarakat rentan terutama remaja tentang pencegahan HIV AIDS.

Capaian Indikator Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Rumah tangga ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) adalah rumah tangga yang seluruh anggota keluarganya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi 10 indikator, yaitu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, bayi diberi ASI eksklusif, balita ditimbang setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah sekali seminggu, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah.

Jumlah rumah tangga yang diperiksa berkenaan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di tahun 2016 adalah sebanyak 31.081 rumah tangga, sedangkan yang memenuhi syarat berperilaku hidup bersih dan sehat sebanyak 30.226 rumah tangga sehingga diperoleh Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebesar 97,25%. Angka ini naik dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 95,94%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 yang sebesar 96%, capaian kinerja untuk indikator Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat di tahun 2016 adalah 101,30%.

Program utama pendukung indikator Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat antara lain Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.602.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 73.359.000,00 serta Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 713.084.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 688.174.441,00. Program-program tersebut mencakup pemeriksaan sekaligus pembinaan pada masyarakat tentang rumah sehat, perilaku hidup bersih sehat, serta lingkungan tempat-tempat umum sehat.

Kendala yang memang masih sulit diatasi adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok. Meskipun merokok tidak dilakukan di dalam rumah, tetap saja dampaknya sangat buruk bagi kesehatan. **Solusi** berupa sosialisasi melalui berbagai media terkait bahaya merokok.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 27.170.285.059,00 dari anggaran sebesar Rp 37.030.610.000,00 atau 73,37% dari target. Realisasi keuangan sebesar 73,37% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 123,43%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.24
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Indeks Pencemaran Air	68,9	75,6	36,25	47,95%	76,84
2	Indeks Pencemaran Udara	45,3	50,11	58,24	116,22%	79,1
3	Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	48,29	54,03	111,89%	49,56
4	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	160,58	160,58	240,40	50,29%	136,17
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					81,59%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 4 indikator, adapun realisasi kinerja 2 indikator melampaui target dan 2 indikator masih berada di bawah target. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 81,59 %.

Capaian Indikator Indeks Pencemaran Air

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup

Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang secara rutin melakukan monitoring kualitas air dan pengambilan sampel di wilayah administrasi Kota Magelang. Pada saat ini sesuai anggaran tahun 2016, pemerintah kota menganggarkan biaya untuk program pemantauan kualitas air yang dilakukan di sungai yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo. Penentuan titik lokasi (stasiun) tahun ini terbagi menjadi 10 (sepuluh) titik yang terbagi menjadi 5 (lima) titik pemantauan yaitu bagian yang mewakili hulu, tengah, hilir dan 5 (lima) titik pemantauan pada Sungai Elo. Frekuensi pengambilan sampel dilakukan 2 kali yaitu bulan April (mewakili musim kemarau) dan bulan September (mewakili musim hujan).

Parameter pencemar air sungai yang lebih dominan sebagai indikator pencemar air pada sungai-sungai di Propinsi Jawa Tengah adalah parameter biologis yaitu kandungan bakteri Coliform dan Colitinja, untuk kandungan logam-logam berat seperti timbal (Pb), Nitrit (NO₂), Merkuri (Hg) dan

BOD, DO, COD, TSS, sudah dalam batas maksimum yang dipersyaratkan bahkan dibagian hilir sudah melebihi batas baku mutu lingkungan.

Dari penghitungan indikator IPA (Indeks Pencemaran Air) untuk tahun 2016 capaian kinerja berada pada angka 47,95 % dimana realisasi 36,25% dibanding target 2016 sebesar 75,6%, artinya target kinerja belum tercapai dan sangat jauh dari angka yang diharapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 68,9% realisasi IPA 2016 juga masih jauh berada di bawah target.

Kinerja indikator IPA (Indeks Pencemaran Air) belum memuaskan karena terdapat kendala Kualitas air sungai sangat fluktuatif tergantung dari faktor internal dan eksternal, penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Faktor internal berasal dari adanya aktifitas manusia di bidang industri, pertanian, peternakan dan sebagainya yang membuang limbah langsung ke perairan umum tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu sehingga mempengaruhi kualitas air sungai.
 - a. Limbah domestik, terutama dihasilkan oleh masyarakat yaitu dari tempat tinggal mereka, terdiri dari :
 - Buangan manusia (tinja dan urin), limbah cair ini disebut sebagai “black water”
 - Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga seperti mencuci, mandi, memasak, membersihkan dan sejenisnya dimasukkan ke dalam kelompok “gray water”
 - Limbah cair yang dihasilkan dari perkantoran, hotel, kawasan komersial dan sumber pencemar lainnya yang bukan kelompok industri.
 - b. Limbah cair industri – *efluen* yang dikeluarkan dari berbagai industri dan industri pengolahan yang berada di sepanjang Sungai Progo. Sungai sebagai pemasok air juga berfungsi sebagai penampung limbah cair. Peningkatan rencana tata guna lahan dan peningkatan peruntukan kawasan dimaksudkan untuk mendorong industri-industri besar untuk ditempatkan sejauh mungkin dari sumber air. Limbah cair dari industri memberikan kontribusi terhadap pencemaran sungai di bagian hilir.
 - c. Pencemaran dari limbah pertanian sangat signifikan pada musim hujan dimana larian membawa sejumlah besar lapisan permukaan tanah, unsur hara dan bahan organik dari lahan padi dan lahan lainnya di sekitar sungai. Bersamaan dengan itu aliran sungai sangat cepat, sebagai konsekuensinya oksigen terlarut DO (Dissolved Oxygen) rendah dan pemulihan kondisi air tinggi sehingga menurunkan kualitas air. Pada musim kemarau pencemaran air dari lahan pertanian masih terjadi di sungai melalui aliran balik dari saluran dan drainase irigasi, tetapi pada saat puncak musim kemarau hal ini hampir tidak terjadi. Tidak seluruh saluran irigasi menggunakan saluran yang diperkeras (pasangan) menyebabkan erosi tanah turut memperburuk buangan ke badan sungai. Penggunaan pupuk yang tidak terkontrol juga akan menyebabkan terjadinya beban berlebihan nutrisi di badan sungai.

- Aktivitas pertanian memberikan kontribusi ke polusi air melalui :
- Adanya limpasan tanah dan sedimen
 - Nutrien-nutrien
 - Material tanaman dan organik
 - Limbah dari peternakan
- d. Buangan limbah dari rumah pemotongan hewan, yang pembuangannya disalurkan langsung ke badan air menyebabkan tingginya beban BOD. Di wilayah Kota Magelang terdapat rumah pemotongan hewan yang belum memiliki pengolahan limbah yang berfungsi dengan maksimal, menyumbang minyak, lemak serta bakteri-bakteri *patogen* di badan air sehingga beban BOD sungai di penggalan sungai ini cukup tinggi.
- e. Limbah cair lainnya meliputi limbah yang berasal dari rumah sakit, hotel, sekolah, supermarket dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan masyarakat dan home industri serta perkembangan fasilitas Kota secara cepat telah mencemari Sungai Progo di bagian hilir.
- f. Kegiatan masyarakat yang menghasilkan limbah cair telah menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Progo, hal ini terjadi karena tidak adanya sistem pengolahan air limbah secara terpadu di Wilayah Sungai Progo dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan. Pembuangan dari limbah padat juga menyumbang material-material yang menambah cemaran air di bagian hilir. Tempat pembuangan akhir yang dekat dengan badan sungai juga diprediksi akan mencemari badan air dari air lindi / *leachate*-nya. Pembuangan-pembuangan ilegal lain juga turut menyumbang pencemaran air, walaupun memang sulit dikuantifikasi.
- 2) Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah adanya perubahan iklim, curah hujan, bencana alam dsb yang juga berpengaruh terhadap kualitas air sungai.
- a. Tahun 2016 adalah tahun dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Tingginya curah hujan sangat mempengaruhi laju infiltrasi air tersebut kedalam tanah. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran air sungai dengan semakin cepat dan semakin banyaknya bakteri coli mengikuti limpasan air hujan menuju sungai. Disamping itu perilaku masyarakat yang masih membuang tinja baik manusia ataupun hewan ke sungai mengakibatkan timbul dan terindikasinya bakteri coli di sungai.
- b. Obyek data yang dijadikan sebagai sumber IPA (Indeks Pencemaran Air) adalah 4 sungai yang melewati Kota Magelang yaitu Sungai Progo, sungai Elo, Kali Bening dan Kali Manggis. Pengelolaan Sungai Progo dan Sungai Elo yang berhulu di kabupaten Temanggung berada pada kewenangan pemerintah pusat sedangkan pengelolaan kali Bening dan Kali Manggis yang berhulu di Kabupaten Magelang kewenangannya berada pada Provinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melewati batas administratif wilayah yang berbeda maka kualitas air sungai akan terpengaruh oleh daerah lain di sekitarnya meskipun obyek pemantauan dalam hal ini sungai yang melewati wilayah kota Magelang telah melakukan upaya pengendalian lingkungan. Dengan adanya pengaruh kewilayahan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan lingkungan tidak bisa diselesaikan dengan batasan administratif wilayah tapi harus dengan batasan *ekologis*.

Artinya apabila pencemaran di daerah hulu tidak tertangani dengan baik pasti akan mengakibatkan pengelolaan dan pengendalian pencemaran akan menjadi tidak optimal.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun-tahun selanjutnya antara lain dengan:

- 1) Melakukan monitoring terhadap Industri yang membuang limbahnya ke sungai perlu memperbaiki kualitas limbah cairnya dengan mengupayakan semaksimal mungkin dalam pengolahan limbah cairnya (IPAL) sebelum dibuang ke badan air (sungai) sekitar.
- 2) Melakukan monitoring IPAL dari industri-industri sekitar kawasan sungai baik Sungai Progo dan Sungai Elo maupun anak-anak sungainya yang sudah ada harus dioperasikan secara periodik dengan menjamin kualitas limbahnya sudah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sehingga tidak merusak ekosistem sungai, dan kualitas air sungai itu sendiri.
- 3) Melaksanakan Program analisa air sungai sebagai salah satu instrument dari Program Kali Bersih (PROKASIH) perlu dilakukan setiap tahun sehingga bisa mengetahui kondisi pencemaran air sungai di Kota Magelang.
- 4) Pembuatan kebijakan dan program prioritas pengelolaan lingkungan hidup harus selalu berprinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Mengingat semakin kritisnya ketersediaan air untuk keperluan manusia memerlukan pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air terpadu (*one management for one watershed*) dengan Pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan konservasi sumber daya air, disamping upaya penghematan air secara sungguh-sungguh, serta memulihkan kondisi dan kualitas Air Sungai Progo dan Sungai Elo yang dirasa sudah semakin menurun kualitasnya maka dapat dilakukan upaya pemulihan, antara lain (1) melalui pembuatan IPAL domestik bagi permukiman-permukiman (IPAL Komunal), (2) Konservasi air sungai (3) pencegahan pencemaran lingkungan dengan pemantauan kualitas industri-industri di sekitar wilayah Kota Magelang , (4) penegakan hukum lingkungan melalui kerja sama antar pemangku kepentingan di semua tingkatan.
- 6) Mengendalikan pencemaran air yang efektif sesuai dengan baku mutu air dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran air serta mengendalikan secara terpadu daya rusak air.
- 7) Menerapkan prinsip-prinsip pencemar dan atau perusak lingkungan hidup yang bertanggung jawab, serta mekanisme insentif dan disentif dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- 8) Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, pentaatan dan penegakan hukum termasuk instrument alternatif serta upaya rehabilitasi lingkungan hidup.
- 9) Meningkatkan peran antar individu, kelompok-kelompok masyarakat, dan jejaring dalam pengendalian dampak lingkungan.

- 10) Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam melakukan inisiatif dan inovasi di bidang pelestarian lingkungan, antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan lingkungan sejak dini serta peningkatan kegiatan riset dan pengembangan.
- 11) Mengembangkan dan menguatkan kelembagaan lingkungan hidup, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, di semua tingkatan untuk pelestarian fungsi lingkungan.
- 12) Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, antara lain melalui penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial korporasi (*Corporate Social Responsibility*) dan tanggung gugat korporasi (*Corporate Accountability*).
- 13) Meningkatkan keikutsertaan dan peran aktif semua pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup global tanpa mengabaikan kepentingan pengelolaan lingkungan hidup lokal dan nasional.
- 14) Meningkatkan pengetahuan masyarakat sekitar DAS Progo tentang sungai dan air tanah, baik dari segi kualitas dan kuantitas sungai dan air tanah dan Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan etika berbudaya ramah lingkungan termasuk didalamnya budaya tidak membuang sampah di sungai.
- 15) Daerah hulu Sungai Progo dan Sungai Elo diusahakan dipertahankan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Daerah tengah direkomendasikan dengan mempertahankan tanaman bambu dan penanaman tanaman keras, menambah daerah resapan serta vegetasi untuk menahan erosi dan tebing sungai serta meningkatkan suplai air tanah dan mengurangi tingkat pencemaran.
- 16) Meningkatkan kearifan terhadap lingkungan (khususnya sungai) kepada masyarakat sejak dini dan mengembangkan budaya bersih sungai sehingga kualitas, kebersihan dan keindahan sungai selalu terjaga selama lamanya.
- 17) Mengembangkan perencanaan perlindungan badan air (khususnya sungai) secara komprehensif dan terarah dari hulu sampai hilir sebagai satu kesatuan ekologis.
- 18) Dibentuk sekretariat bersama untuk menangani masalah lingkungan di DAS Progo dan DAS Elo.

Capaian Indikator Indeks Pencemaran Udara

Indeks Pencemaran Udara (IPU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IPU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IPU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu (SO_2) dan NO_2 . Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IPU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.

Kualitas udara, terutama di daerah perkotaan, sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Kendaraan bermotor memberikan kontribusi sebagai penyebab pencemaran SO_2 dan NO_2 . Sebagian SO_2 akan diubah menjadi SO_3 setelah berada di atmosfer, oleh proses-proses fotolitik dan katalitik. Jumlah SO_2 yang teroksidasi menjadi SO_3 dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk jumlah air yang tersedia, intensitas, waktu dan distribusi spektrum sinar

matahari, dan jumlah bahan katalik. Pada malam hari atau pada kondisi lembab atau selama hujan, SO₂ atmosfer diabsorpsi oleh droplet air alkalin dan bereaksi pada kecepatan tertentu untuk membentuk sulfat di dalam droplet.

Nitrogen oksida (NO_x) adalah senyawa gas yang terdapat di udara bebas (atmosfer) yang sebagian besar terdiri atas nitrit oksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO₂) serta berbagai jenis oksida dalam jumlah yang lebih sedikit. Kedua macam gas tersebut mempunyai sifat yang sangat berbeda dan keduanya sangat berbahaya bagi kesehatan. Gas NO yang mencemari udara secara visual sulit diamati karena gas tersebut tidak bewarna dan tidak berbau. Sedangkan gas NO₂ bila mencemari udara mudah diamati dari baunya yang sangat menyengat dan warnanya merah kecoklatan. Sifat Racun (toksisitas) gas NO₂ empat kali lebih kuat dari pada toksisitas gas NO. Organ tubuh yang paling peka terhadap pencemaran gas NO₂ adalah paru-paru. Paru-paru yang terkontaminasi oleh gas NO₂ akan membengkak sehingga penderita sulit bernafas yang dapat mengakibatkan kematiannya.

Kadar NO_x di udara daerah perkotaan yang berpenduduk padat akan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan karena berbagai macam kegiatan manusia akan menunjang pembentukan NO_x, misalnya transportasi, generator pembangkit listrik, pembuangan sampah, dan lain-lain. Namun, pencemar utama NO_x berasal dari gas buangan hasil pembakaran bahan bakar gas alam.

Udara yang mengandung gas NO dalam batas normal relatif aman dan tidak berbahaya, kecuali bila gas NO yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf yang menyebabkan kejang-kejang. Bila keracunan ini terus berlanjut akan dapat menyebabkan kelumpuhan. Gas NO akan menjadi lebih berbahaya apabila gas itu teroksidasi oleh oksigen sehingga menjadi gas NO₂. Di udara nitrogen monoksida (NO) teroksidasi sangat cepat membentuk nitrogen dioksida (NO₂) yang pada akhirnya nitrogen dioksida (NO₂) teroksidasi secara fotokimia menjadi nitrat.

Dari pemantauan kualitas udara yang dilakukan di Kota Magelang didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 3.25
Menghitung Indeks Pencemaran Udara

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO ₂	30,96	40,00	0,7741
SO ₂	18,59	20,00	0,9294
Rata-rata			0,8515
Indeks Udara			58,24

Dari penghitungan indikator Indeks Pencemaran Udara (IPU) tahun 2016 diperoleh realisasi sebesar 58,24 dari target yang ditetapkan sebesar 50,11 dengan capaian kinerja sebesar 116,22%. Dengan demikian target untuk indikator IPU melampaui target yang ditetapkan artinya kualitas udara di Kota Magelang untuk saat ini masih relatif bagus dan belum melebihi dari baku mutu yang telah ditentukan. Realisasi indeks pencemaran udara tahun 2016 lebih tinggi 12,94 poin apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 45,3.

Dari perhitungan IPU menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Magelang relatif semakin baik dan memenuhi baku mutu udara dengan indeks pencemaran udara yang rendah. Sebagai informasi, semakin besar angka Indeks Kualitas Udara menunjukkan kualitas udara yang semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Magelang menjadi prioritas dan konsisten dalam mempertahankan eksisting luasan Ruang Terbuka Hijau sehingga dapat mengimbangi kecenderungan meningkatnya konsentrasi polutan udara. Kualitas udara di Kota Magelang akan makin bermasalah jika ruang terbuka hijau justru makin terkikis. Tiap satu hektar ruang terbuka hijau dapat menyediakan 0,6 ton oksigen yang setara dengan kebutuhan 1.500 orang.

Di samping itu, juga semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam menaati persyaratan teknis pencegahan pencemaran udara. Ini tak lepas dari pembinaan dan pemantauan kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan. Selain itu Indeks Pencemaran Udara tercapai juga didukung oleh kondisi kawasan Kota Magelang yang sebagai kota jasa, sehingga hanya sedikit industri sebagai sumber pencemar udara yang melakukan kegiatan di wilayah Kota Magelang. Emisi udara yang berasal dari sumber tidak bergerak (cerobong) hanya berasal dari satu industri yaitu industri pengolahan kayu.

Kendala kedepan dalam penanganan pencemaran udara adalah pengelolaan emisi dari kendaraan bermotor dan kegiatan emisi udara dari kegiatan industri UMKM khususnya industri tahu.

Upaya solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengintensifkan kerjasama dengan OPD terkait, khususnya Dinas Perhubungan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka mengurangi pencemaran udara bersumber dari kendaraan bermotor dan industri.

Capaian Indikator Indeks Tutupan Vegetasi

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Magelang tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan/vegetasi menggunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga untuk penghitungan ITH di Kota Magelang didapatkan data sebagai berikut :

Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Luas Tutupan Hutan (km ²)	Indeks Tutupan Hutan
131.703 jiwa	18,12	6,23	54,03

Dari penghitungan Indeks Tutupan Vegetasi untuk indikator Indeks Tutupan Vegetasi (ITH) dengan capaian kinerja sekitar 111,8% dimana realisasinya 54,03 dibanding target 2016 sebesar 48,29. Sehingga untuk target pencapaian indikator ITH melampaui target. Realisasi indeks



tutupan hutan tahun 2016 lebih tinggi 5,87 poin apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 48,16.

Indikator Tutupan Lahan ini bisa tercapai karena dari tutupan vegetasi dengan hitungan Ruang terbuka Hijau untuk RTH publik dan privat juga meningkat. Pemerintah Kota Magelang sangat konsisten untuk mempertahankan eksisting luasan Ruang Terbuka Hijau sehingga juga menambah tutupan vegetasi. Tutupan vegetasi semakin bertambah luas maka fungsi tutupan vegetasi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah juga semakin besar sehingga indeks tutupan vegetasi akan semakin tinggi.

Capaian Indikator Volume Sampah yang Dibuang ke TPSA

Dari penghitungan indikator volume sampah yang dibuang ke TPSA didapatkan data realisasi sebesar 240,4 m³/hari dibanding target tahun 2016 sebesar 160,58 m³/hari sehingga capaian kinerjanya sebesar 50,29% masih berada di bawah target. Apabila realisasi 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 160,58 m³/hari kinerja indikator juga masih berada di bawah target.

Besarnya beban volume sampah tidak terlepas dari minimnya pengelolaan sampah dari sumber penghasil dan di tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Baru sekitar 2% atau sekitar 8,57 m³/hari sampah yang berkurang dari sumbernya yang didaur ulang atau dibuat kompos. Sementara itu, sisanya sekitar 86% dibuang begitu saja tanpa pengolahan ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Sedangkan 12% ada pengurangan di TPS. Tak heran bila sampah akan menumpuk di TPA. Akibatnya, daya tampung TPA akan menjadi cepat terpenuhi. Besarnya volume sampah di TPA juga mempengaruhi biaya pengelolaan sampah menjadi semakin tinggi.

Pemilahan sampah mestinya sudah harus dilakukan sejak berada di sumber sampah. Sampah yang sudah terpilah mestinya dapat dimanfaatkan sesuai dengan jenisnya. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi tentunya dapat dimanfaatkan kembali menjadi sumber pendapatan, sedangkan material organik dapat dilakukan fermentasi menjadi kompos bahkan biogas, sedangkan yang dipandang sebagai residu dapat diangkut oleh petugas kebersihan. Sehingga jumlah sampah yang dibawa ke TPA menjadi semakin sedikit. Namun demikian karena masih kurang sadarnya masyarakat, pemilahan sampah belum banyak dilakukan. Ada pula sebagian kecil masyarakat yang sudah memilah sampahnya, namun ketika dilakukan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan tercampur kembali.

Upaya Pemerintah Daerah dalam mengedukasi masyarakat sudah banyak dilakukan. Sudah banyak trigger untuk masyarakat seperti program Bank Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup, program TPS 3-R dari Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pengembangan Kampung Organik oleh Pemerintah Kota Magelang.

Kendala terkait dengan pengelolaan sampah diantaranya adalah:

1. Hingga saat ini program pengurangan dan penanganan sampah baik berbasis masyarakat maupun komunitas belum membawa hasil yang signifikan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan volume sampah dari sumbernya masih perlu ditingkatkan.
2. Masyarakat belum begitu paham akan kondisi “darurat sampah” yang tengah menyelimuti permasalahan sampah di Kota Magelang.
3. Pengelolaan sampah TPST 3R yang berada di Kota Magelang belum optimal, dengan keberadaan 3 unit TPST 3R bisa dioptimalkan untuk mengurangi volume sampah sebelum dibuang ke TPSA.

Upaya solusi mengatasi permasalahan :

1. Pemerintah Kota Magelang dalam hal ini harus benar-benar bekerja keras dalam melakukan berbagai macam terobosan program untuk menangani permasalahan sampah, dengan bersinergi dengan lintas sektor.
2. Sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder baik perorangan, kelompok, swasta ataupun pemerintah untuk mengetahui kondisi riil permasalahan sampah di Kota Magelang yang sudah memasuki masa “darurat sampah”. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam penanganan sampah di mulai dari sumbernya. Sehingga diharapkan permasalahan sampah di Kota Magelang bisa tertangani dan terkelola dengan baik.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.439.105.900,00 dari anggaran sebesar Rp 2.025.738.000,00 atau 71,04% dari target. Realisasi keuangan sebesar 71,04% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 81,59%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

4. Sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau

Salah satu komponen dari ruang publik adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Untuk menambah RTH menjadi persoalan sulit yang dihadapi Pemerintah Kota Magelang karena keterbatasan lahan. Sehingga memerlukan strategi yang lebih kreatif dalam menambah luasan RTH, salah satunya dengan melirik potensi RTH privat. Selain itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan kota hijau.

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.26
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau					
	a. Privat	10%	10%	19,11%	191,10%	10%
	b. Publik	18,37%	18,37%	19,61%	106,75%	18,50%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					148,93%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator, yang dijabarkan menjadi 2 sub indikator. Realisasi untuk masing-masing sub indikator telah melampaui target. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 148,93%.

Capaian Indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau

- a. Privat
- b. Publik

Penataan ruang yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian manfaat ruang sudah sewajarnya menjadi pertimbangan utama dalam perkembangan suatu kota. Bisa dijelaskan bahwa suatu kota tidak akan bisa lepas dari perkembangan dan penataan ruangnya. Namun, persoalan yang saat ini berkembang dan meluas adalah keberadaan ruang yang tersedia tidak sepenuhnya mendukung pola kegiatan masyarakatnya. Khususnya dalam hal ini adalah penataan taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota. Saat ini di Indonesia, penataan taman kota merupakan satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan kota. Selain fungsinya sebagai penghasil kualitas udara, taman kota juga berfungsi sebagai estetika ruang. Diharapkan Ruang Terbuka Hijau juga dapat mendukung keindahan suatu kota. Termasuk di dalam RTH, mempunyai fungsi antara lain sebagai peneduh, penunjuk arah dan juga keindahan.

Sedangkan ruang publik mendapatkan proporsi luasan yang lebih kecil dalam penataan ruang. Oleh karena itu, perlu diatur secara ketat pengendalian fungsinya. Perubahan peruntukan ruang publik dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur konsistensi pelaksanaan Perda Tata Ruang. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Magelang sangat memperhatikan pengendalian tata ruang dimana setiap perijinan pemanfaatan ruang harus betul-betul sesuai dengan RTRW sehingga perubahan peruntukan ruang, khususnya ruang publik dapat direduksi. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada ruang publik yang beralih fungsi selama tahun 2014.

Dengan tepenuhnya RTH sebesar 30 persen di perkotaan diharapkan akan terwujud ruang publik yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sehingga diperlukan dukungan dari masyarakat bersama Pemerintah Daerah untuk bersama-sama melaksanakan dan menyediakan RTH privat.



Untuk **indikator RTH Privat** pada tahun 2016 Pemerintah Kota Magelang menargetkan dapat menyediakan luasan RTH sebesar 10% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Sampai pada tahun 2016, realisasi di Kota Magelang telah mencapai 19,11%. Apabila realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi 2015 sebesar 10% maka realisasi tahun 2016 jauh lebih tinggi 9,11 poin.

Realisasi Ruang Terbuka Hijau Privat bisa melampaui target karena masih banyak rumah warga maupun kantor-swasta yang memiliki halaman luas sehingga bisa menambah ketersediaan ruang terbuka hijau privat di Kota Magelang. Persentase ini telah melampaui target UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan luas RTH Privat 10% dari luas wilayah.

Penyediaan RTH publik bukan merupakan hal yang mudah untuk suatu kabupaten/kota. Target **indikator RTH Publik** tahun 2016 ditetapkan sebesar 18,37 % dan terealisasi sebesar 19,61% dengan capaian kinerja sebesar 106,75%. Hal ini menunjukkan bahwa pada indikator ketersediaan RTH publik Kota Magelang telah melampaui target yang ditetapkan. Apabila realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi 2015 sebesar 18,37% maka realisasi tahun 2016 jauh lebih tinggi 1,24 poin.

Tercapainya target kinerja ini diperoleh setelah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menanam pohon peneduh di beberapa ruas jalan protokol untuk menambah paru-paru kota dan mengurangi polusi udara.
- 2) Menerima pengalihan fasum/fasos dari Taman Senopati Residence yang semula milik privat menjadi milik Pemerintah Kota beserta perawatannya.
- 3) Alih fungsi lahan di Jl. Majapahit, yang semula digunakan untuk lahan PKL berhasil dialihkan menjadi Taman Kota dengan relokasi PKL yang ada.

Beberapa kesimpulan terkait dengan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang, sebagai berikut :

- 1) Prosentasi luas RTH Kota Magelang saat ini sebesar 19,37 % dan belum mencapai standard sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu 20% RTH Publik.
- 2) Besaran RTH tidak hanya ditentukan dari luas ataupun persentase, namun juga berdasarkan kualitasnya, sehingga dalam penentuan RTH persentase bukan satu-satunya indikator penentu.
- 3) Pencapaian RTH Kota Magelang yang belum mencapai 20% bisa disiasati dengan peningkatan kualitas RTH karena pertimbangan kebutuhan ruang di Kota Magelang yang semakin tinggi sementara luasan administrasi tetap
- 4) Konsep RTH bukan semata-mata untuk menghijaukan kota saja, namun yang lebih penting kota menjadi ramah lingkungan dan nyaman bagi masyarakatnya.

Upaya-paya yang dilakukan untuk menambah dan menjaga Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang antara lain:

- 1) Mensinergikan peran aktif masyarakat dan Pemerintah Daerah serta OPD terkait untuk meningkatkan RTH baik kuantitas maupun kualitasnya.
- 2) Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta dalam hal ini perkantoran, sekolah dan fasilitas lainnya untuk mengelola ruang terbukanya secara kolektif dan seimbang guna meningkatkan kualitas lingkungan.
- 4) Penataan RTH harus mengoptimalkan pemeliharaan dan pembangunan taman pulau jalan dan taman median jalan dan jalur pejalan kaki dengan pemilihan pohon yang tepat baik secara jenis pohon maupun fungsinya.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 5.333.661.559,00 dari anggaran sebesar Rp 5.738.398.000,00 atau 93,30% dari target. Realisasi keuangan sebesar 93,30% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 148,93%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

5. Sasaran Terwujudnya Sistem Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana

Sasaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem penanganan bencana melalui upaya pencegahan, peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kemampuan dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penanggulangan kejadian bencana yang terjadi di Kota Magelang.

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.27
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Sistem Pencegahan,
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	1,29%	3,98%	3,09%	77,64%	17,48%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator, adapun realisasi masih di bawah target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 77,64 %.

Capaian Indikator Cakupan Masyarakat yang Paham Mitigasi Bencana

Hasil evaluasi capaian kinerja terhadap Indikator Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana mendapatkan nilai sebesar 77,68%. Indikator pada sasaran tersebut adalah jumlah penduduk Kota Magelang yang mendapatkan informasi bencana dimana pada tahun 2016 masih belum memenuhi target yang ditetapkan, namun apabila dihadapkan pada realisasi tahun 2015 sudah menunjukkan kenaikan sebesar 20,59% dengan jumlah 350 orang.

Dengan pemahaman mitigasi bencana upaya pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana akan dapat didorong dan terbentuk di salah satu kelurahan di Kota Magelang pada tahun 2017 dengan kriteria pratama.

Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Dalam Destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan.

Gambar 3.9
Pelatihan dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana



Tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi Pengurangan Resiko Bencana.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi Pengurangan Resiko Bencana.

5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam Pengurangan Resiko Bencana, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Permasalahan:

1. Belum terbentuknya BPBD sehingga penanganan bencana dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengurangan resiko bencana kurang optimal;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan kejadian bencana yang terjadi.

Solusi:

1. Mengoptimalkan fungsi koordinasi penanganan dan penanggulangan bencana yang melibatkan lintas OPD sesuai tugas dan fungsinya.
2. Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengurangan resiko bencana.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 123.558.000,00 dari anggaran sebesar Rp 124.758.000,00 atau 99,04% dari target. Realisasi keuangan sebesar 99,04% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 77,64 %, maka belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

6. Sasaran Pemanfaatan Lahan Berkelanjutan Sesuai Regulasi Tata Ruang

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.28
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemanfaatan Lahan Berkelanjutan
Sesuai Regulasi Tata Ruang

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan	22%	23%	23,84%	103,65%	33%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator, adapun realisasi 1 indikator tersebut telah melampaui target. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 103,65%.

Capaian Indikator Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

1. Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.

2. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.
3. Pelestarian/pemugaran.

Indikator rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan di Kota Magelang dengan capaian kinerja sebesar 23,84% melebihi target yang ditetapkan sebesar 23%, berdasarkan data dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terjadi peningkatan tiap tahunnya, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.29
Data Jumlah Bangunan Ber IMB

Data Jumlah Bangunan								
2014			2015			2016		
Ber IMB	Total bangunan	%	Ber IMB	Total bangunan	%	Ber IMB	Total bangunan	%
7.900	35.000	22,57	8.100	35.132	23,06	8.404	35.255	23,84

Indikator tersebut diatas didapat dari jumlah gedung/bangunan yang memiliki IMB dibagi dengan jumlah seluruh gedung/bangunan di Kota Magelang, rendahnya jumlah bangunan ber IMB disebabkan oleh:

1. Laju pembangunan di masyarakat yang pesat tidak disertai dengan kesadaran untuk mengurus IMB.
2. Biaya untuk memperoleh IMB masih dirasakan mahal oleh sebagian masyarakat sehingga mereka enggan untuk mengurus IMB.
3. Banyaknya bangunan liar disepanjang sempadan irigasi maupun sungai yang sudah terbangun sejak lama.
4. Terdapat beberapa bangunan yang tanahnya belum bersertifikat.
5. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang terutama oleh pemangku wilayah belum optimal.
6. Personil yang mengurus dan sarana dan prasarana untuk mendukung proses IMB masih terbatas.

Beberapa **solusi** untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB antara lain:

1. Sosialisasi terkait Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung di tiap kecamatan.
2. Adanya kegiatan pemutihan pegurusan IMB bagi rumah yang belum ber-IMB.
3. Memanfaatkan media reklame maupun papan informasi yang tersedia untuk sosialisasi peningkatan kesadaran mengurus IMB.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 95.073.950,00 dari anggaran sebesar Rp 97.264.000,00 atau 97,75% dari target. Realisasi keuangan sebesar 97,75% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 103,65%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 3**1. Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana dan Sarana Dasar Yang Berkeadilan dan Sesuai Rasio Kebutuhan Masyarakat**

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana dan Sarana Dasar Yang Berkeadilan dan Sesuai Rasio Kebutuhan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Presentase penyediaan perumahan bagi Masyarakat	12,80%	12,50%	12,80%	102,40%	10%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator, adapun realisasi 1 indikator tersebut melampaui target. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 102,40%.

Capaian Indikator Presentase Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat.

Untuk indikator ini Pemerintah Kota Magelang mencapai targetnya dengan menyediakan 2 unit rusunawa untuk menyediakan hunian guna mencukupi kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak huni di Kota Magelang. UPTD Rusunawa Kota Magelang baru mengelola 2 (dua) unit Rusunawa, yaitu Rusunawa Potrobangsari dan Rusunawa Tidar dengan kapasitas 198 unit, untuk mencukupi kebutuhan 1.319 unit rumah yang tidak layak huni, sehingga target penyediaan rumah bagi masyarakat tidak mampu pada tahun 2016 sebesar 12%, dapat terealisasi sebesar 12,80% dengan capaian kinerja sebesar 102,40%. Apabila realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi 2015 sebesar 12,00% maka realisasi tahun 2016 naik sebesar 0,80 poin.

Permasalahan dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat yang perlu diantisipasi ke depan antara lain:

1. Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman;
2. Meningkatnya harga lahan semakin mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau.

Upaya/solusi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat:

1. Menyediakan dan menyiapkan lahan untuk pembangunan rusunawa atau rusunami.
2. Mengelola Rusunawa yang sudah ada, agar optimal pemanfaatannya.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.285.867.438,00 dari anggaran sebesar Rp 1.422.492.000,00 atau 90,40% dari target. Realisasi keuangan sebesar 90,40% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 102,40%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2. **Sasaran Menurunnya Kesenjangan Wilayah dan Kesenjangan Antar Kelompok Pendapatan**
Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.31
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Kesenjangan Wilayah dan Kesenjangan Antar Kelompok Pendapatan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Tercapainya 100 - 0 -100					
	a. Persentase jumlah KK yang terlayani air minum	82,30%	87,30%	85,24%	97,64%	100,00%
	b. Rasio Luas kawasan kumuh	121,27 Ha	69,50	96,87	60,62%	0 Ha
	c. Rasio Rumah Tangga yang masih BABS	7%	6%	7%	83,33%	0,00%
2	Prosentase RTLH	4,40%	3,70%	4,20%	86,49%	0,00%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					86,10%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 4 indikator, adapun realisasi 4 indikator tersebut masih berada di bawah target. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 86,10%.

Capaian Indikator Tercapainya 100 - 0 -100

- a. Persentase Jumlah KK yang Terlayani Air Minum
- b. Rasio Luas Kawasan Kumuh
- c. Rasio Rumah Tangga yang Masih BABS



Capaian indikator **persentase jumlah KK yang terlayani air minum** tahun 2016 dengan target 87,30% capaian kinerjanya 97,64% berada di bawah target karena hanya terealisasi 85,24%. Data Kepala Keluarga yang ada sejumlah 34.270 KK, adapun jumlah KK yang terlayani air minum 29.212 KK. Hal ini dikarenakan pelayanan air minum hanya dapat dilayani oleh PDAM sebesar 73,68% dengan kapasitas produksi sebesar 7.415.976 ltr/dtk, sedangkan bantuan dari pemerintah pusat lewat DAK khususnya Sambungan Penyediaan Air Minum (SPAM) tidak dapat dilaksanakan karena terkendala juknis. Apabila realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 82,30% maka realisasi tahun 2016 naik sebesar 2,94 poin.

Sedangkan indikator **rasio luas kawasan kumuh** di Kota Magelang luas kawasan kumuh di 17 (tujuh belas) Kelurahan keseluruhan tidak mencapai target, dengan total luas permukiman kumuh di Kota Magelang sebesar 121,27 ha atau 6,5% dari luas wilayah Kota Magelang, target pengurangan luas kawasan permukiman kumuh seluas 69,50 ha, hanya tercapai 96,87 ha atau baru mengurangi luasan kawasan kumuh sebesar 20%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2016 pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) fasilitas umum lingkungan belum menyentuh secara keseluruhan kawasan kumuh di lingkungan kelurahan, diharapkan kedepan pembangunan di kawasan permukiman kumuh menjadi prioritas utama.

Capaian indikator **Rasio Rumah Tangga yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS)** tahun 2016 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 6% karena realisasinya 7% dengan capaian kinerja sebesar 83,33%. Artinya dari 34.270 KK masih terdapat 2.399 KK yang masih buang air sembarangan. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2016 angkanya sama dengan tahun 2015 sebesar 7%.

Belum optimalnya capaian indikator sasaran ini dikarenakan :

1. Masih adanya persepsi dari sebagian kecil masyarakat yang menganggap sanitasi air limbah belum menjadi kebutuhan mendesak.
2. Sebagian masyarakat lebih mudah membuang limbahnya ke saluran/sungai karena keterbatasan ekonominya, sehingga tidak mampu menyediakan sarana sanitasi secara mandiri.
3. Keterbatasan lahan untuk membangun sistem sanitasi komunal.
4. Sosialisasi tentang kawasan kumuh dan inovasi keterbatasan lahan belum optimal.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi berkaitan dengan pengelolaan sanitasi lingkungan dalam rangka mengurangi kawasan kumuh;
2. Menggerakkan masyarakat melalui sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, sehingga ada kesadaran bersama untuk mengembangkan dan membangun sistem sanitasi komunal sekaligus sebagai upaya menyikapi keterbatasan lahan.

Capaian Indikator Prosentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pertambahan jumlah penduduk di kawasan perkotaan meningkatkan bertambahnya hunian padat yang jika tidak terkendali akan menyebabkan kekumuhan, kegiatan untuk mengurangi kawasan kumuh permukiman baru menyentuh infrastruktur jalan lingkungan, saluran permukiman dan air bersih. Untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan sanitasi tidak dapat dilaksanakan karena terkendala aturan dan juknis, dan hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial sebanyak 25 unit rumah sehingga penanganannya belum maksimal. Hal ini memberi kontribusi pada capaian Indikator hanya berkurang 4,20% tidak mencapai target di tahun 2016 yaitu 3,70%, jadi jumlah seluruh rumah sebanyak 31.397 unit, masih terdapat 1.319 unit rumah yang tidak layak huni. Realisasi kinerja tahun 2016 lebih rendah 0,20 poin dibandingkan tahun 2015.

Permasalahan / kendala-kendala yang menghambat pengurangan rumah tidak layak huni yaitu :

1. Terkendala aturan hibah/bansos dalam penyaluran atau pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni.
2. Rumah yang tidak layak huni banyak yang bukan aset pribadi atau sewa dari orang lain.
3. Terbatasnya lahan milik Pemerintah Kota Magelang yang dapat digunakan untuk pengentasan penghuni rumah tidak layak huni di Rusunawa.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni di Kota Magelang yaitu :

1. Mengoptimalkan dukungan program dan anggaran dari beberapa kementerian pusat untuk pengentasan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh.
2. Adanya kebijakan dari Pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk mencapai 100% pelayanan air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% pelayanan sanitasi.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 5.839.540.000,00 dari anggaran sebesar Rp 7.817.629.000,00 atau 74,70% dari target. Realisasi keuangan sebesar 74,70% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 86,10 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

3. Sasaran Terwujudnya Sistem Transportasi dan Lalu Lintas Yang Baik, Ramah Lingkungan dan Berkeadilan

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.32
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Sistem Transportasi dan Lalu Lintas Yang Baik, Ramah Lingkungan dan Berkeadilan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8	8	100%	9,25

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator, adapun realisasi 1 indikator tersebut telah sesuai target, dengan rata-rata capaian kinerja untuk sasaran sebesar 100,00%.

Capaian Indikator Tingkat Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan. Adapun Indikator tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara operasional diukur dengan melihat tingkat keselamatan lalu lintas tiap km per 100.000 penduduk.

Untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Magelang, maka Pemerintah Kota Magelang akan menuntaskan beberapa program nasional kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada periode RPJMD 2016 – 2021 yang dilaksanakan sebagai rencana aksi yang meliputi :

- 1) Koordinasi dan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) Sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
- 3) Sistem data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 4) Pendanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan peranan jasa asuransi;
- 5) Perencanaan dan desain jalan;
- 6) Perbaikan dan lokasi-lokasi berbahaya;
- 7) Pendidikan keselamatan jalan untuk anak;
- 8) Pelatihan dan pengujian untuk pengemudi;
- 9) Kampanye dan sosialisasi keselamatan jalan;
- 10) Persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor;
- 11) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
- 12) Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan;
- 13) Penanganan korban kecelakaan lalu lintas;
- 14) Pengkajian keselamatan jalan;
- 15) Analisis biaya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan

Untuk melaksanakan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut, maka Pemerintah Kota Magelang akan menerapkan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan tujuan agar :

- 1) Menjamin bahwa aspek keselamatan jalan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan perencanaan, perancangan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan jalan dan jaringan jalan;
- 2) Membantu dan mengarahkan penyelenggara jalan dalam menerapkan dan mencapai berbagai strategi, kebijakan, sasaran, standar, prosedur dan keahlian, yang konsisten untuk memperbaiki kinerja keselamatan jaringan jalan;

- 3) Memastikan bahwa implementasi prosedur manajemen jalan akan dilaksanakan secara konsisten dan efisien;
- 4) Menjamin terdokumentasinya dan terkelolanya resiko-resiko keselamatan jalan;
- 5) Menjamin terpenuhinya kebutuhan akan pengetahuan dan keahlian bidang keselamatan jalan dengan baik;
- 6) Menjamin dapat ditingkatkannya kualitas keselamatan jalan dan menurunnya angka dan resiko kecelakaan jalan yang fatal bagi seluruh pengguna jalan.

Pemerintah Kota Magelang berkomitmen dan terus berinovasi dalam bidang lalu lintas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya fasilitas lalu lintas seperti CCTV sebagai alat pemantau dan Traffic Light Pedestrian, penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengujian dan SIM angkutan serta akan segera dibangunnya terminal tipe C di kawasan sentra ekonomi lembah Tidar (SELT) untuk menampung angkutan kota, yang selama ini belum memiliki terminal. Eskalasi fasilitas layanan lalu lintas di Kota Magelang selama beberapa tahun terakhir menjadi modal besar dalam menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Magelang.

Gambar 3.10
Traffic Light Pedestrian Aloon-Aloon Magelang



Atas keberhasilannya dalam manajemen lalu lintas, Pemerintah Kota Magelang kembali mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2016. Penghargaan tertinggi dari Kementerian Perhubungan ini khusus diberikan kepada daerah yang berhasil dalam penataan lalu lintas. Penghargaan WTN 2016 diperoleh Pemerintah Kota Magelang untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak 2013 lalu. Penghargaan diberikan langsung Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar di Merlyn Park Hotel Jakarta kepada Walikota Magelang.

Gambar 3.11
Walikota Magelang didampingi Kapolresta
Menerima Anugerah WTN Tahun 2016



Realisasi indikator kinerja tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada tahun 2016 adalah sebesar 8 poin dari target sebesar 8 poin dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar 100%. Pada tahun pertama periode RPJMD, indikator ini telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Bila dilihat target pencapaian indikator ini pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 9,25 poin, maka nampaknya cukup optimis indikator akan dapat tercapai. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 7,83 maka realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,17 poin.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia. Masyarakat Kota Magelang selaku pengguna jalan dan fasilitas lalu lintas lainnya sangat berperan dalam pencapaian indikator ini. Adapun program-program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, Program peningkatan kelaikan pengoperasian dan Program peningkatan pelayanan angkutan.

Beberapa kendala yang perlu diantisipasi ke depan antara lain:

1. Belum semua masyarakat mengerti teknologi dibidang lalu lintas.
2. Masih kurangnya disiplin masyarakat berlalu lintas .
3. Pelayanan angkutan umum belum memenuhi harapan.

Solusi untuk mengatasi kendala antara lain melalui :

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang *political will* pemerintah dibidang lalu lintas.
2. Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana angkutan umum.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 2.934.201.125,00 dari anggaran sebesar Rp. 3.009.340.000,00 atau 97,50% dari target. Realisasi keuangan sebesar 97,50% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

4. Sasaran Meningkatnya Kondusifitas Iklim Investasi, Daya Saing dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.33
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kondusifitas Iklim Investasi,
Daya Saing dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Pertumbuhan investasi					
	a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	0%	0%	15%
	b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	15%	20,42%	136,13%	15%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					78,71%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator dan dijabarkan dalam 2 sub indikator. Adapun realisasi 1 sub indikator tidak tercapai yaitu pada indikator pertumbuhan nilai investasi PMA 0%, sedangkan untuk sub indikator pertumbuhan nilai investasi PMDN melampaui target. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 78,71%.

Capaian Indikator Pertumbuhan investasi

- a. Pertumbuhan Nilai Investasi PMA
- b. Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN

Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan selisih pertumbuhan investasi PMA dibandingkan dengan nilai investasi PMA tahun sebelumnya. Data kumulatif yang dihimpun dari Buku Perkembangan Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal Kota Magelang, didapat data sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jumlah Perusahaan PMA	2	3	3	3	3
2	Nilai investasi PMA	20,758 M	193,821 M	193,821 M	193,821 M	193,821 M

Perlu diketahui bahwa izin investasi bagi perusahaan PMA dilaksanakan di tingkat pusat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Data-data yang dihimpun tersebut berdasarkan pada izin investasi yang telah diterbitkan oleh BKPM dan ditembuskan kepada pemerintah daerah setempat dimana perusahaan melakukan operasional.

Dari data di atas, belum ada lagi investor dengan kategori PMA yang membuka usaha di Kota Magelang, sehingga capaian nilai investasi PMA belum bertambah sejak tahun 2013. Tidak menutup kemungkinan bahwa selama perusahaan tersebut beroperasi di Kota Magelang, perusahaan menambah modal sebagai investasi lanjutan. Namun dikarenakan pembaruan ataupun perluasan izin investasi dilakukan pada tingkat pusat, serta laporan kegiatan penanaman modal yang juga dilaporkan pada tingkat pusat, maka tidak ada data yang terhimpun bagi pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan investasi bagi perusahaan yang telah beroperasi di Kota Magelang. Demikian pula tidaklah mudah bagi OPD pelaksana urusan penanaman modal untuk menghimpun laporan terkait perkembangan operasional perusahaan. Terlebih, PTSP di Kota Magelang belum dapat melaksanakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), yaitu sistem aplikasi yang dimanfaatkan untuk penerbitan dan monitoring izin investasi yang berlaku secara nasional, dikarenakan belum adanya pendelegasian penandatanganan penerbitan izin investasi penanaman modal kepada kepala PTSP.

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui pertumbuhan nilai investasi PMA adalah sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013 Realisasi	Tahun 2014 Realisasi	Tahun 2015 Realisasi	Tahun 2016 Target	Tahun 2016 Realisasi
1	Pertumbuhan Nilai investasi PMA	-	833,7%	0%	0%	5%	0%

Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah $0\% / 5\% \times 100\% = 0\%$, sehingga tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Target pertumbuhan investasi penanaman modal asing merupakan capaian yang penuh tantangan, dikarenakan obyek investasi adalah perusahaan asing yang jika telah memiliki basis investasi di Indonesia, tentu akan memilih lokasi yang menawarkan insentif yang lebih menarik. Namun bagi investor asing yang masih menjajagi peluang investasi, Kota Magelang harus memiliki profil dan potensi investasi yang menarik dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah lain, serta upaya promosi berskala internasional, yang tentu membutuhkan biaya dan sumberdaya yang tidak sedikit.

Dengan demikian upaya untuk menarik investasi asing tidak hanya membutuhkan kesiapan dalam hal promosi dan potensi investasi berskala internasional, namun juga kesiapan daerah untuk menerima dan memfasilitasi penanaman modal asing di daerah.

Sementara ini kegiatan yang dapat dikaitkan untuk mendukung indikator ini adalah kegiatan Penyusunan Profil Pameran Investasi, yang pada tahun 2016 mengalokasikan dana sebesar Rp. 84.250.000,-. Namun tentu profil pameran investasi yang telah disusun tidak hanya dikhususkan untuk kalangan penanam modal asing namun juga diperuntukkan bagi penanam modal dalam negeri.

Pada tingkat nasional, realisasi PMA pada tahun 2016 sebesar 396,6 T dan mengambil porsi sebanyak 64,7 % dari total investasi, naik 8,4% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada level provinsi, realisasi PMA di Jawa Tengah pada tahun 2016 tercatat sebesar 1.030.795.000 dolar AS (atau senilai Rp. 13,71 T), naik 21,2% dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa realisasi PMA di Jawa Tengah sedang tumbuh dengan gencarnya, jauh melampaui pertumbuhan PMA pada tingkat nasional, namun Kota Magelang belum dapat mengambil porsi sedikit pun dari investasi tersebut.

Pertumbuhan nilai investasi PMDN

Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan selisih pertumbuhan investasi PMDN dibandingkan dengan nilai investasi PMDN tahun sebelumnya. Perhitungan investasi PMDN adalah nilai investasi baik oleh perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar bukan PMA yang baru membuka usaha di Kota Magelang, direkap dari nilai investasi yang dilaporkan saat pengajuan izin usaha (SIUP) baru. Data kumulatif yang dihimpun oleh Kantor Penanaman Modal dalam laporannya akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Nilai investasi PMDN	288,95 M	419,248 M	464,317 M	672,248 M	809,503 M

Dari data tersebut dapat dihitung nilai pertumbuhan investasi PMDN sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013 Realisasi	Tahun 2014 Realisasi	Tahun 2015 Realisasi	Tahun 2016 Target	Tahun 2016 Realisasi
1	Pertumbuhan Nilai investasi PMDN	-	45,09%	10,75%	44,75%	15%	20,42%

Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah $20,42\% / 15\% \times 100\% = 136,13\%$, dan dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kontribusi pertumbuhan nilai investasi PMDN tersebut disokong oleh izin usaha 63 perusahaan baru yang sebagian besar bergerak pada sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai investasi Rp. 127,483 M, disusul perusahaan yang bergerak di sektor jasa dengan nilai investasi Rp. 9,634 M. Sementara 3 perusahaan tercatat bergerak di sektor industri pengolahan dengan nilai investasi 0,137 M.

Indikator tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, yang pada tahun 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 642.545.000,-. Dengan nilai investasi yang masuk selama tahun 2016 sebesar Rp. 137,225 M, dapat dikatakan bahwa nilai investasi yang masuk bernilai ratusan kali lipat dari anggaran yang telah dialokasikan.

Pada tingkat nasional, realisasi investasi PMDN adalah sebesar 216,2 T, naik sekitar 20,44% dibanding tahun lalu. Sedangkan realisasi PMDN pada provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 24,07 T, naik sekitar 56,2% dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa target pertumbuhan investasi Kota Magelang tidak terlalu jauh dari target secara nasional, namun di tingkat Jawa Tengah yang pertumbuhan investasinya tergolong tinggi, Kota Magelang belum dapat mengimbangnya.

Tantangan ke depan yang dihadapi dalam rangka pengumpulan data investasi adalah dengan adanya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), penerbitan izin usaha mikro, kecil dan menengah telah dilaksanakan oleh masing-masing kecamatan, sedangkan penerbitan izin usaha skala besar tetap dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan kondisi tersebut perlu adanya koordinasi pengumpulan data investasi sehingga nilai investasi tetap dapat dihitung sepenuhnya dan mencerminkan nilai investasi riil di Kota Magelang.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 620.098.050,00 dari anggaran sebesar Rp 642.545.000,00 atau 96,51% dari target. Realisasi keuangan sebesar 96,51% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 78,71%, maka belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

5. Sasaran Meningkatkan Produktivitas Daerah dan Ekonomi Kreatif

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.34
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Produktivitas Daerah
dan Ekonomi Kreatif

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Prosentase sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik	70%	75%	75%	100%	80%
2	Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti	26%	27%	31,57%	116,93%	32%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					108,46%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 2 indikator. Adapun realisasi 1 indikator telah sesuai target dan 1 indikator lainnya melampaui target yaitu indikator cakupan inovasi yang ditindaklanjuti dengan realisasi 31,57%. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 108,46%.

Capaian Indikator Prosentase Sarana Prasarana Perekonomian Milik Pemerintah Kota Magelang Dalam Kondisi Baik

Salah satu indikator sasaran Meningkatkan Produktivitas Daerah dan Ekonomi Kreatif adalah Prosentase Sarana Prasarana Perekonomian Milik Pemerintah Kota Magelang Dalam Kondisi Baik. Realisasi indikator ini pada tahun 2016 sebesar 75% dari target yang ditetapkan sebesar 75% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Apabila realisasi kinerja 2016 dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 70%, maka realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5 poin.

Indikator ini menunjukkan bagaimana kondisi sarana dan prasarana perekonomian Milik Pemerintah Kota Magelang yang secara kondisi masih baik. Artinya, dengan kondisi tersebut

dapat diharapkan akan mampu menopang dan mendorong serta berkontribusi pada perekonomian Kota Magelang. Indikator ini diperoleh dari data Sarana prasarana perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang dalam kondisi baik dibagi Jumlah seluruh sarana prasara perekonomian milik Pemerintah Kota Magelang.

Dari indikator sasaran persentase sarana prasarana perekonomian milik Kota Magelang dalam kondisi baik telah dapat mencapai. Hal ini nampak pada berbagai perbaikan dan manajemen sarana prasarana perekonomian milik Kota Magelang seperti pasar Rejowinangun dan pasar pasar lainnya semakin menunjukkan kondisi yang makin baik.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja antara lain :

1. Mengintensifkan seluruh aspek koordinasi lintas urusan yang terkait pencapaian sasaran ini, sampai dengan akhir periode RPJMD.
2. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dengan terobosan-terobosan inovatif.
3. Melakukan evaluasi secara berkala dan intensif atas pelaksanaan program kegiatan.

Capaian Indikator Cakupan inovasi yang Ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini diukur melalui kegiatan Penjaringan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) yang merupakan kegiatan rutin di Kota Magelang dan sudah tidak asing bagi masyarakat Kota Magelang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangkitkan daya kreasi dan inovasi masyarakat. Kompetisi KRENOVA di Kota Magelang menjadi pelopor dan menginspirasi daerah-daerah lain untuk menyelenggarakan kompetisi serupa. KRENOVA Kota Magelang bahkan menjadi *Best Practice* dalam Forum APEKSI.

Prestasi yang diraih KRENOVA Kota Magelang terbilang sangat membanggakan. Beberapa KRENOVA Kota Magelang yang terpilih diajukan ke tingkat Propinsi Jawa Tengah bahkan sejak tahun 2005 -2016 menghasilkan prestasi yang berkesinambungan.

Tabel 3.35
Data Krenova Kota Magelang Yang Berprestasi

Tahun	Temuan	Penemu
2005	Tepung Jamur Tempe	Musinem Paulus
2006	Alat Pengatur Pemberian Pakan Udang/Ikan	Sam Wahyono
2007	Pemanfaatan & Pengolahan Sampah Organik Briket Arang & Asap Cair	Sarwo Imam Santosa dkk
2008	Pembangkit Listrik Tenaga Angin Convertible	Ir. Wijaya Widjanarko, MT
2009	Penggunaan Kartu Karakter Pustaka Meningkatkan Fungsi Perpustakaan	Mursidi, S.Pd
2010	Alat Pengering Kerupuk dengan Memanfaatkan Gas Buang Industri Kerupuk	Oesman Raliby dkk
2012	Pemanfaatan Limbah IPAL Menjadi Paving Blok Bermutu dengan Teknologi Vibrasi Mesin Pencetak Paving Blok	Awaludin Setya Aji dkk

Tahun	Temuan	Penemu
2012	Jemuran Otomatis dengan Sensor Air Hujan	Budi harjono dkk
2013	Pemanfaatan Pelepah Pisang Abaca sebagai bahan serat tenun dengan fungsionalisasi antibakteri : gagasan awal dalam roadmap pengembangan green and zero waste product	Canggih Setia Budi, S.Si, M.S
2015	Teknik Pewarnaan alam pada Batik Tuguran	Sylvia Eriana Dewi
2016	Metode pembelajaran matematika dengan “Matcha” dan Tabela Cerdas	Lukman Hardi Sam Wahyono

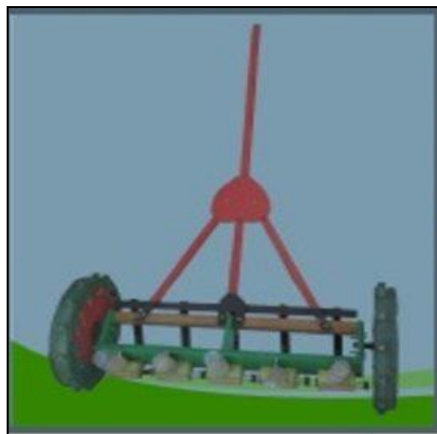
Sumber : Buletin KRENOVA, 2016

Pada skala nasional, dari kegiatan ini terlahir inovator Kota Magelang yang tercatat sebagai inovator Indonesia versi *Business Innovation Centre* (BIC), yaitu sebagai berikut :

- 1) Tahun 2010 tercatat dalam buku 102 inovator Indonesia terbitan Kementerian Ristek. Temuan “Alat Pengering Kerupuk dengan Pemanfaatan Gas Buang” Karya Oesman Raliby, ST., M.Eng dan Dra Retno Rusdjiati, M.Kes. keduanya dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang.
- 2) Tahun 2011 salah satu inovator Kota Magelang (Drs. Fence Ohoilulin, warga Kelurahan Kramat Selatan) karyanya masuk 103 Inovasi terbitan Kementerian Ristek dengan karyanya “Bio-Qita alternatif pupuk organik lokal yang Murah, Mudah dan Efisien dari Kota Magelang”.
- 3) Alumni KRENOVA 2010 (Sdr. Daryono, warga Tidar Selatan) dengan karyanya Pompa Air Hidrolik berhasil menjadi Juara 3 Pemuda Pelopor Tingkat Nasional.
- 4) Sam Wahyono (KRENOVA 2014) berkesempatan sebagai kandidat untuk masuk ke buku 108 Inovator Indonesia yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti.

Gambar 3.12

TABELA Cerdas, Pemenang Favorit KRENOVA Jawa Tengah Tahun 2016



Tidak hanya itu saja, disisi kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan, Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Magelang meraih 2 (dua) penghargaan bergengsi tingkat nasional dibidang teknologi dan inovasi, yaitu :

- 1) **Anugerah Budhipraja**, sebagai finalis yang diberikan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai apresiasi kepada Pemerintah Kota Magelang yang telah mandiri dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah dan pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam pelayanan publik.
- 2) **Anugerah Widigdapura**, sebagai Kabupaten/Kota Pemanfaat Teknologi Tepat Guna Terbaik yang diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Kedua penghargaan tersebut diserahkan pada Rangkaian Acara Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2016 di Surakarta pada Tanggal 10 Agustus 2016.

Gambar 3.13
Penyerahan Anugerah Budhipraja Tahun 2016



Gambar 3.14
Penyerahan Anugerah Widigdapura Tahun 2016



Tindak lanjut dari berbagai temuan KRENOVA dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah pengiriman KRENOVA pada level kompetisi yang lebih tinggi. Selain itu skema tindak lanjut KRENOVA yang lain adalah diseminasi, inkubasi, perlindungan Kekayaan Intelektual, hilirisasi dan komersialisasi. Pada Tahun 2016 terjaring sebanyak 19 (Sembilan belas) KRENOVA dari berbagai bidang temuan dan sebanyak 6 (enam) temuan mendapatkan tindak lanjut berupa

pengiriman pada kompetisi KRENOVA Provinsi Jawa Tengah, seleksi 108 Inovasi Indonesia dan diseminasi pada Pameran Produk Inovasi (PPI).

Realisasi indikator kinerja cakupan inovasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 adalah sebesar 31,57 % dari target sebesar 27 % dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar 116,93%. Pada tahun pertama periode RPJMD, indikator ini telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Bila dilihat target pencapaian indikator ini pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 33 %, maka nampaknya cukup optimis indikator akan dapat tercapai.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia. Masyarakat Kota Magelang sangat berperan dalam pencapaian indikator ini. Adapun anggaran dari program perencanaan sosial budaya dan kegiatan penjangkangan kreativitas dan inovasi masyarakat yang mendukung pencapaian indikator ini.

Beberapa hal yang perlu diantisipasi ke depan antara lain:

1. Masih adanya sebagian masyarakat yang enggan untuk menunjukkan hasil kreativitas dan inovasinya karena terbatasnya kemampuan untuk mendeskripsikan temuannya dalam bentuk tulisan proposal.
2. Masih rendahnya inovasi pelayanan publik oleh organisasi perangkat daerah.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain melalui :

1. Pendampingan penyusunan proposal dan teknik presentasi melalui Coaching Clinic KRENOVA serta perlindungan Kekayaan Intelektual.
2. Kompetisi Kreativitas dan Inovasi OPD akan dilakukan mulai tahun 2017 untuk menumbuhkan inovasi pelayanan publik.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 76.260.623,00 dari anggaran sebesar Rp 78.000.000,00 atau 97,77% dari target. Realisasi keuangan sebesar 97,77% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 108,46%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

6. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.36
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	12.729	12.780	13.501	105,64%	13.037

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator. dengan realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 105,64%.

Capaian Indikator Ketersediaan Pangan Utama Beras (ton)

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling azasi, sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Di dalam kajian terhadap kondisi Kota Magelang dari berbagai aspek pembangunan bahwa ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari beberapa sumber yaitu : produksi wilayah, pemasokan pangan, bantuan/hibah pangan yang disalurkan kepada masyarakat berupa beras sejahtera (rastra), dan pengelolaan cadangan pangan.

Realisasi kinerja pada tahun 2016 sebesar 13.501 ton dari target yang ditetapkan sebesar 12.780 ton dengan capaian kinerja sebesar 105,64. Apabila realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 12.729 ton maka realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 772 ton.

Gambar 3.15
Kegiatan Pemantaun/Survey Ketersediaan Pangan (Beras)



Panen Padi (Produksi Padi) Kota Magelang 2016

Manusia dengan segala kemampuannya selalu berusaha mencukupi kebutuhannya dengan berbagai cara. Melalui pembangunan sektor unggulan yaitu kedaulatan pangan yang disebutkan dalam dimensi pokok pembangunan nasional RPJMN 2015-2019, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD Kota Magelang 2016–2021 melalui analisis lingkungan strategis dalam menentukan

kriteria isu-isu strategis. Belum tercapainya kecukupan pangan di tingkat individu dapat menimbulkan kerawanan pangan. Kerawanan pangan dapat disebabkan ketidakmampuan dalam memperoleh pangan yang cukup, yang terjadi karena ketidakstabilan harga, ketidakstabilan pendapatan rumah tangga, serta ketidakstabilan produksi pangan di wilayah tertentu. Untuk itu, peningkatan ketahanan pangan menjadi prioritas utama dalam misi meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pencapaian indikator ketersediaan pangan utama beras (ton), antara lain sebagai berikut:

1) Produksi Wilayah

Walaupun lahan pertanian pangan di Kota Magelang hanya sekitar 208 ha dan produksi padi hanya mampu mencukupi kebutuhan penduduk Kota Magelang sekitar 14% sedangkan sisanya mendatangkan dari luar Kota Magelang. Ketersediaan pangan di Kota Magelang dapat mencukupi kebutuhan penduduk Kota Magelang. Secara umum neraca ketersediaan (produksi) dan kebutuhan pangan tahun 2016 menunjukkan keadaan defisit. Hal ini mengindikasikan kebutuhan pangan di Kota Magelang harus mendatangkan dari luar Kota Magelang. Jumlah kebutuhan beras sebagai bahan pangan utama di Kota Magelang terus mengalami peningkatan, sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan rata-rata beras tahun 2016 sebesar 12.105 ton, dengan konsumsi beras 90,7 kg/kap/tahun. Jumlah produksi beras di Kota Magelang 1.902 ton.

2) Pemasokan Pangan

Pasokan pangan didukung oleh Kota Magelang sebagai kota jasa dan kota perdagangan dengan posisi strategis yang berada pada simpul jalur ekonomi dan wisata regional. Dengan demikian Kota Magelang merupakan pusat perbelanjaan kebutuhan pokok masyarakat, baik masyarakat Kota Magelang maupun luar Kota Magelang, sehingga bahan pangan dari daerah sekitar dipasarkan di Kota Magelang sebelum didistribusikan ke daerah lain. Disamping itu juga didukung sarana dan prasarana distribusi yang ada di Kota Magelang seperti jalan, transportasi, pasar, serta agen-agen penyalur kebutuhan pokok masyarakat, sehingga secara umum ketersediaan pangan utama di Kota Magelang dapat tercukupi. Karena sebagian besar bahan pangan untuk konsumsi masyarakat Kota Magelang bersal dari luar Kota Magelang, maka Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kota Magelang dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan kerjasama dengan 3 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Magelang, 1 Gapoktan Kabupaten Temanggung dan 1 Gapoktan Kabupaten Purworejo untuk memasok bahan pangan beras ke 9 TTI dan selama tahun 2016. Gapoktan tersebut telah memasok bahan pangan beras ke TTI Kota Magelang sebanyak sekitar 180 ton. Disamping itu ketersediaan pangan di Kota Magelang didukung dengan adanya penyaluran Raskin (Beras Sejahtera) ke KK miskin sebanyak 810,180 kg (810,18 ton).

3) Kebutuhan dan Produksi Pendukung Ketahanan Pangan

- a. Kebutuhan rata-rata jagung sebesar 70,4 ton, dengan konsumsi 0,5 kg/kap/th,
- b. Kebutuhan sayur-sayuran sebesar 10.039,5 ton, dengan konsumsi 75,2 kg/kap/th,

- c. Kebutuhan buah-buahan sebesar 6.338 ton, dengan konsumsi 47,5 kg/kap/th,
 - d. Kebutuhan daging ruminansia sebesar 880 ton, dengan konsumsi 6,6 kg/kap/th,
 - e. Kebutuhan telur sebesar 1.266,6 ton, dengan konsumsi 9,5 kg/kap/th,
 - f. Kebutuhan ikan sebesar 2.127,3 ton, dengan konsumsi 15,9 kg/kap/th,
 - g. Produksi ubi kayu 14 ton,
 - h. Produksi buah-buahan 453 ton,
 - i. Produksi daging sapi 1.029 ton,
 - j. Produksi ayam 1.155 ton,
 - k. Produksi telur 40 ton,
 - l. Produksi ikan 159 ton.
- 4) Capaian Indikator Pendukung Ketahanan Pangan
- Ketersediaan kalori dan protein pada tahun 2016 sudah melampaui ketersediaan yang dianjurkan. Pada tahun 2016 ketersediaan energi dan protein masing - masing adalah 2.415 Kkal/kap/hari dan 67.8 gr/kap/hari. Konsumsi energi dan protein pada tahun 2016 masing-masing 1.835 kkal/kap/hr, dan 57.4 gr/kap/hr, untuk konsumsi kalori masih jauh di bawah konsumsi yang dianjurkan sebesar 2.150 kkal/kap/hr, sedangkan konsumsi protein sudah di atas standar kecukupan protein yang dianjurkan yaitu 57 gr/kap/hr.
- Harga bahan pangan pokok selama tahun 2016 cukup bervariasi. Bahan pangan yang mengalami fluktuasi harga cukup signifikan yakni cabe, dan gula pasir, Fluktuasi harga yang tinggi mengindikasikan adanya keterbatasan masyarakat dalam mengakses bahan pangan tersebut. Balita yang mengalami gizi buruk tahun 2016 sebanyak 13 anak, dimana 4 balita telah lolos, sedangkan 9 Balita masih dalam penanganan dari Dinas Kesehatan Kota Magelang instansi terkait.

Kota Magelang merupakan salah satu kota yang jumlah penduduknya tinggi. Penggunaan lahan pertanian banyak dikonversi menjadi rumah penduduk, pusat perbelanjaan, maupun perkantoran. Tidak heran bila dalam pemenuhan kebutuhan penduduk, khususnya kebutuhan pangan diharapkan dari perdagangan.

Sebagian besar Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat Kota Magelang dari impor, angka impor yang terus meningkat untuk berbagai komoditas pangan disebabkan oleh tiga hal penting. Yang pertama, kebutuhan pangan yang semakin meningkat karena populasi yang meningkat. Yang kedua, konsumsi perkapita yang meningkat sebagai hasil dari peningkatan kesejahteraan dan pendidikan. Ketiga, produksi yang menurun atau meningkat dengan kecepatan yang lebih kecil dari pada peningkatan kebutuhan, karena kondisi yang ada terutama harga, tidak kondusif untuk peningkatan produksi dan juga alih fungsi lahan. Ketersediaan dan konsumsi pangan dapat menjadi masalah utama yang disebabkan oleh adanya kekurangan pemenuhan kebutuhan konsumsi semestinya dimana pada akhirnya akan berkaitan dengan standar gizi bagi masyarakat Kota Magelang.

Kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pangan utama (beras) di Kota Magelang yang dilakukan oleh Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan antara lain dengan melakukan survey/pemantauan stok pangan di 3 pasar (Pasar Kebonpolo, Pasar Cacaban, Pasar Rejowinangun).

Gambar 3.16
Kegiatan Pemantauan Distribusi Beras Kota Magelang 2016



Pemantauan Beras di Pedagang Pasar Kebonpolo

Stok pangan di 9 agen/distributor, ketersediaan pangan di 17 kelurahan melalui survey warung/toko kelontong serta pemantauan di 9 Toko Tani Indonesia (TTI). pemantauan ini dilakukan setiap minggu selama setahun berjalan, selain dilakukan pemantauan ketersediaan pangan juga dilakukan pemantauan harga pangan yang meliputi 14 komoditas bahan pangan. Pemantauan ini digunakan untuk mengetahui ketersediaan pangan khususnya beras di Kota Magelang.

Gambar 3.17
Peresmian Toko Tani Indonesia (TTI) Oleh Gubernur Jawa Tengah dan Pemantauan TTI oleh Petugas



Beberapa kendala yang dihadapi dalam pendataan/monitoring bahan pangan beras, yaitu :

1. Belum semua toko bahan pangan khususnya toko modern (Gardena, Superindo, Giant, Alfa Mart dan Indo Mart) menjadi sasaran pemantauan/survey.
2. Kurangnya tenaga teknis pemantauan/survey.
3. Keluar masuknya bahan pangan khususnya beras tidak dapat/sulit diakses.

Solusi, guna pemenuhan terhadap kebutuhan kinerja antara lain :

1. Sasaran survey/pemantauan ditambah.
2. Penambahan tenaga teknis survey/pemantauan dengan pelatihan.
3. Adanya akses pemantauan keluaranya masuknya bahan pangan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 235.082.400,00 dari anggaran sebesar Rp 256.263.000,00 atau 91,73% dari target. Realisasi keuangan sebesar 91,73% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 105,64%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Sasaran Meningkatnya Lapangan Kerja

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.37
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Lapangan Kerja

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	60%	90,84%	151,40%	70%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator, dengan realisasi sebesar 90,84% melampaui dari target yang telah ditetapkan. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 151,40%.

Capaian Indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja

Capaian indikator ini didukung oleh 3 program dan 39 kegiatan yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 4.073.342.190,00.

Tabel 3.38
Program /Kegiatan Pendukung dan Jumlah Anggaran
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Lapangan Kerja

No	Program/Kegiatan Pendukung	Jumlah Anggaran
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 1.801.917.000,00
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 1.996.152.190,00
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp 275.273.000,00
	JUMLAH	Rp 4.073.342.190,00

Ketiga program menunjukkan fungsi ketenagakerjaan yaitu pra penempatan, penempatan dan paska penempatan. Ketiga fungsi ini memiliki indikator program dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.39
Capaian Indikator kinerja Program Ketenagakerjaan Tahun 2016

No.	Uraian	Target SPM	Target RPJMD	Realisasi 2016
A. Program Peningkatan Kesempatan Kerja				
1	Persentase wirausaha baru	0	4%	12,50%
2	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	40%	65%	93,21%
3	Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	60%	70%	90,91%
B. Program Penempatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				
4	Persentase peserta pelatihan tersertifikasi	0	1%	0
5	Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	60%	60%	66,55%
6	Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	0	0	0
C. Program Pengembangan Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan				
7	Coverage asuransi tenaga kerja	50%	68%	70,32%
8	Persentase Perselisihan Hub Industrial terselesaikan melalui perjanjian bersama (PB)	50%	50%	92,86%

Indikator sasaran ini tercapai melalui pencapaian indikator program yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016–2021 sebagaimana terlihat pada tabel diatas. Indikator program yang ada, mendorong penyerapan tenaga kerja melalui mekanisme formal dan informal.

Penyerapan tenaga kerja melalui mekanisme informal dilakukan dengan cara memberi pelatihan kewirausahaan kepada para pencari kerja/penganggur sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat memunculkan wirausaha baru sehingga akan membuka lapangan pekerjaan bagi para penganggur maupun ibu rumah tangga yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pada Tahun 2016 telah terbentuk wirausahawan baru sebanyak 5 orang yang berasal dari peserta pelatihan batik tulis sebanyak 20 orang pencari kerja.

Adapun penyerapan tenaga kerja melalui mekanisme formal dilakukan melalui tahapan memberi pelatihan kerja berbasis kompetensi yang sesuai dengan program dan kurikulum SKKNI yang ditetapkan oleh BNSP yang kemudian dilakukan sertifikasi profesi oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP). Pada Tahun 2016 terdapat 10 (sepuluh) jenis pelatihan berbasis kompetensi dengan jumlah peserta sebanyak 197 orang pencari kerja dari 296 pendaftar. Namun di Tahun 2016, proses sertifikasi masih dalam tahap persiapan hingga tahun 2017. Diharapkan Tahun 2018 akan bisa terimplementasikan. Jumlah pencari kerja yang bisa ditempatkan pada Tahun 2016 sebanyak 494 orang dari 530 pencari kerja terdaftar.

Program Perlindungan tenaga kerja mendorong indikator sasaran dari sisi retaining/pencegahan pemutusan hubungan kerja. Dengan pembinaan kepada perusahaan dan serikat pekerja secara terus menerus diharapkan tenaga kerja yang telah bekerja terlindungi hak-haknya sebagai pekerja dan dapat terus bekerja sesuai dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku.

Permasalahan ketenagakerjaan yang perlu diantisipasi ke depan antara lain:

1. Masih rendahnya minat pencari kerja untuk berwirausaha/menjadi wirausahawan.
2. Belum adanya jenis pelatihan unggulan berbasis kompetensi yang menjadi rujukan daerah sekitar.
3. Belum terakreditasinya Balai Latihan Kerja Daerah.
4. Belum tersertifikasinya para lulusan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja sesuai standar BNSP.
5. Belum tersertifikasinya para pekerja sesuai dengan standar BNSP.
6. Belum adanya pembinaan kepada perusahaan tentang kewajiban mengikutsertakan tenaga kerjanya di BPJS ketenagakerjaan.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan motivasi kepada para pencari kerja untuk berwirausaha melalui pelatihan kerja bekerjasama dengan pelaku usaha.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk membuat jenis pelatihan yang bisa diunggulkan di daerah dengan mempertimbangkan kondisi lokal daerah.
3. Mempersiapkan persyaratan untuk mencapai akreditasi.
4. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mempersiapkan sertifikasi bagi para peserta pelatihan berbasis kompetensi dan para pekerja.
5. Mempersiapkan rencana program dan kegiatan pembinaan kepada perusahaan dan serikat pekerja.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 4.073.342.190,00 dari anggaran sebesar Rp 4.203.619.000,00 atau 96,90% dari target. Realisasi keuangan sebesar 96,90% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 151,40%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

8. **Sasaran Meningkatnya kesejahteraan Sosial, Menurunnya Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS**
Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.40
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kesejahteraan Sosial,
Menurunnya Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentase Penurunan PMKS	14%	14%	2%	14,29%	19%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator, dengan realisasi 2% dari target yang ditetapkan sebesar 14% sehingga dapat disimpulkan indikator ini masih di bawah target yang ditetapkan. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 14,29%. Apabila realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 14% masih terdapat selisih cukup signifikan yaitu -12 poin.

Capaian Indikator Persentase Penurunan PMKS

Capaian indikator ini didukung oleh 7 program dan 20 kegiatan yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 762.685.750,00.

Tabel 3.41
Program /Kegiatan Pendukung dan Jumlah Anggaran
Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penurunan PMKS

No	Program/Kegiatan Pendukung	Jumlah Anggaran
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp 127.100.000,00
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 205.094.600,00
3	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rp 38.438.000,00
4	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Rp 11.291.700,00
5	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Rp 113.713.000,00
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 245.561.000,00
7	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	Rp 21.487.450,00
	JUMLAH	Rp 762.685.750,00

Ke-7 (tujuh) program tersebut memiliki indikator kinerja beserta capaiannya di tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.42
Capaian Indikator kinerja Program Bidang Sosial Tahun 2016

No.	Uraian	Target SPM	Target RPJMD	Realisasi 2016
1	Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	10%	9,68%
2	Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	9,11%	12,76%
3	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	0	100%	100%
4	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	10%	0
5	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	0	65%	85,24%

Indikator sasaran ini belum tercapai di Tahun 2016, untuk itu perlu ditelusuri dari capaian indikator program yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 – 2021 sebagaimana terlihat pada

tabel diatas. Indikator program yang ditetapkan seharusnya mendorong penurunan jumlah keluarga miskin dan PMKS serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Dari hasil capaian indikator program terlihat bahwa masih ada 3 indikator program yang belum tercapai yang masih harus didorong pencapaiannya di tahun-tahun mendatang yaitu persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial, persentase penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial dan persentase WKBSM yang menyediakan sarpras pelayanan kesos. Ketiga indikator ini perlu didorong melalui penambahan sasaran kegiatan sehingga capaian indikator bisa tercapai di tahun mendatang.

Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi ke depan antara lain:

1. Jumlah lanjut usia tidak potensial yang belum mendapat jaminan sosial masih banyak sekitar 90 persen dari seluruh jumlah lanjut usia tidak potensial yang ada.
2. Masih kurangnya anggaran yang mendukung kegiatan pemberdayaan sosial bagi PMKS.
3. Belum adanya anggaran yang mendukung pelaksanaan WKBSM.
4. Jumlah penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang mendapat bantuan sosial masih sedikit hanya sekitar 6 persen.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain dengan:

1. Meningkatkan jumlah sasaran jaminan sosial bagi lanjut usia tidak potensial, jumlah sasaran penca fisik dan mentak tidak potensial yang akan mendapatkan jaminan sosial.
2. Mendayagunakan pekerja sosial untuk melakukan pemberdayaan sosial bagi PMKS.
3. Pengajuan anggaran untuk mendukung pelaksanaan WKBSM dan pemberdayaan sosial kepada PMKS.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 762.685.750,00 dari anggaran sebesar Rp 830.398.000,00 atau 91,85% dari target. Realisasi keuangan sebesar 91,85% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 14,29%, maka belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

9. Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Daya Dukung Lingkungan

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.43
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Daya Dukung Lingkungan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	100,00%	2 anak

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator, dengan realisasi 2 anak dari target yang ditetapkan sebesar 2 anak sehingga dapat disimpulkan indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 100,00%.

Capaian Indikator Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga

Tercapainya realisasi kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana;
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
3. Program pelayanan kontrasepsi;
4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
5. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
6. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

Melalui pelaksanaan program-program tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam pengendalian jumlah penduduk di Kota Magelang, masing-masing keluarga rata-rata memiliki 2 anak hal ini sudah sesuai dengan slogan dari BKKBN yaitu “Dua Anak Cukup”. Apabila dibanding dengan posisi Tahun 2015 yaitu target kinerja sebesar 2 anak dan realisasi sebesar 2 anak, capaian kinerja pada tahun 2016 dapat dipertahankan sama dengan tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa Keluarga dengan “Catur Warga” menuju keluarga bahagia sejahtera sudah terwujud di Kota Magelang, melalui Program Keluarga Berencana, penduduk berhasil dikendalikan pertambahannya, mengingat daya dukung dan daya tampung yang terbatas di Kota Magelang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus sukses.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 664.389.000,00 dari anggaran sebesar Rp 749.452.000,00 atau 88,65% dari target. Realisasi keuangan sebesar 88,65% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

10. Sasaran Menurunnya Kesenjangan Gender

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.44
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Kesenjangan Gender

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	13,15%	15%	11,05%	73,67%	30%
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,73%	17%	13,94%	82,00%	35%
3	Rasio KDRT	0,070%	0,065%	0,065%	100,00%	0,04%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					85,22%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 3 indikator. Pada 2 indikator belum mencapai target dan 1 indikator telah melampaui target. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 85,22%.

Capaian Indikator Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Tahun 2016 dari target kinerja sebesar 15% dapat terealisasi sebesar 11,05% dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah sejumlah 4.473 orang dibagi jumlah perempuan bekerja sejumlah 40.493 orang x 100 % hasilnya = 11,05 %. Artinya bahwa di Kota Magelang pada Tahun 2016 prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah baru tercapai 11,05% dan masih belum memenuhi target sebesar 15%.

Apabila dilihat dari beberapa tahun yang lalu pada RPJM 2010-2015, target rata-rata sebesar 13% dan rata-rata dapat tercapai. Sehingga pada Tahun 2016 sebagai awal tahun pertama RPJMD 2016-2021 target 15%, tahun 2017 target 17 %, Tahun 2018 target 20%, Tahun 2019 target 23%, tahun 2020 target 26%, Tahun 2021 target 30%. Tahun pertama belum tercapai, untuk kedepan harus kerja ekstra untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Diperlukan kajian, cara, metode dan strategi , melalui dukungan program dan kegiatan yang dapat mencapai sasaran sehingga target dapat tercapai.

Capaian Indikator Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tahun 2016 dari target kinerja sebesar 17 % dapat terealisasi sebesar 13,94 % dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta sejumlah 5.643 orang dibagi jumlah perempuan bekerja sejumlah 40.493 orang x 100 % hasilnya = 13,94 %.

Artinya bahwa di Kota Magelang pada Tahun 2016 prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta baru tercapai 13,94 % dan masih belum memenuhi target sebesar 17%.

Apabila dilihat dari beberapa tahun yang lalu pada RPJM 2010-2015, target rata-rata sebesar 16 % dan rata-rata dapat tercapai. Sehingga pada Tahun 2016 sebagai awal tahun pertama RPJMD 2016-2021 ditetapkan target 17 %, tahun 2017 target 20 %, Tahun 2018 target 23%, Tahun 2019 target 26%, tahun 2020 target 30 %, Tahun 2021 target 35%.Tahun pertama belum tercapai untuk kedepan harus kerja ekstra untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga diperlukan kajian, cara, metode dan strategi, melalui program dan kegiatan yang dapat mencapai sasaran sehingga target dapat tercapai.

Capaian Indikator Rasio KDRT

Tahun 2016 dari target kinerja sebesar 0,065% dapat terealisasi sebesar 0,065% dengan perhitungan sebagai berikut :

Definisi operasionalnya adalah Perbandingan antara Jumlah Kasus KDRT yaitu sebesar 22 kasus dengan jumlah rumah tangga yaitu sebanyak 33.807 x 100 %. Hasilnya yaitu sebesar 0,065 %.

Artinya bahwa realisasi kinerja sama dengan target kinerja pada tahun 2016.

Target Rasio KDRT yang diproyeksikan selama 5 tahun perencanaan sebagai berikut: Tahun 2016 target sebesar 0,065%, Tahun 2017 sebesar 0,060%, Tahun 2018 sebesar 0,55%, Tahun 2019 sebesar 0,050%, Tahun 2020 sebesar 0,04% dan Tahun 2021 sebesar 0,04%. Melalui dukungan program dan kegiatan yang sesuai diharapkan akan dapat memberikan kontribusi positif bagi tercapainya target kinerja di masa yang akan datang dalam rangka terwujudnya sasaran ini.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 829.336.779,00 dari anggaran sebesar Rp 1.024.906.000,00 atau 80,92% dari target. Realisasi keuangan sebesar 80,92% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 85,22%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 4

1. Sasaran Pertumbuhan Jenis Kesenian dan Adat Budaya yang Dikembangkan dan Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan

Kebudayaan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan nasional. Selain merupakan salah satu unsur yang mampu menarik kunjungan wisata, budaya juga merupakan jati diri bangsa yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Pembangunan di bidang budaya, meliputi beberapa unsur diantaranya kesenian, tradisi, sejarah dan kepurbakalaan. Keempat unsur tersebut adalah cerminan hasil budaya yang berkembang di masyarakat. Pengembangan nilai budaya diharapkan mampu mendasari pola pikir, sikap dan tindakan budaya luhur bangsa seperti kejujuran, saling menghormati, tepo seliro, gotong royong dan nilai-nilai positif lainnya. Pengembangan keragaman dan kekayaan budaya seyogyanya dapat diarahkan pada pengembangan khasanah budaya dalam bentuk kesenian serta tradisi dalam masyarakat yang bisa memberikan daya tarik dibidang industri pariwisata.

Tabel 3.45
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertumbuhan Jenis Kesenian dan Adat Budaya yang Dikembangkan dan Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13,00%	13,50%	15,00%	111,11%	16,00%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator. Realisasi kinerja untuk indikator persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan adalah 15,00% artinya telah melampaui target. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 111,11%. Apabila realisasi kinerja 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 13,00% maka terjadi peningkatan sebesar 2 poin.

Capaian Indikator Persentase Kelompok Seni Budaya yang Difasilitasi/Dibina dan Dikembangkan

Realisasi kinerja untuk indikator sasaran ini menunjukkan hasil yang sangat tinggi, potensi seni dan budaya yang lainnya, apabila dikembangkan akan merupakan salah satu unsur ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan PDRB dari sektor pariwisata. Potensi seni yang saat ini berkembang di Kota Magelang antara lain berupa sanggar-sanggar seni tari tradisional dan kreasi baru, seni karawitan, seni lukis, teater dan film. Hasil pendataan hingga tahun 2016 terdapat sekurangnya 222 kelompok seni di Kota Magelang. Jumlah tersebut masih mungkin bertambah, mengingat pendataan belum selesai. Pembinaan dan Pengembangan telah dilakukan terhadap sekitar 40 Kelompok seni Budaya yang ada di Kota Magelang.

Berbagai ajang seni budaya pun secara rutin diselenggarakan seperti Grebeg Gethuk, Kirab Budaya, Festival Tidar, Pagelaran Wayang Kulit, Upacara Adat/Tradisi, Magelang Tempo Dulu, Pentas Seni, Tembang Kenangan dan lain sebagainya. Selain itu, Kota Magelang selalu mempromosikan keunggulan seni budaya khas Kota Magelang melalui berbagai event seperti : Pentas budaya di TMII, GWBN, PRPP, Parade Seni Jawa Tengah, Kemah Budaya, APEKSI, dan lainnya. Selain festival seni tersebut diatas beberapa kegiatan seni budaya juga digelar oleh masyarakat atau kelompok-kelompok seni secara mandiri seperti Grebeg Tahu, Kirab Pusaka dan Upacara-upacara adat lainnya.

Dalam hal sarana prasarana kesenian Pemerintah Kota Magelang telah memfasilitasi berupa Gedung Sasana Bumi Kyai Sepanjang sebagai gedung kesenian, yang di dalamnya terdapat pula fasilitas yang dipergunakan untuk Dewan Kesenian Kota Magelang (DKKM). Selain gedung Sasana Bumi Kyai Sepanjang, beberapa tempat yang sering pula dipakai untuk pementasan kesenian antara lain : Gedung Wiwiro Widji Pinilih, Kompleks Eks Karesidenan Kedu, Gedung Wanita, Gedung Tri Bhakti, Alun-Alun Kota, Taman Kyai Langgeng, dan lain-lain.

Sebagai amanat atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, maka Pemerintahan Kota Magelang telah melakukan berbagai kegiatan dan pendanaan di bidang seni budaya, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak : masyarakat, dunia usaha, seniman/budayawan, media massa dan juga kerjasama antar daerah.

Dalam hal prestasi, beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang baik. Satu prestasi diraih pada tahun 2015 adalah Juara I dalam Lomba Membuat Film dalam ajang Kemah Budaya tingkat Provinsi. Lalu di tahun 2016 menyabet 3 piala di ajang Lomba Teater Rakyat yang dilaksanakan di TMII Jakarta dan sebagai Juara kedua Film Terbaik Bidang Film Pendek di ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SMK.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.696.004.700,00 dari anggaran sebesar Rp 1.741.477.000,00 atau 97,39% dari target. Realisasi keuangan sebesar 97,39% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 111,11 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2. Sasaran Pertumbuhan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Potensial

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.46
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertumbuhan
Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Potensial

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Jumlah Wisatawan					
	a. Nusantara	1.133.373	1.134.846	1.139.585	100,42%	1.143.954
	b. Mancanegara	5.171	5.178	6.793	131,19%	5.219
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					115,81%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator yang dijabarkan menjadi 2 sub indikator. Realisasi kinerja untuk sub indikator jumlah wisatawan nusantara 1.139.585 artinya telah melampaui target. Selanjutnya Realisasi kinerja untuk sub indikator jumlah wisatawan mancanegara 6.793 artinya telah melampaui target. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 115,80%. Apabila realisasi kinerja jumlah wisatawan nusantara tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 1.133.373 orang terjadi peningkatan sejumlah 6.212 orang. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara mengalami peningkatan sejumlah 1.622 orang.

Capaian Indikator Jumlah Wisatawan

- Nusantara
- M mancanegara

Kawasan wisata utama yang menjadi daya tarik wisatawan Nusantara saat ini di kota Magelang adalah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng. Hal ini dapat terlihat khususnya di setiap akhir pekan Taman kyai Langgeng selalu dipadati oleh pengunjung. Untuk itu guna meningkatkan daya tarik Taman Kyai Langgeng, sudah selayaknya pihak manajemen Taman Kyai Langgeng sebagai BUMD senantiasa melakukan inovasi dan aktivitas kreatif yang dapat menarik dan memberikan kepuasan bagi pengunjung Taman Kyai Langgeng. Pembenahan, perawatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di obyek wisata harus selalu dilakukan guna memberikan nilai lebih sehingga dapat meningkatkan daya saing dibandingkan dengan obyek wisata di daerah lain.

Magelang dengan Luas Wilayah hanya sekitar 18,12 km², kondisi ini merupakan tantangan yang perlu dijawab dalam pengembangan dan upaya penambahan destinasi wisata baru. Beberapa peluang pengembangan destinasi wisata di Kota Magelang masih cukup terbuka seperti Kawasan Gunung Tidar, museum-museum, bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda, pengembangan kampung wisata, serta kawasan wisata kuliner. Beberapa event- event penting yang berskala lokal, nasional dan Internasional yang dilaksanakan di Kota Magelang selalu diiringi oleh sajian seni budaya lokal seperti kesenian jatilan, topeng ireng dan lainnya diharapkan mampu meningkatkan daya tarik pariwisata di Kota Magelang. Event khusus

pariwista dilaksanakan rutin setiap tahunnya di setiap sudut kota seperti pagelaran seni dan budaya dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kota Magelang ataupun Peringatan HUT Kemerdekaan RI. Pelaksanaan kegiatan rutin mingguan seperti pelaksanaan Car Free Day di kawasan Lapangan Rindam terbukti menarik banyak pengunjung dan perkembangannya pesat dari waktu ke waktu. Even Car Free Day ternyata memberikan multyplier efek di berbagai bidang diantaranya perdagangan dan bisnis, ajang promosi produk lokal serta jasa lainnya bagi pengunjung. Pengembangan kawasan sport center di sekitar GOR SAMAPTA kedepan bisa dijadikan alternatif pengembangan kunjungan wisata olah raga dan kebugaran.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 942.918.654,00 dari anggaran sebesar Rp 983.131.000,00 atau 95,91% dari target. Realisasi keuangan sebesar 95,91% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 115,81%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 5

1. Sasaran Terbentuknya Karakter Religius Masyarakat Sebagai Landasan Moral dan Etika Pembangunan

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.47
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terbentuknya Karakter Religius Masyarakat
Sebagai Landasan Moral dan Etika Pembangunan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	100,00%	3%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator, dengan realisasi 3% dari target yang ditetapkan sebesar 3% sehingga dapat disimpulkan indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 100,00%.

Capaian Indikator Prosentase Penurunan Penyakit Masyarakat

Pencapaian sasaran pertama pada Misi Kelima dengan indikator Prosentase penurunan penyakit masyarakat mendapatkan realisasi sebesar 3%. Hal ini terjadi karena terdapat penurunan pelanggaran penyakit masyarakat sebanyak 9 (sembilan) kasus, dimana pada tahun 2015 terdapat 292 kasus dan pada tahun 2016 menjadi 283 kasus. Realisasi kinerja tahun 2016 jauh lebih baik jika dibandingkan tahun 2015 sebesar -2,13%.

Adapun indikator sasaran ini dicapai melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD dengan capaian pada tahun 2016 sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SKPD	JUMLAH KASUS
1	Operasi PGOT	Disnakertransos	149
2	Sidak Pelajar	Dinas Pendidikan	35
3	Operasi Pekat	Kesbangpol & Linmas	68
4	Operasi Pekat	Satpol PP	31
JUMLAH			283

Kendala yang perlu diantisipasi ke depan antara lain:

1. Kerahasiaan informasi pelaksanaan kegiatan operasi penyakit masyarakat perlu ditingkatkan, agar mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Penanganan setelah terjaring kegiatan-kegiatan penyakit masyarakat masih dalam tahapan pembinaan sehingga banyak pelaku yang masih mengulangi perbuatannya.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perlu persiapan yang lebih terencana sehingga informasi terjaga kerahasiannya sampai dengan hari-H pelaksanaan kegiatan operasi penyakit masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan penyamaan persepsi kepada pelaksana kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Perlu penerapan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan efek jera kepada pelaku.

Gambar 3.18
Pelaksanaan Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat



Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 344.454.000,00 dari anggaran sebesar Rp 356.119.000,00 atau 96,72% dari target. Realisasi keuangan sebesar 96,72% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2. Sasaran Terwujudnya Lingkungan Kondusif yang Mendukung Stabilitas Daerah serta Memberikan Rasa Aman Bagi Masyarakat

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.48
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Lingkungan Kondusif yang Mendukung Stabilitas Daerah serta Memberikan Rasa Aman Bagi Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Angka kriminalitas	14,14%	13,64%	14,02%	97,21%	11,14%
2	Prosentase penurunan kasus narkoba	-13,04%	3%	3%	100,00%	3%
3	Angka kriminalitas yang tertangani	11,08%	11,50%	9,89%	86,00%	12,50%
4	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					95,80%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 4 indikator. Realisasi kinerja untuk 2 indikator telah mencapai target. Sedangkan 2 indikator lainnya masih berada di bawah target. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 95,80%.

Capaian Indikator Angka Kriminalitas

Hasil evaluasi capaian kinerja terhadap indikator Angka Kriminalitas mendapatkan nilai capaian sebesar 97,21%. Hal ini karena jumlah kriminalitas yang terjadi pada tahun 2016 hanya turun 1 (satu) kasus dibandingkan dengan jumlah kasus kriminalitas pada tahun 2015. Target yang diharapkan adalah terjadi penurunan kasus kriminalitas sebanyak 6 (enam) kasus. Dari target yang ditetapkan sebesar 13,64% realisasi kinerja 14,02%. Apabila realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 maka realisasi angka kriminalitas tahun 2016 lebih rendah 0,12 poin.

Berikut ditampilkan perkembangan jumlah kasus kriminalitas dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus terselesaikan	%
2012	184	134	72,83
2013	132	90	68,18
2014	149	108	72,48
2015	171	134	78,36
2016	170	120	70,58



Adapun indikator sasaran ini dicapai melalui program/kegiatan :

- a. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 286.841.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 296.465.000,- atau 96,75%.
- b. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 131.603.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 134.078.000,- atau 98,15%.
- c. Peningkatan Kemananan dan Kenyamanan Lingkungan dengan ralisasi anggaran sebesar Rp. 440.689.500,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 451.774.000,- atau 98,15%.
- d. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.439.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 89.993.000,- atau 99,38%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesatuan bangsa dan politik termasuk dalam ranah urusan pemerintahan umum. Namun mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum belum diundangkan, maka berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 dan 16 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang masih menggunakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun fungsi Perlindungan Masyarakat dan fungsi Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Beberapa kendala yang perlu diantisipasi antara lain:

1. Kurangnya kuantitas patroli terpadu untuk meminimalisir kesempatan terjadinya kejahatan;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan siskamswakarsa.

Untuk kedepannya kegiatan-kegiatan dalam rangka mencegah terjadinya tindak kriminal dapat lebih dioptimalkan antara lain dengan:

1. Meningkatkan sistem keamanan lingkungan di masyarakat sehingga dapat menekan kesempatan bagi orang-orang yang mempunyai niat untuk melakukan tindak kriminal.
2. Melaksanakan patroli terpadu yang melibatkan semua unsur pengamanan baik dari Polisi, TNI maupun Sipil;
3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam hal siskamswakarsa.

Capaian Indikator Prosentase Penurunan Kasus Narkoba

Hasil evaluasi capaian kinerja terhadap indikator Prosentase penurunan kasus narkoba mendapatkan nilai capaian sebesar 100,00 %. Hal ini karena pada tahun 2016 terjadi penurunan kasus narkoba, dimana dalam 5 (lima) tahun sebelumnya kasus narkoba yang terjadi di Kota Magelang cenderung naik dengan jumlah kejadian 79 kasus narkoba.

Mengacu pada jumlah tersebut maka ditargetkan sampai dengan akhir periode perencanaan terjadi penurunan kasus sampai dengan 15% dari jumlah kasus pada 5 (lima) tahun sebelumnya yang terbagi dalam 5 (lima) tahun dengan proyeksi 1 sampai dengan 5 kasus setiap tahunnya.

Indikator sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.180.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 66.551.000,- atau 94,93%.

Permasalahan yang perlu diantisipasi ke depan:

1. Kota Magelang secara geografis merupakan daerah perlintasan yang rawan terhadap peredaran narkoba;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Solusi yang dapat dilakukan dengan:

1. Membentuk BNN Kota Magelang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
2. Mengintensifkan pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penyalahgunaan Minuman Keras dan Narkoba (P4GN) dan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat).
3. Melibatkan masyarakat dalam upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan membentuk kampung anti narkoba.

Gambar 3.19
Upaya P4GN



Capaian Indikator Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Hasil evaluasi capaian kinerja terhadap indikator Angka kriminalitas yang tertangani mendapatkan nilai capaian sebesar 86,03%. Dari target 11,50% yang tertangani dapat direalisasi sebesar 9,89%. Indikator ini sangat berkaitan dengan indikator angka kriminalitas, namun capaiannya juga masih di bawah target. Hal ini terjadi karena tingkat penanganan kasus diharapkan ada kenaikan sebanyak 6 (enam) kasus dari tahun lalu tidak tercapai.

Realisasi kinerja pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 juga masih lebih rendah sebesar 1,19 poin.

Capaian Indikator Tingkat Kerukunan Hidup Umat Antar Suku, Adat, Ras dan Agama

Hasil evaluasi capaian kinerja terhadap indikator Tingkat kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama mendapatkan nilai capaian sebesar 100%.

Pada tahun 2016 tidak terjadi konflik bernuansa SARA di Kota Magelang, namun demikian untuk menjaga kondusifitas daerah maka peran FKUB, FPBI dan FKDM perlu dioptimalkan. Di samping itu dialog wawasan kebangsaan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, generasi muda, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik secara intensif.

Indikator sasaran ini dicapai melalui Program/Kegiatan :

- Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 101.160.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 102.864.000,- atau 98,34%.
- Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 87.380.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 88.786.000,- atau 98,42%.
- Pendidikan Politik Masyarakat dengan ralisasi anggaran sebesar Rp. 57.502.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 60.357.000,- atau 95,27%.
- Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.988.598,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 42.592.000,- atau 82,15%.

Gambar 3.20

Dialog Peningkatan Wawasan Kebangsaan



Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.292.783.098,00 dari anggaran sebesar Rp 1.333.460.000,00 atau 96,95% dari target. Realisasi keuangan sebesar 96,95% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95,80%, maka belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

3. Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat dalam Peribadatan

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.49
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat dalam Peribadatan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target 2016	Realisasi 2016	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,56	3	2,54	84,67%	3

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator. Realisasi kinerja untuk indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah 2,54 artinya belum mencapai target. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 84,67%.

Capaian Indikator Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Capaian indikator Rasio tempat ibadah per satuan penduduk dihitung dengan formula jumlah tempat ibadah yang ada di Kota Magelang pada tahun n dibagi jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun n dikalikan 1.000. Data sekunder jumlah tempat ibadah di Kota Magelang adalah data tempat ibadah yang dihimpun pada 17 kelurahan wilayah Kota Magelang hasil pendataan Tahun 2014, yaitu sebesar 337 tempat ibadah, yang terdiri 134 masjid, 164 musholla, 31 gereja, 2 vihara, 2 klenteng dan 4 rumah do'a. Sehingga capaian indikator tersebut adalah :

$$\frac{337 \text{ tempat ibadah}}{132.662 \text{ jiwa}} \times 1.000 = 2,54$$

Capaian indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk pada tahun 2016 lebih kecil dibandingkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3, sehingga capaian kinerja indikator dimaksud sebesar 84,67% masih di bawah target.

Direncanakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Magelang akan melakukan updating data tempat ibadah di Kota Magelang pada tahun 2017, mengingat data (tahun 2014) tersebut hanya berkisar data tempat ibadah yang ada di 17 kelurahan se Kota Magelang dan belum mengakomodir pada instansi-insatansi pemerintah/swasta, ataupun BUMN/BUMD sehingga dimungkinkan data tersebut akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 174.460.000,00 dari anggaran sebesar Rp 230.930.000,00 atau 75,55% dari target. Realisasi keuangan sebesar 75,55% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 84,67%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

3.3. Capaian Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kota Magelang

3.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. PDRB atas Dasar Harga Berlaku

PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Tahun 2015 ekonomi Kota Magelang kembali menunjukkan ekspansi setelah sebelumnya mengalami perlambatan di tahun 2014. PDRB atas dasar harga berlaku tumbuh 9,2% mencapai nominal Rp. 6,466 triliun dengan dominasi nilai tambah dari sektor Konstruksi (16,86%). Sumbangan barang dan jasa dari usaha manufaktur di Kota Magelang semakin optimal terbukti dengan tingginya distribusi sektor Industri Pengolahan (16,41%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,13%). Kondisi inflasi yang terjaga di akhir tahun 2015 pada angka 2,7% dan kondusifnya iklim serta kebijakan baik nasional maupun regional sepanjang tahun 2016 menghasilkan prediksi yang optimis terhadap perekonomian makro di akhir tahun 2016. Diprediksi perekonomian di tahun 2016 tumbuh 9,28% (deviasi $\pm 0,68\%$) dengan total PDRB sebesar Rp. 7,067 triliun.

Tabel 3.50
Prediksi NTB dan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang
atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2016

LAPANGAN USAHA	NTB* (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	138.559,06	6,64
Industri Pengolahan	1.160.029,45	10,81
Pengadaan Listrik dan Gas	18.182,71	4,78
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.783,55	3,31
Konstruksi	1.191.761,81	8,51
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	998.387,89	5,85
Transportasi dan Pergudangan	493.004,07	10,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	417.470,45	10,01
Informasi dan Komunikasi	336.044,29	8,72
Jasa Keuangan dan Asuransi	342.112,28	9,02
Real Estate	227.525,19	8,27
Jasa Perusahaan	23.729,72	11,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	820.821,98	7,82
Jasa Pendidikan	558.251,54	16,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196.094,20	12,34

LAPANGAN USAHA	NTB* (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
Jasa lainnya	136.599,07	7,23
PDRB	7.067.357,25	9,28

Sumber: Prediksi oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang (deviasi $\pm 0,68\%$)

* Prediksi NTB lapangan usaha di-breakdown berdasar rata-rata pertumbuhan tahun 2010-2015

Berdasarkan data PDRB Kota Magelang dan Jawa Tengah periode tahun 2011-2015 dapat diturunkan matrik tipologi perekonomian Kota Magelang sebagai berikut:

Tabel 3.51
Matrik Tipologi Sektor Pembentuk PDRB berdasar Indikator Indeks Dominasi Sektor (IDS) dan Indeks Potensi Pengembangan Sektor (IPPS) di Kota Magelang*

Klasifikasi Sektor	Tidak Dominan (IDS <1)	Dominan (IDS >1)
Tidak Potensi Berkembang (IPPS < 1)	<ol style="list-style-type: none">1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum4. Jasa Keuangan dan Asuransi5. Jasa lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Konstruksi2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Potensi Berkembang (IPPS > 1)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan Listrik dan Gas2. Informasi dan Komunikasi3. Real Estate4. Jasa Perusahaan5. Jasa Pendidikan6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Industri Pengolahan2. Transportasi dan Pergudangan

*Derivatif berdasarkan data PDRB Tahun 2011-2015

Sektor Industri Pengolahan dan Transportasi & Pergudangan merupakan sektor dominan dengan potensi pengembangan yang sangat baik. Di tahun 2016 diprediksi kedua sektor ini mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum. Hal ini tidak terlepas dari peran Kota Magelang sebagai wilayah strategis di jalur ekonomi Kabupaten/Kota sekitar dan makin berkembangnya riset inovatif terhadap produk lokal yang mendorong naiknya nilai tambah yang dihasilkan.

Sebagai Kota Jasa, industri manufaktur di Kota Magelang menjadi komponen pembangun perekonomian yang cukup penting. Meskipun sektor Industri Pengolahan dominan dan potensial di Kota Sejuta Bunga ini, namun berdasarkan nilai *Static Location Quotient* terindikasi bahwa sektor ini masih belum masuk dalam kategori sektor unggul jika di dibandingkan dengan produksi sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Output sektor ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan tergantung pasokan dari luar wilayah. Namun demikian dari sisi daya saing dan pertumbuhan, potensi perkembangan sektor Industri Pengolahan di Kota Magelang tercatat lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di skala Provinsi.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Magelang perlu terus mengembangkan sektor dominan dan sektor potensial (kuadran kuning) agar dapat menjadi basis perekonomian dengan kontribusi terhadap PDRB yang signifikan. Di samping fokus pada sektor tersebut, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) eksplorasi potensi produk dari industri kreatif dan pariwisata di

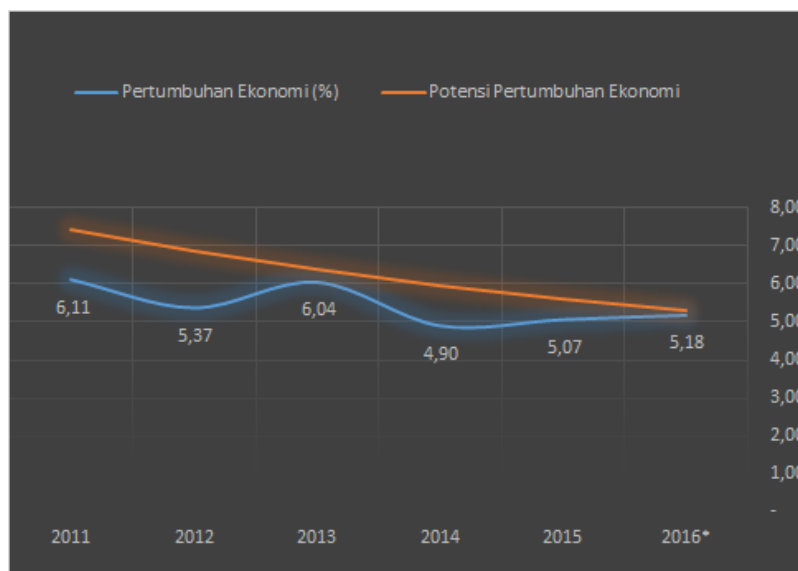
Kota Magelang dapat ditingkatkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing secara berkelanjutan.

b. PDRB atas Dasar Harga Konstan (2010) dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang sempat berkontraksi di tahun 2014 mencapai 4,9% setelah di tahun 2013 mampu melaju di atas angka enam persen. Hal tersebut karena terjadi perlambatan produksi hampir di seluruh sektor dengan perlambatan terparah pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencapai -0,51%.

Di tahun 2015 perekonomian Kota Magelang kembali menguat dengan pertumbuhan 5,07% dengan 9 dari 16 sektor mampu tumbuh riil di atas rata-rata. Fluktuasi ekonomi yang terkendali membuat kinerja pembangunan semakin baik dan di tahun 2016 diprediksi ekonomi makro Kota Magelang mampu tumbuh 4,93%-5,43% dengan tren mendekati pertumbuhan riil potensialnya.

Gambar 3.21
Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi
Kota Magelang, Tahun 2011-2015 dan Prediksi Tahun 2016



Sumber: BPS Kota Magelang

Prediksi 2016 oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang (prediksi pada poin 5,18% deviasi $\pm 0,25\%$)

Gambar 2-1 menunjukkan bahwa pada setiap tahun pertumbuhan ekonomi Kota Magelang makin mendekati pertumbuhan riil potensialnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pembangunan di segala bidang dilaksanakan dengan sangat baik sehingga mampu mencapai output yang optimal. Jika kinerja tersebut semakin ditingkatkan tidak mustahil di periode selanjutnya akan tercapai output gap positif dimana pertumbuhan riil akan melesat melebihi potensi pertumbuhannya.

c. Kontribusi Sektor Perekonomian Terhadap PDRB

Komposisi lapangan usaha di Kota Magelang cenderung stagnan dari tahun ke tahun dengan dinamika pertumbuhan di beberapa sektor. Berdasar data historis tahun 2010-2015 diprediksi struktur ekonomi Kota Magelang di tahun 2016 masih tetap didominasi oleh sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 3.52
Prediksi Struktur Ekonomi Kota Magelang (adhb) Tahun 2016

LAPANGAN USAHA	Distribusi (%) [*]
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,96
Industri Pengolahan	16,41
Pengadaan Listrik dan Gas	0,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12
Konstruksi	16,86
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,13
Transportasi dan Pergudangan	6,98
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,91
Informasi dan Komunikasi	4,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,84
Real Estate	3,22
Jasa Perusahaan	0,34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,61
Jasa Pendidikan	7,90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,77
Jasa lainnya	1,93
PDRB	100

Sumber: Prediksi oleh Dinas Kominformasi dan Statistik Kota Magelang (deviasi $\pm 0,68\%$)

* Prediksi NTB lapangan usaha di-breakdown berdasar rata-rata pertumbuhan tahun 2010-2015

d. PDRB Per Kapita

Berdasarkan harga berlaku, komponen penggunaan yang dominan di Kota Magelang berasal dari Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB yang di tahun 2015 memiliki persentase 57,53% dan 47,65% dalam postur PDRB. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terjaga pada kisaran 0,35%, inflasi yang diperkirakan stabil pada kisaran 3,57%-5,15% dan pertumbuhan PDRB adhb 9,28% (deviasi $\pm 0,68\%$), maka di tahun 2016 diprediksi PDRB per kapita mampu mencapai Rp. 4.859.093,58 per bulan, tumbuh 8,9% dari tahun 2015 (*ceteris paribus*).

Tabel 3.53
PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2015 dan Prediksi Tahun 2016

Uraian	2015	2016
Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Berlaku (%)	9,20	9,28 ± 0,68%
Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan (%)	5,07	4,93% - 5,43%
Pertumbuhan Proyeksi Penduduk Akhir Tahun (%)	0,34	0,35
PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku (Rp/kapita/tahun)*	53.543.836,59	58.309.122,98
Pertumbuhan (%)	8,84	8,90

Sumber: BPS Kota Magelang

Prediksi oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang

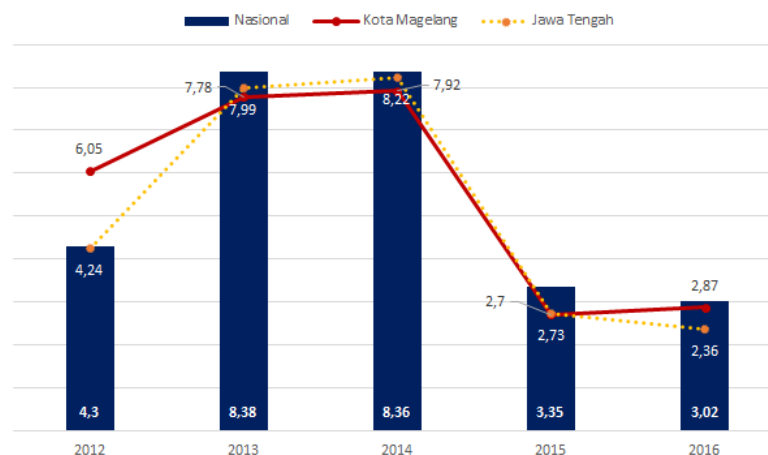
* Berdasar penduduk akhir tahun hasil proyeksi BPS

3.3.2. Inflasi

Sampai dengan akhir November 2016 inflasi di Kota Magelang tercatat sebesar 0,72% lebih tinggi dari Oktober 2016 (0,17%) dan November 2015 (0,31%). Hal tersebut terlebih dipicu karena kenaikan harga yang cukup tinggi pada beberapa komoditi pengeluaran pada kelompok Bahan Makanan sehingga mengalami lonjakan 3,26% dari bulan sebelumnya yang hanya berada pada angka 0,44%. Peningkatan tertinggi terjadi pada komoditi bumbu-bumbuan yang melejit mencapai inflasi 19,08% dibandingkan posisi Oktober 2016 yang hanya inflasi 5,65%. Deflasi di tahun 2016 terjadi pada bulan Februari (0,13%), April (0,48%) dan Agustus (0,48%).

Dengan kondisi harga komoditas bahan makanan yang masih cukup tinggi sampai dengan akhir Desember 2016 namun diimbangi dengan tetap tingginya daya beli masyarakat, diprediksi inflasi di akhir tahun 2016 tetap stabil pada kisaran 3,57%-5,15%. Hal ini sejalan dengan target pada tahun 2016 RPJMD Kota Magelang.

Gambar 3.22
Grafik Perkembangan Laju Inflasi Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional, Tahun 2012-2016



Sumber: BPS 2016 Kota Magelang posisi per November

3.3.3. Investasi

Menurut BPS, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai “pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas”. BPS menjelaskan lebih lanjut bahwa penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain).

Investasi yang didekati dari indikator PMTB di Kota Magelang mencapai Rp. 3,082 triliun di tahun 2015. Nilai ini tumbuh 9,92% setelah di periode sebelumnya sempat mengalami fluktuasi. Dengan asumsi prediksi pertumbuhan PDRB adhb sebesar 9,28% (deviasi $\pm 0,68\%$), maka PMTB juga diprediksi tumbuh positif di tahun 2016 mencapai Rp. 3,348 triliun.

Tabel 3.54
PDRB menurut Komponen Pengeluaran di Kota Magelang Tahun 2011-2015

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
Konsumsi Rumah Tangga	2.595.125,16	2.839.045,86	3.174.899,20	3.490.288,98	3.720.218,32
Konsumsi LNPRT	49.789,54	56.220,30	65.576,75	76.215,92	80.154,82
Konsumsi Pemerintah	845.572,71	936.067,71	1.050.065,57	1.158.918,89	1.284.528,25
PMTB	2.154.075,73	2.472.798,70	2.584.328,42	2.803.477,28	3.081.663,52
Perubahan Inventori	197.535,70	284.010,22	257.395,68	175.879,68	67.667,92
Ekspor	1.949.067,92	2.374.417,72	2.890.884,93	3.610.699,88	4.543.475,39
Impor	3.326.607,65	4.074.414,05	4.666.207,64	5.393.566,01	6.310.737,18
PDRB	4.464.559,10	4.888.146,47	5.356.942,92	5.921.914,62	6.466.971,04

Sumber: BPS Kota Magelang, 2016

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Prediksi yang cukup optimis ini didukung oleh kondisi eksisting iklim usaha di Kota Magelang yang sangat kondusif dan tingginya daya saing Kota Magelang (menduduki peringkat pertama di Jawa Tengah di tahun 2015 dengan indeks 64,72). Faktor lain adalah munculnya peluang ekonomi baru dari kawasan sekitar seperti berjalannya proyek lanjutan tol Bawen – Salatiga – Solo, proyek jalan lintas selatan Wonogiri – Yogyakarta – Kebumen – Cilacap, kebijakan prioritas pembangunan Kawasan Strategis Nasional KEDUNGSEPUR (Kendal – Ungaran – Semarang – Purwodadi), prioritas pembangunan area PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung) dan kawasan Segitiga Emas JOGLOSEMAR (Jogjakarta, Solo, Semarang) yang mampu menciptakan *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian Kota Magelang khususnya bagi sektor Transportasi & Pergudangan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 3.55
Pilar Daya Saing tertinggi di Kota Magelang di antara Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Tahun 2015

Pilar	Indikator	Peringkat
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">Kinerja pemerintahDukungan untuk dunia usahaDukungan untuk investasiHubungan kepala daerah dengan pelaku usahaTransparansi kebijakan,Efisiensi kerangka hukumBelanja produktif pemerintah	1
Lingkungan Usaha	<ul style="list-style-type: none">Ekspektasi prospek usahaBanyaknya permasalahan usaha yang menghambatKemudahan perizinan usahaDaya tarik investasi	1
Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">Kualitas SDMPersentase lulusan SMA dan PTUpah Minimum ProvinsiAngkatan kerja yang bekerjaAngka ketergantunganRata-rata lama sekolahIndeks Pembangunan Masyarakat	1
Kesehatan dan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">Harapan HidupJumlah SekolahKualitas Sistem Edukasi	1
Pasar Keuangan	<ul style="list-style-type: none">Kemudahan PembiayaanKantor BankDPKKredit	1
Teknologi	<ul style="list-style-type: none">Ketersediaan TeknologiPengguna InternetPengguna HP	1

Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 2016

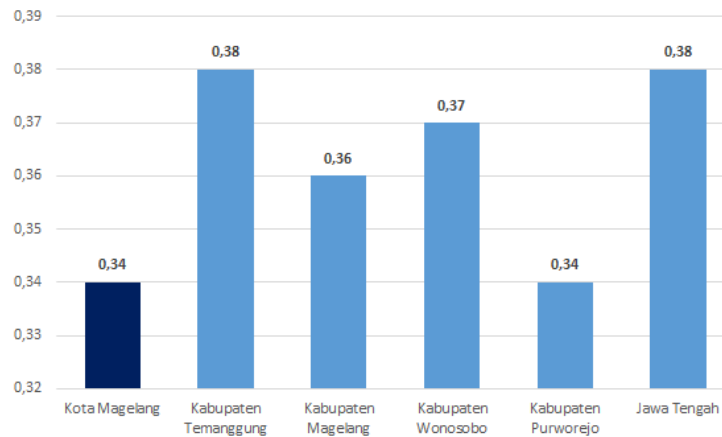
Selain mempertahankan kualitas pilar-pilar sebagaimana dalam Tabel 3.57, untuk meningkatkan kucuran modal dan kinerja investasi di Kota Magelang, Pemerintah Daerah perlu untuk menggenjot dua pilar lain yaitu makroekonomi dan infrastruktur yang masih memiliki indeks yang belum optimal di antara Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Realisasi investasi merupakan komponen yang memiliki bobot terbesar (67%) dalam pilar makroekonomi. Dengan eksplorasi peluang dan strategi interaksi ekonomi yang tepat, peningkatan yang signifikan dalam komponen ini akan mampu menaikkan indeks daya saing Kota Magelang secara keseluruhan dan lebih memantapkan postur makroekonomi Kota Magelang di antara wilayah sekitar.

3.3.4. Index GINI

Sebuah progres nyata dari hasil pembangunan sepanjang tahun 2015 salah satunya terwakili dari turunnya Indeks Gini dari 0,36 ke 0,34 di saat daerah lain bahkan skala Provinsi Jateng dan nasional berada pada posisi yang stagnan dan cenderung naik. Meskipun masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang, namun turunnya angka ini mencerminkan bahwa hasil pembangunan di Kota Magelang semakin merata dinikmati oleh masyarakat.

Gambar 3.23
Grafik Indeks Gini Kota Magelang dan Wilayah Sekitar, Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

Diprediksi sampai dengan akhir tahun 2016 angka ini akan berada pada kisaran 0,34 dengan kecenderungan menurun.

3.3.5. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada hakekatnya untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga tingkat kesejahteraan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. UNDP pada 1990 telah merancang bagaimana mengukur keberhasilan pembangunan Manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia yang disempurnakan metodenya pada tahun 2010.

Untuk itu dalam bahasan ini akan dideskripsikan bagaimana ukuran hasil pembangunan tersebut di Kota Magelang, bagaimana posisinya di wilayah *hinterland*, regional maupun nasional dan ditinjau dari pembangunan serta pemberdayaan *gender*-nya. Selanjutnya perlu ditinjau juga kondisi riil di daerah seperti *dependency ratio*, kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan. Dengan demikian kita akan mampu menarik sebuah catatan penting untuk pembangunan yang lebih baik.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan manusia adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks ini lazim digunakan baik pada skala internasional, nasional maupun regional. Dari indeks ini bisa diketahui tingkat kemajuan suatu wilayah (maju, berkembang atau terbelakang), serta mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Semakin tinggi nilai IPM berarti tingkat pencapaian pembangunan manusia semakin baik.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu alat dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia pada tahun 2015 telah dirilis penyempurnaan metode penghitungan oleh UNDP yang dilakukan *backcasting* mulai tahun 2010. Sehingga IPM yang telah terpublikasi hingga 2012 terkoreksi dengan penyempurnaan penghitungan tersebut.

Kondisi IPM Kota Magelang dalam dokumen perencanaan sebelumnya (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016) akan terkoreksi sebagai berikut :

Tabel 3.56
Perbandingan IPM Kota Magelang menurut Metode Lama dan Metode Baru

Tahun	Metode Lama *)	Metode Baru **)	Keterangan
2010	76,60	73,99	Karena perubahan metode penghitungan dan berlaku seluruh negara
2011	76,83	74,47	
2012	77,26	75,00	
2013	77,91	75,29	
2014		75,79	
2015		76,39	

Sumber: * RKPD Kota Magelang 2016
** BPS Kota Magelang

Selanjutnya untuk IPM 2015 sebesar 76,39 dan pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 76,13 serta pada tahun 2016 diharapkan akan mampu mencapai angka 76,77.

Koreksi angka IPM tersebut juga dialami oleh Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Sebagai ilustrasi berikut ini kondisi IPM Jawa Tengah dan Nasional baik dengan metode lama maupun baru.

Tabel 3.57
Perbandingan IPM Jawa Tengah dan Nasional menurut Metode Lama dan Metode Baru

Tahun	IPM Indonesia *)		IPM Jawa Tengah **)	
	Metode Lama	Metode Baru	Metode Lama	Metode Baru
2010	72,27	66,53	72,49	66,08
2011	72,77	67,09	72,94	66,64
2012	73,29	67,70	73,36	67,21
2013	73,81	68,31	74,05	68,02
2014	-	68,90	-	68,78
2015		69,55		69,49

Sumber: *) BPS RI
**) BPS Provinsi Jawa Tengah

Dalam metode baru ini setiap wilayah dikategorikan status pembangunan manusianya, yaitu :

- Sangat tinggi, apabila IPM di atas 80
- Tinggi, apabila IPM antara 70-80
- Sedang, apabila IPM antara 60-70
- Rendah apabila IPM kurang dari 60

Dengan demikian Kota Magelang berada pada kondisi IPM Tinggi, namun tidak termasuk yang memiliki “Top Movers” atau daerah yang mengalami pertumbuhan IPM tinggi. IPM Kota tertinggi diraih oleh Kota Yogyakarta dengan 83,78 dan terendah Kota Subulussalam dengan IPM 60,39 sedangkan untuk Kabupaten diraih oleh Kabupaten Sleman dengan 80,73 dan terendah Kabupaten Nduga dengan IPM 25,38.

Untuk mengukur IPM, diperlukan beberapa indikator ditinjau dari beberapa dimensi sebagai berikut:

a. Dimensi Kesehatan : Usia Hidup

Kesehatan merupakan dimensi IPM yang yang diukur dari Angka Harapan Hidup saat lahir. Hasil pengukuran Usia Harapan Hidup penduduk Kota Magelang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, sejak tahun 2010 hingga 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.58
Perkembangan Usia Harapan Hidup (tahun)
Penduduk Kota Magelang Tahun 2010-2015

Tahun	Metode Lama*)	Metode Baru**)
2010	70,22	76,39
2011	70,28	76,44
2012	70,34	76,49
2013	70,74	76,54
2014	70,87	76,57
2015		76,58

Sumber : *) RKPDP Kota Magelang 2016 **) BPS Kota Magelang

Seiring dengan publikasi IPM metode baru Usia Harapan Hidup Penduduk Kota Magelang terkoreksi sebagaimana tabel di atas. Selanjutnya dengan data tersebut diperkirakan usia harapan hidup penduduk Kota Magelang pada 2016 akan mencapai 76,64 tahun.

b. Dimensi Pendidikan

Pendidikan merupakan Dimensi kedua dalam IPM yang diukur dari rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan angka melek huruf untuk metode lama sedangkan dalam metode baru dihitung dari rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan Harapan lama sekolah yang dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Penyempurnaan teknis pengukuran dimensi pendidikan memberikan konsekuensi nilai yang diperoleh oleh Kota Magelang lebih rendah dari metode sebelumnya.

Tabel 3.59
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Magelang Tahun 2010-2015,
antara Metode Lama dan Metode Baru (tahun)

Tahun	Metode Lama*)	Metode Baru**)
2010	10,21	10,08
2011	10,22	10,14
2012	10,36	10,20
2013	10,42	10,22
2014	10,49	10,27
2015		10,28
2016		10,36 ***)

Sumber : *) RKPDP Kota Magelang 2016.

**) BPS Kota Magelang

**) RPJMD Kota Magelang 2016-2020

Sedangkan unsur dimensi baru berupa Harapan lama Sekolah untuk Kota Magelang dalam periode tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.60
Harapan Lama Sekolah (tahun) Penduduk Kota Magelang Tahun 2010-2015

Tahun	Harapan Lama Sekolah
2010	12,22
2011	12,33
2012	12,49
2013	12,65
2014	12,98
2015	13,10
2016	13,27*)

Sumber : *) RPJMD Kota Magelang 2016-2020

Berkaitan dengan dimensi pendidikan, ada beberapa indikator pendidikan yang perlu didalami sebagai pendukung seperti angka Patisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Jumlah Penduduk di atas 25 tahun menurut pendidikan yang ditamatkan, sebagai berikut:

Tabel 3.61
Beberapa Indikator Pendidikan Penduduk Kota Magelang
Tahun 2014-2015

Indikator Pendidikan	2014	2015
APK		
• APK PAUD	63,11	63,50
• 0-2 tahun		
• 3-6 tahun		
• 0-6 tahun		
• APK SD	114,04	108,15
• APK SMP	94,08	81,92
• APK SMA	92,16	90,76
APM		
• APM SD	100	96,61
• APM SMP	84,81	74,62
• APM SMA	77,16	64,64

Sumber : BPS Kota Magelang

Ditinjau dari APK dapat disimpulkan bahwa sampai dengan 2015 dari semua fasilitas pendidikan PAUD di Kota Magelang dapat diakses masyarakat tanpa membedakan penduduk kota maupun luar kota yang berarti belum semua anak usia dini di Kota Magelang mengakses fasilitas PAUD. Dibandingkan tahun 2014 yang 63,11 APK PAUD mengalami sedikit peningkatan menjadi 63,5 di tahun 2015. Dari data APK SD dapat dijelaskan bahwa fasilitas SD di Kota Magelang sedikit mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu dari 114,04 menjadi 108,15. Begitu juga APK untuk SMP dan usia SMA pada tahun 2015 jumlah penduduk usia SMP dan SMA yang terlayani lebih rendah dari jumlah penduduk usia SMP dan juga SMA.

APM SD, SMP dan SMA pada tahun 2015 juga terlayani sedikit menurun dibanding tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk Usia SMD, SMP maupun SMA yang mampu mengakses pendidikan jenjang tersebut cenderung agak menurun dibanding 2014, meskipun tidak menyiratkan bahwa kualitas pelayanan pendidikan di Kota Magelang menurun tetapi ada aspek aspek lain yang belum ter jelaskan.

Selain indikator2 di atas, keberhasilan pendidikan di Kota Magelang dapat dilihat dari perkembangan kelulusan dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tabel 3.62
Beberapa Lulusan Peserta Didik di Kota Magelang Tahun 2012-2014

TAHUN	SD			SLTP			SLTA		
	Peserta	Lulus	%	Peserta	Lulus	%	Peserta	Lulus	%
2014	2.452	2.452	100%	3.254	3.254	100,00%	4.633	4.628	99,89%
2013	2.510	2.510	100%	3.013	3.009	99,87%	4.683	4.673	99,79%
2012	2.392	2.392	100%	2.999	2.980	99,37%	4.436	4.430	99,86%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Magelang

Catatan keberhasilan pendidikan di Kota Magelang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Meraih Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tingkat SMA/SMK/MA tertinggi nasional. yang mencapai skor 81,26, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 63,28.
- 2) Rata-rata UN IPS SMA Negeri 1 Magelang dan SMK Kesdam IV/Diponegoro Magelang sebagai yang terbaik se-Jawa Tengah.
- 3) SMP Negeri 1 Kota Magelang meraih Indeks Integritas UN (IIUN) tertinggi se-Indonesia, untuk ujian nasional (UN) berbasis kertas dengan meraih nilai UN 93,53 dan nilai IIUN 97,12.

c. Dimensi Standar Hidup

Dimensi standar hidup dalam komponen ini dihitung dari kemampuan masyarakat mengakses sumber-sumber ekonomi yang rumusnya dihitung dari berapa jumlah pengeluaran riil penduduk yang disesuaikan. Pengeluaran perkapita Penduduk Kota Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, namun demikian tidak dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat lebih baik karena untuk menganalisis tersebut perlu diperhitungkan faktor lain seperti kurs mata uang. Kondisi perkembangan Pengeluaran riil penduduk Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.63
Perkembangan Pengeluaran Riil Penduduk Kota Magelang Tahun 2009-2012
beserta prediksi 2013-2015

Tahun	Riil	Proyeksi *	
		RKPD 2016	ASPM 2014
2009	648,06		
2010	649,52		
2011	651,91		
2012	655,08		
2013			657,7
2014			660,65
2015			663,71

Sumber : RKPD 2016 dan ASPM 2014. *) diperbaiki

Pada Tabel di bawah ini dapat dilihat perkembangan nilai IPM beserta komponen-komponen pembentuknya dari tahun 2010 sampai 2015, serta prediksinya di tahun 2016.

Tabel 3.64
Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya
di Kota Magelang Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Pembangunan Manusia [%]	73.99	74.47	75.00	75.29	75.79	76.39
Angka Harapan Hidup (eo) [Tahun]	76.39	76.44	76.49	76.54	76.57	76.58
Harapan Lama Sekolah [Tahun]	12.22	12.33	12.49	12.65	12.98	13.10
Rata-rata Lama sekolah [Tahun]	10.08	10.14	10.20	10,22	10,27	10,28
Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan [Rp. 000]	9,681	9,922	10,169	10,258	10,344	10,739

Sumber: BPS 2016

Pada tabel tersebut dapat dilihat, bahwa secara perlahan, angka IPM beserta komponen pendukungnya merambat naik.

Walaupun secara kesejahteraan hal ini bisa dikatakan sebagai hal yang bagus, tetapi jika Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah tidak bisa mengikuti secara signifikan, maka bisa menimbulkan masalah baru yaitu menambah angka pengangguran. Meningkatnya Angka Harapan Hidup juga pada akhirnya nanti bisa meningkatkan Angka Ketergantungan Penduduk, bila tidak diikuti penurunan Angka Pengangguran.

Harapan agar IPM Kota Magelang mampu meningkat hanya dapat didorong dari meningkatkan Rata-rata lama sekolah, bila pada 2013 rata-rata lama sekolah penduduk baru setara kelas satu SMA, perlu terus didorong agar mampu mencapai lulus SMA atau 12.00.

d. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IPG dan IDG digunakan untuk mengukur pencapaian pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. IPG mengukur kualitas hidup perempuan dengan menggunakan komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi, sedangkan IDG mengukur partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Dengan menggunakan IPG, dapat diketahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0% - 100%. Makin tinggi nilai IPG, berarti makin tinggi kesenjangannya. Kesetaraan gender terwujud apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Dengan menggunakan IDG, dapat diukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci yaitu dalam partisipasi ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan. IDG juga memiliki kisaran nilai 0% - 100%, dengan makin tinggi nilainya berarti semakin tinggi perempuan dalam mengambil peran aktif yang penting dalam kehidupan ekonomi dan politik, atau dapat dikatakan semakin sempurna pemberdayaan perempuannya.

Kondisi IPG dan IDG Kota Magelang bila disandingkan dengan IPM tampak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.65
Nilai IPG, IDG, dan IPM Kota Magelang, Tahun 2010-2015

Tahun	IPG	IDG	IPM
2010	94,16	65,29	73,99
2011	94,83	66,29	74,47
2012	95,14	67,29	75,00
2013	95,36	68,03	75,29
2014	95,45	78,82	75,79
2015	95,81	75,83	76,39

Sumber: BPS

IPM dan IDG merupakan angka-angka penilaian nasional. Sampai dengan tahun 2015, Angka IPG dan IPM dan IDG memiliki kecenderungan meningkat. Untuk nilai Indeks Pembangunan Gender di Kota Magelang, sampai dengan tahun 2015, memiliki trend yang baik, sedangkan untuk angka IDG masih flungtuatif dan di tahun 2015 mengalami sedikit penurunan dibanding 2014 yaitu di angka 75,83. Angka IPM memiliki kecenderungan terus menaik.

Perubahan metodologi yang terjadi menyebabkan perubahan interpretasi dari angka IPG. Metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM, semakin kecil selisih angka IPG dan IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki laki dan perempuan. Dengan metode baru interpretasi angka IPG berubah dengan menggunakan angka 100 yang dijadikan patokan karena angka tersebut merupakan rasio paling sempurna, yaitu semakin kecil jarak IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki laki dan perempuan dan semakin besar jarak angka IPG ke nilai 100, maka makin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki laki dan perempuan.

Penghargaan yang cukup prestisius pada skala nasional dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah telah diterima oleh Pemerintah Kota Magelang dengan keberhasilannya meraih penghargaan Parahita Ekapraya Tingkat Pratama pada tahun 2006, dilanjutkan anugerah tingkat utama (Parahita Ekapraya Tingkat Utama) di tahun 2007 yang dipertahankan sampai dengan tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2011 dan 2012, Pemerintah Kota Magelang kembali mendapatkan anugerah, kali ini tingkat menengah (Parahita Ekapraya Madya).

e. Kemiskinan

Penduduk miskin merupakan sebuah dilema pembangunan dan di manapun penduduk miskin akan selalu ada. Pada daerah dengan pendapatan per kapita tinggi belum tentu tidak ada penduduk miskin, yang dapat diperbuat oleh semua pengambil kebijakan baik di daerah maupun di pusat adalah menekan bagaimana agar penduduk miskin semakin turun/berkurang, malaupun sangat sulit untuk mencapai 0%.

Ada berbagai batasan dan cara mendefinisikan penduduk miskin, namun dalam sebuah perencanaan kebijakan yang lebih penting adalah konsistensi data. Di Kota Magelang, menurut perhitungan BPS garis kemiskinan seiring pergantian tahun, selalu meningkat, sedangkan data jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, seperti halnya yang terjadi antara tahun 2011-2015. Kondisi tersebut dialami oleh seluruh pemerintahan baik di daerah maupun di pusat.

Tabel 3.66
Jumlah Penduduk Miskin Kota Magelang (jiwa) Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk (jiwa)	119.210	119.647	120.158	120.615	120.957
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	13.100	12.100	11.800	11.019	10.920
Jumlah Penduduk Miskin (persen)	11,06	10,31	9,8	9,14	9,05
P1	1,61	1,48	1,45	0,94	1,39
P2	0,36	0,33	0,37	0,20	0,31
Garis Kemiskinan	280.877	304.695	350.554	376.143	405,228

Sumber: BPS Kota Magelang

Garis kemiskinan di Kota Magelang bergerak dari Rp 280.877,-/kapita/ bulan di 2011 meningkat menjadi Rp 405.228,-/ kapita/ bulan dengan persentase penduduk miskin dari 11,06% pada tahun 2011 terus menurun hingga mencapai menjadi 9,05 di 2015. Hal ini menjelaskan meskipun biaya pemenuhan kebutuhan hidup terus meningkat namun penduduk Kota Magelang dapat mengatasinya sehingga jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin menurun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat kesejahteraan di Kota Magelang semakin baik.

Sementara itu tingkat kedalaman kemiskinan(P1) di Kota Magelang dalam kurun waktu 5 tahun masih fluktuatif dan pada tahun 2015 ini sedikit mengalami kenaikan dibanding 2014 yaitu dari semula 0,94 menjadi 1,39 yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, sehingga angka indeks di tahun 2015 memperlihatkan kondisi yang lebih baik. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) juga masih terlihat fluktuatif dan perkembangan dari tahun 2014 ke 2015 semula 0,20 menjadi 0,31. Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2) ini dapat dianalisa dengan semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, dan di tahun 2015 terlihat bahwa indeks semakin tinggi yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin lebar.

Lebih jauh apabila dari Indeks Gini, antara tahun 2012-2013 terdapat penurunan yang cukup signifikan, yang menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Magelang semakin baik atau ketimpangan pendapatan antar penduduk kian menipis. Selanjutnya pada akhir tahun 2014 Gini Ratio akan turun kembali yang kondisi tersebut juga diperkirakan akan terjadi pula di tahun 2015.

Tabel 3.67
Indeks Gini Kota Magelang tahun 2010-2015

Tahun	Penduduk Kota Magelang	Indeks Gini Kota Magelang	Indeks Gini Jawa Tengah
2010	118.713	0,31	0,34
2011	119.210	0,34	0,38
2012	119.647	0,37	0,38
2013	120.158	0,33	0,39
2014	120.615	0,36	0,39
2015	120.952	0,34	0,38

Sumber: BPS Kota Magelang

f. Rasio Penduduk yang Bekerja

Tingkat kesempatan kerja menunjukkan peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Angka ini didapat dari perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Semakin besar angka TTK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah. Kondisi ketenagakerjaan Kota Magelang dapat dicermati pada Tabel berikut:

Tabel 3.68
Kondisi Penduduk Usia Kerja di Kota Magelang Tahun 2008-2015 (ribu jiwa / orang)

Tahun	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	Penduduk Usia Kerja / Tenaga Kerja	TPT (%)	TPAK (%)	TKK (%)
	Bekerja	Mencari Kerja (Pengangguran)					
2011	58.919	5.319 (5.85%)	26.752	90.990	8,28	70,60	91.72
2012	57.669	5.501 (6.05%)	27.775	90.945	8,71	69,46	91.29
2013	58.110	4.241 (4.69%)	28.101	90.452	6,80	68,93	93.20
2014	59.628	4.754 (5.06%)	29.625	94.007	7,38	68,50	92.62
2015	57.133	3.927 (4.14%)	33.823	94.883	6,43	64,35	93.57

Sumber: Sakernas, BPS

Dari Tabel di atas tersebut dapat dilihat, bahwa angka TTK selalu berada di atas nilai 85%, yang berarti rasio kesempatan kerjanya cukup tinggi.

g. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angka ini berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka ini berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Dari Tabel iii... dapat dilihat, bahwa dari tahun 2011 sampai 2015, angka TPT terlihat fluktuatif, sedangkan angka TPAK memiliki kecenderungan menurun. Kondisi ini disebabkan karena banyak warga Kota Magelang yang bekerja di luar wilayah. Untuk semakin menurunkan angka pengangguran, maka diharapkan bisa untuk mengarahkan potensi tenaga kerja ini ke dalam wilayah, atau dibuat situasi yang kondusif untuk investasi/industri, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Dengan juga melihat angka rata-rata lama sekolah yang masih kurang dari 12 tahun, sebaiknya juga dapat disiapkan lembaga-lembaga pendidikan non-formal untuk meningkatkan kemampuan angkatan kerja, sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi di dunia kerja.

h. Angka Beban Tanggungan Penduduk (Dependency Ratio – DR)

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan penduduk usia tidak

produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif). Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara/wilayah apakah tergolong maju atau sedang berkembang. DR merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase DR menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase DR yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada tabel berikut dapat dilihat Rasio Ketergantungan Kota Magelang Tahun 2010-2016.

Tabel 3.69
Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Magelang Tahun 2010-2016

Tahun	Usia Penduduk			Rasio Ketergantungan	Naik/ Turun
	0-14	15-64	65+		
2010	27.283	82.926	8504	43,16	
2011	27.072	83.435	8702	42,88	(0,28)
2012	26.855	83.897	8896	42,61	(0,26)
2013	26.604	84.448	9105	42,29	(0,33)
2014	26.376	84.903	9334	42,06	(0,23)
2015	26.107	85.260	9585	41,86	(0,20)
2016	25.897	85.534	9862	41,81	(0,06)

Sumber: BPS Kota Magelang

Dari Tabel di atas tersebut dapat dilihat bahwa Rasio Ketergantungan di Kota Magelang cenderung menurun, dengan angka penurunan per tahun kurang dari 1%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk Kota Magelang yang masuk usia tidak produktif memiliki ketergantungan yang sedang terhadap penduduk usia produktif.

3.4. Realisasi Anggaran per Sasaran

Adapun realisasi anggaran per sasaran tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.70
Realisasi Anggaran per Sasaran

No.	Sasaran	% Capaian Kinerja Th. 2016	Kriteria	Anggaran Tahun 2016			Keterangan
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	
1	Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	110,02%	Sangat Tinggi	5.449.440.000	4.498.146.449	82,54%	Efisien
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	101,20%	Sangat Tinggi	3.280.519.000	2.747.797.052	83,76%	Efisien



No.	Sasaran	% Capaian Kinerja Th. 2016	Kriteria	Anggaran Tahun 2016			Keterangan
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	
3	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	166,67%	Sangat Tinggi	2.362.644.000	2.067.292.655	87,50%	Efisien
4	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	128,49%	Sangat Tinggi	3.918.211.000	3.514.047.301	89,68%	Efisien
5	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	121,64%	Sangat Tinggi	2.940.712.000	2.685.624.933	91,33%	Efisien
6	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	104,25%	Sangat Tinggi	2.611.846.000	2.298.508.850	88,00%	Efisien
7	Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100,09%	Sangat Tinggi	2.088.605.000	1.909.603.134	91,43%	Efisien
8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional	89,29%	Tinggi	2.925.219.000	2.785.235.500	95,21%	Belum Efisien
9	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	140,29%	Sangat Tinggi	28.992.975.000	27.038.405.136	93,26%	Efisien
10	Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	123,43%	Sangat Tinggi	37.030.610.000	27.170.285.059	73,37%	Efisien
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	81,59%	Sangat Tinggi	2.025.738.000	1.439.105.900	71,04%	Efisien
12	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	148,93%	Sangat Tinggi	5.738.398.000	5.353.661.559	93,30%	Efisien
13	Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana	77,64%	Tinggi	124.758.000	123.558.000	99,04%	Belum Efisien
14	Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang	103,65%	Sangat Tinggi	97.264.000	95.073.950	97,75%	Efisien



No.	Sasaran	% Capaian Kinerja Th. 2016	Kriteria	Anggaran Tahun 2016			Keterangan
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	
15	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	102,40%	Sangat Tinggi	1.422.492.000	1.285.867.438	90,40%	Efisien
16	Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	86,10%	Tinggi	7.817.629.000	5.839.540.000	74,70%	Efisien
17	Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan	100,00%	Sangat Tinggi	3.009.340.000	2.934.201.125	97,50%	Efisien
18	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	78,71%	Tinggi	642.545.000	620.098.050	96,51%	Belum Efisien
19	Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	108,47%	Sangat Tinggi	78.000.000	76.260.623	97,77%	Efisien
20	Meningkatnya ketahanan pangan	105,64%	Sangat Tinggi	256.263.000	235.082.400	91,73%	Efisien
21	Meningkatnya lapangan kerja	151,40%	Sangat Tinggi	4.203.619.000	4.073.342.190	96,90%	Efisien
22	Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS	14,29%	Sangat Rendah	230.109.000	205.094.600	89,13%	Belum Efisien
23	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	100,00%	Sangat Tinggi	749.452.000	664.389.000	88,65%	Efisien
24	Menurunnya kesenjangan gender	85,22%	Tinggi	1.024.906.000	829.356.779	80,92%	Efisien
25	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	111,11%	Sangat Tinggi	1.741.477.000	1.696.004.700	97,39%	Efisien
26	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	115,81%	Sangat Tinggi	983.131.000	942.918.654	95,91%	Efisien
27	Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	100,00%	Sangat Tinggi	356.119.000	344.454.000	96,72%	Efisien
28	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	95,80%	Sangat Tinggi	1.333.460.000	1.292.783.098	96,95%	Belum Efisien



No.	Sasaran	% Capaian Kinerja Th. 2016	Kriteria	Anggaran Tahun 2016			Keterangan
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	
29	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	84,67%	Tinggi	230.930.000	174.460.000	75,55%	Efisien

Berdasarkan Data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengalokasian anggaran pada sasaran strategis secara umum efisien pada 24 sasaran strategis, namun demikian pada 5 sasaran belum tercapai efisiensi. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan di kemudian hari, agar terjadi efisiensi pengalokasian anggaran dan kinerja yang telah ditetapkan tercapai sesuai target.



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Magelang pada Tahun 2016 secara umum dalam kriteria sangat tinggi. Hal ini tercermin dari capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sangat tinggi sejumlah 54 indikator atau 77,14%.
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria tinggi sejumlah 7 indikator atau 10,00%.
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sedang sejumlah 2 indikator atau 2,86%.
- d. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria rendah sejumlah 2 indikator atau 2,86%.
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sangat rendah sejumlah 4 indikator atau 5,71%.
- f. Data belum dapat tersaji untuk 1 indikator atau 1,43% yaitu nilai opini BPK atas LKPD 2016.

Selanjutnya apabila parameter diukur berdasarkan ketercapaian terhadap target kinerja maka dapat disimpulkan sebagai berikut sejumlah 37 Indikator telah melampaui target, 13 indikator sesuai target dan 19 indikator masih berada di bawah target, sedangkan 1 indikator data belum dapat tersaji yaitu nilai opini BPK atas LKPD 2016.

Tingginya realisasi kinerja ini tidak lepas dari peran dari seluruh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dialokasikan pada Tahun 2016, sehingga target-target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan hasil memuaskan. Untuk itu kinerja yang sudah baik ini perlu untuk dipertahankan.

Kemudian untuk mengantisipasi kendala dan permasalahan pada pencapaian sasaran sebagai wujud upaya meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang, diperlukan adanya sinergi antar pemangku kepentingan dan kesinambungan dalam perencanaan program dan kegiatan, pengalokasian anggaran yang selaras, terarah dan tepat sasaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang konsisten agar target kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD 2016-2021 dapat terwujud dan tercapai sesuai rencana.

Demikian Laporan Kinerja ini kami susun, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita semua dalam rangka mengabdikan kepada bangsa dan negara serta masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga cita-cita UUD 1945 terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dapat segera tercapai.



LAMPIRAN

- Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Kota Magelang
 - Daftar Prestasi Kota Magelang Tahun 2016



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

INSPEKTORAT

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 P.O Box 78 Telp. (0293) 363695 (5lines)
Fax. (0293) 364910 Telex 22716 kod mgl IA MAGELANG 56101
Website : inspektoratmagelangkota.go.id, Email : inspektoratmglkota@yahoo.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Magelang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Magelang, 17 Maret 2017

INSPEKTUR KOTA MAGELANG



Drs. DJATMO WAHYUDI

Pembina Utama Muda

NIP. 19581115 198503 1 014

DAFTAR PRESTASI KOTA MAGELANG TAHUN 2016

1.	Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 2016 atas komitmen dan keberhasilannya dalam penyelenggaraan pelayanan penerapan KTP-el, sehingga Kota Magelang berhasil mencapai target penerbitan KTP-el sesuai jumlah wajib KTP-el yang telah ditetapkan.
2.	Penghargaan Anugerah Adipura Kirana, atas penilaian Kota Sehat di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3.	Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2016 atas Penilaian sekolah berwawasan atas nama SD Negeri Kramat I Magelang Utara dan SMA Negeri 5 Kota Magelang
4.	Peringkat 3 atau sebagai Finalis Anugerah BUDIPRAJA diselenggarakan oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
5.	Juara 1 Anugerah Widigdapura sebagai daerah kabupaten/Kota Pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) Terbaik di JawaTengah di selenggarakan oleh lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
6.	Juara 2 Kompetisi KOINKU diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama Andjar Prasetyo, SE,M.Si. Peneliti pada Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang
7.	Kejuaraan Lomba Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2016 atas nama Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang
8.	Penghargaan Satyalancana Pembangunan untuk Walikota Magelang dari BKKBN RI
9.	Anugerah PARAHITA EKAPRAYA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk Kota Magelang
10.	Juara V 10 Program Pokok PKK Tingkat Nasional diwakili Oleh Tim Penggerak PKK Kota Magelang
11.	Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Nasional Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
12.	Insiator TPA (Tempat Penitipan Anak) Ramah Anak atas nama Pasar Rejowinangun.
13.	Juara III Kejuaraan Anugerah Media Humas Kategori Profile Lembaga Humas di Jakarta